

SUARA SUNYI DI TENGAH KERIUHAN

Interupsi Komunitas Akademik dan Masyarakat Sipil
di Akhir Masa Pemerintahan Jokowi

Buku ini merekam 76 (tujuh puluh enam) pernyataan publik yang dibacakan oleh komunitas akademisi dan organisasi masyarakat sipil pada akhir pemerintahan Joko Widodo. Buku ini merekam 2 (dua) kecenderungan suara publik terhadap sepak terjang Jokowi di akhir masa jabatannya, ada yang memberikan kritik dan bersikap abu-abu. Tidak ada yang secara terbuka mendukung kebijakan dan sikap rezim Jokowi.

Buku ini hadir untuk membantu kita mengingat peristiwa publik yang penting. Tanpa pengingat, risiko mengulangi kesalahan sangat besar. Apalagi, memori kita saat ini cenderung volatil, mudah menguap, alias gampang lupa. Pengingat tidak hanya membantu kita untuk menjauhi kesalahan yang sama, tetapi juga memperkuat hikmah dari pengalaman sebelumnya. Karenanya, ungkapan “orang bijak belajar dari kesalahan orang lain, tetapi orang bodoh mengulanginya sendiri” menjadi sangat masuk akal. Bangsa ini tidaklah bodoh. Buku ini adalah pengingat itu, yang wajib dibaca oleh semua orang yang mencintai Indonesia.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Universitas Islam Indonesia
Jalan Kaliurang km. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584
Email: penerbit@uii.ac.id



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

SUARA SUNYI DI TENGAH KERIUHAN
Interupsi Komunitas Akademik dan Masyarakat Sipil di Akhir Masa Pemerintahan Jokowi



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

SUARA SUNYI DI TENGAH KERIUHAN

Interupsi Komunitas Akademik dan Masyarakat Sipil
di Akhir Masa Pemerintahan Jokowi



Prolog: Eko Riyadi
Epilog: Fathul Wahid

Suara Sunyi di Tengah Keriuhan

**Interupsi Komunitas Akademik dan Masyarakat Sipil
di Akhir Masa Pemerintahan Jokowi**



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Judul : Suara Sunyi di Tengah Keriuhan: Interupsi
Komunitas Akademik dan Masyarakat Sipil di Akhir Masa
Pemerintahan Jokowi

Penyunting	: Sahid Hadi & Heronimus Heron
Prolog	: Eko Riyadi
Epilog	: Fathul Wahid
Perancang Sampul & Tata Letak	: Mazdan Maftukha Assyayuti
Penyelaras Aksara	: Dzaki Jenevoa Kartika, Mahrus Ali & Mazdan Maftukha Assyayuti

Cetakan Pertama, Februari 2025

xvi + 220 halaman

14,8 cm x 21 cm

Diterbitkan oleh Universitas Islam Indonesia

Jalan Kaliurang km. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584

Telepon: (0274) 898444 ext 2301

Email: penerbit@uii.ac.id

Anggota IKAPI Yogyakarta

Buku ini didanai oleh Universitas Islam Indonesia dan
dikerjakan oleh para peneliti di Pusat Studi Hak Asasi
Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII).

PENGANTAR PENERBIT

#IndonesiaGelap

#KaburAjaDulu

Dua tagar di atas viral di pekan ketiga bulan Februari 2025 diikuti dengan aksi turun jalan yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, terutama mahasiswa di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makasar, dan kota-kota lain. Aksi di media sosial dan di jalan itu merupakan respon atas kinerja 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Awal pemerintahan yang hanya melanjutkan tren pola pemerintahan Jokowi periode kedua. Sebuah tren ‘menggelapnya’ demokrasi dan republik.

Buku ini semakin relevan untuk menjadi salah satu penanda perjalanan arah ke(tata)negaraan Indonesia. Saat publik sempat merasa Indonesia semakin demokratis sejak era reformasi, namun sejak 2020an, Indonesia bergeser mundur bahkan dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, dinyatakan ‘gelap’ oleh mahasiswa.

Buku ini merupakan publikasi ‘apa adanya’ dari berbagai pernyataan kalangan perguruan tinggi dan masyarakat sipil di ujung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Secara teknis, publikasi pernyataan akademik ini sudah melalui permohonan izin kepada pihak yang mengeluarkan pernyataan. Di luar pernyataan yang terekam dalam buku ini, terdapat banyak pernyataan yang tidak dicantumkan dalam buku ini karena tidak diizinkan oleh pihak yang membuat pernyataan.

Kami ingin mengucapkan terimakasih kepada Heronimus Heron dan Sahid Hadi, keduanya adalah peneliti pada Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (Pusham UII), yang telah bekerja keras mengumpulkan pernyataan publik yang terserak di berbagai kanal media. Heron dan Hadi juga yang telah merapikan, membuat

klaster, serta meminta izin satu persatu, secara resmi kepada pihak yang mengeluarkan pernyataan. Kepada Dzaki Jenevoa Kartika dan Mahrus Ali, terima kasih telah membaca ulang untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan. Mazdan Maftukha Assyayuti, terimakasih telah membuat buku ini menjadi tertata dan menarik untuk dibaca. Kepada Mas Fathul Wahid, Rektor Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas percikan gagasan untuk mengompilasi pernyataan sikap kalangan perguruan tinggi ini dan kemudian kami tambah dengan pernyataan masyarakat sipil, serta memberikan dukungan hingga buku ini dapat dicetak.

Terakhir, substansi pernyataan sikap sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak yang membuat dan kami bertanggungjawab atas hal-hal teknis penerbitan. Penerbitan buku ini kami harapkan menjadi rekaman sejarah yang bisa menginspirasi banyak pihak, terutama generasi masa depan. Demi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Eko Riyadi

Direktur Pusham UII

PROLOG

SUARA SUNYI ITU AKAN LANTANG PADA WAKTUNYA

Eko Riyadi

Suara Publik Itu Diperlukan

Tak ada satu pemimpin politik yang bisa mengakhiri suatu demokrasi; demikian juga, tak satu pemimpin yang bisa menyelamatkan suatu demokrasi. Demokrasi adalah usaha bersama. Nasibnya tergantung pada kita semua (Steven Levitsky & Daniel Ziblatt)

Levitsky & Ziblatt telah memberikan peringatan bahwa terdapat pemimpin yang dilahirkan melalui mekanisme demokratis, tetapi kemudian menjadi pihak yang membunuh demokrasi. Namun, sebagian besar pemimpin membunuh demokrasi secara perlahan. Pemilu masih diselenggarakan, parlemen kritis masih ada, media massa masih aktif, bahkan nafsu kekuasaan politik dilegalkan dan disetujui oleh parlemen dan dianggap konstitusional oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan *judicial review*, seperti Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung (Steven Levitsky & Daniel Ziblatt, 2023, hlm. 60).

Peringatan di atas nampak jelas telah terjadi di Indonesia pada akhir periode pertama dan di sepanjang periode kedua Presiden Joko Widodo, kira-kira tahun 2018-2024. Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi, pengesahan Undang-Undang Pertambangan, *Omnibus Law*, Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas usia calon presiden dan wakil presiden, dan terakhir walaupun gagal adalah putusan Mahkamah Agung tentang batas usia calon gubernur dan wakil gubernur menjadi penanda rusaknya tatanan hukum dan demokrasi di Indonesia. Seluruh perubahan ini nampak legal secara prosedural, bahkan dikukuhkan oleh lembaga peradilan. Namun, semua perubahan itu terjadi sesungguhnya bukan didasarkan

pada kebutuhan konstitusional demi kepentingan terbaik rakyat dan bangsa Indonesia, tetapi lebih sebagai jalur untuk kepentingan politik dan ekonomi sekelompok elite dan anak-anak Presiden Joko Widodo.

Di tengah situasi yang semakin genting serta diamnya kekuatan politik dan organisasi sosial kemasyarakatan termasuk keagamaan, komunitas akademik mengambil peran untuk melantangkan suara nyaring spirit republik dan demokrasi, walaupun ada yang suaranya parau. Pernyataan publik yang telah disuarakan menandai masih adanya cendekiawan yang berpijak pada nilai, walaupun ada juga yang mencari aman dan mengirimkan sinyal dukungan kepada rezim. Buku ini merekam suara publik yang tajam sekaligus yang parau. Dipersilakan kepada pembaca untuk menikmati sikap komunitas akademik dan masyarakat sipil di dalam buku ini.

Publikasi Berbasis Persetujuan

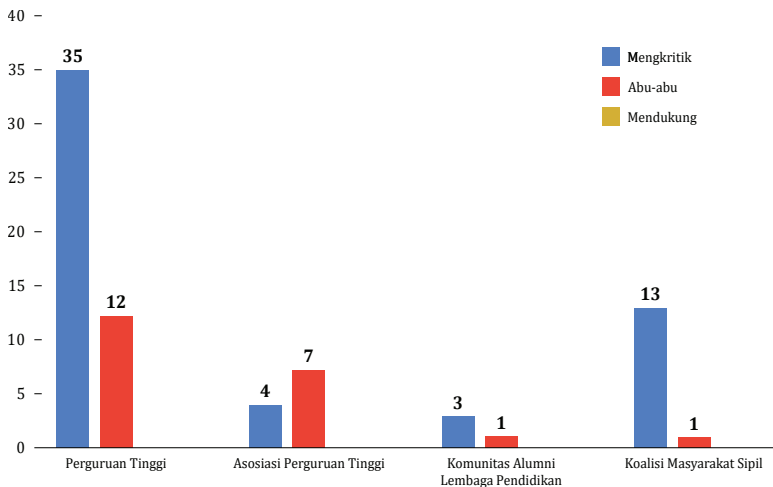
Buku ini merekam 76 (tujuh puluh enam) pernyataan publik yang dibacakan oleh komunitas akademisi dan organisasi masyarakat sipil. Secara teknis, pernyataan publik dikumpulkan dan dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu suara perguruan tinggi, asosiasi perguruan tinggi, komunitas alumni lembaga pendidikan, dan koalisi masyarakat sipil. Suara perguruan tinggi termasuk di dalamnya pernyataan resmi perguruan tinggi, pernyataan komunitas dosen, dan komunitas mahasiswa.

Pernyataan publik yang direkam di dalam buku ini telah mendapatkan persetujuan dari para pihak yang menyatakan sikap publiknya. Penyunting telah mengirimkan surat persetujuan kepada semua pihak yang mengeluarkan rilis dan memberi waktu selama 7 (tujuh) hari untuk membalasnya. Di dalam surat persetujuan telah diinformasikan bahwa jika dalam waktu 7 (tujuh) hari, pihak yang merilis tidak menyampaikan keberatan, maka hal itu dianggap sebagai persetujuan untuk rilis. Di luar 76 (tujuh

puluh enam) pernyataan publik yang direkam dalam buku ini, terdapat beberapa rilis yang tidak dimasukkan karena ketiadaan persetujuan dari pihak yang membuatnya.

Kritik Tajam Vs. Sikap Mencari Selamat

Buku ini merekam 2 (dua) kecenderungan suara publik pada masa akhir pemerintahan Jokowi periode kedua, yaitu memberikan kritik dan bersikap abu-abu, dan tidak ada yang secara terbuka mendukung kebijakan dan sikap rezim Jokowi. Petanya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar di atas menunjukkan bahwa walaupun secara kuantitatif, komunitas akademik dan masyarakat sipil yang mengkritik lebih banyak daripada yang abu-abu dalam bersikap, namun hal itu menunjukkan bahwa terdapat sebagian komunitas akademik dan masyarakat sipil yang berlandung di balik sikap normatif agar tidak menunjukkan sikap publiknya. Mereka yang mengkritik secara umum memiliki pandangan yang tegas terhadap beberapa hal seperti perubahan norma ambang batas umur calon presiden dan pembagian bantuan sosial di wilayah-wilayah tertentu dilakukan untuk pemenangan calon tertentu. Namun bagi sebagian komunitas yang bersikap abu-abu,

secara umum menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi serta menuntut semua pihak, terutama elite politik, untuk merawat demokrasi.

Kritik terbuka yang disampaikan oleh komunitas akademik dan masyarakat sipil pada umumnya terkait penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Joko Widodo untuk kepentingan pribadinya. Hal ini terlihat dengan pernyataan, “Upaya membunuh demokrasi lainnya adalah tindakan ‘main kasar konstitusional’. Tindakan paling kasar adalah mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meloloskan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden. Ini adalah serangan terhadap independensi lembaga peradilan sekaligus pengkhianatan terhadap amanat Reformasi 1998. Demokrasi sebagai kesepakatan publik yang suci telah mati di tangan Presiden Jokowi. Ini merupakan fakta pahit setelah Indonesia melewati 26 tahun reformasi”.

Penggunaan pernyataan yang halus tetapi substansinya sangat menusuk juga dilakukan oleh komunitas akademik. Hal ini terlihat dari pernyataan, “Alih-alih mengamalkan dharma bhakti almaternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya. Tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila”.

Berbeda dengan pernyataan lugas dan tajam di atas, beberapa komunitas akademik memilih menggunakan diksi yang normatif. Seakan benar secara substantif, namun sangat terasa bahwa pernyataan tersebut bernada, walaupun tidak secara eksplisit mendukung rezim, setidaknya mencari ruang aman di tengah riuh rendah kritik yang bertaluntalun disuarakan oleh pelbagai perguruan tinggi. Model ini dapat ditemukan misalnya dalam pernyataan, “Kebebasan berpendapat adalah hak kita semua yang dijamin konstitusi, karena itu diskusi dan dialog yang konstruktif dalam kerangka kebebasan mimbar akademik harus terus kita jaga. Selanjutnya penting bagi kita untuk menyampaikan

pemikiran dan pendapat dengan penuh tanggung jawab, menghormati perbedaan pandangan situasi politik, dan menjunjung tinggi etika serta moral akademis. Dalam setiap diskusi, sangat penting bagi kita untuk menjaga integritas akademik, dengan mengutamakan pendekatan yang berbasis fakta dan data, serta menghargai keragaman pandangan dengan sikap yang santun”.

Terdapat pernyataan yang, menggunakan nalar *a contrario* (*mafhuum mukhoolafah*), menuduh para pengkritik Joko Widodo telah melakukan kampanye hitam. Hal ini dapat dibaca pada model pernyataan, “Kebebasan berpendapat kita hargai dan junjung tinggi sebagai amanat konstitusi, tapi pilihan politik yang beragam juga harus dihormati dan dihargai. Meskipun terdapat perbedaan pilihan dan preferensi calon presiden, saya ingatkan untuk tidak melakukan kampanye hitam terhadap calon presiden yang tidak disukai. Hindari menyebarkan informasi *hoax* dan berita-berita yang belum terverifikasi kebenarannya dan tidak diketahui sumbernya. Mari kita menjaga atmosfir akademik yang sehat dalam bingkai kebebasan mimbar akademik yang bertanggung jawab.”

Buku ini merupakan rekaman sejarah yang diharapkan menjadi catatan abadi tentang bagaimana respon publik atas situasi politik para periode 2023-2024. Walaupun suara publik ternyata tidak berdampak signifikan terhadap praktik politik dan perebutan kekuasaan pada tahun 2024, tetapi sejarah telah mencatat bagaimana nalar sehat telah digunakan dan perguruan tinggi kembali menjadi pelantang suara publik. Meminjam kaidah dakwah dalam tradisi Islam, “tugas kita adalah menyuarakan kebaikan. Adalah urusan Allah untuk menyampaikan kebaikan itu kepada pihak yang dituju oleh kebaikan itu.” Bisa jadi, suara publik ini masih berupa suara sunyi. Namun, di dalam sejarah, banyak perubahan sosial yang cukup besar terjadi karena suara yang pernah dilantangkan di masa lalu.

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT	iii
PROLOG: SUARA SUNYI ITU AKAN LANTANG PADA WAKTUNYA.....	v
DAFTAR ISI	x
PERGURUAN TINGGI.....	1
Rilis Aliansi BEM SE-UI dan MWA UI UM: “Mendorong Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang Netral dan Demokratis”	2
Rilis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret: “Maklumat Supersemar ‘Demokrasi Terkhianati, Pancasila Tercela’”	4
Rilis Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang: “Mahasiswa UMM Bersuara: Pernyataan Sikap untuk Pemilu 2024”	6
Rilis Mahasiswa DPP Fisipol UGM Lintas Angkatan: “Surat untuk Menyampaikan Rasa Cinta Sekaligus Kecewa”	9
Rilis Universitas Airlangga: “Rektor Unair Serukan Demokrasi Bermartabat dan Pemilu Berkualitas”	13
Rilis Universitas Ahmad Dahlan: “Seruan Moral Menyelamatkan Demokrasi Indonesia”	15
Rilis Civitas Academica Universitas Andalas: “Manifesto untuk Penyelamatan Bangsa”	17
Rilis Civitas Akademika Universitas Brawijaya: “Penegakan Hukum dan Etika Demokrasi di Indonesia”	20
Rilis Civitas Akademika Universitas Bung Karno: “Mencegah Kemunduran Demokrasi”	23
Rilis Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada - I: “Petisi Bulaksumur”	25

Rilis Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada - II: “Kampus Menggugat: Tegakan Etika dan Konstitusi, Perkuat Demokrasi”	27
Rilis Guru Besar Universitas Indonesia: “Seruan Kebangsaan Kampus Perjuangan ‘Genderang Universitas Indonesia Bertalu Kembali”	30
Rilis Institut Pertanian Bogor: “Himbauan Menyikapi Pemilu 2024”	32
Rilis Keluarga Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Peduli Negeri: “Menjaga Integritas Berbangsa dan Merawat Demokrasi”	34
Rilis Komunitas Guru Besar dan Dosen Institut Teknologi Bandung Peduli Demokrasi Berintegritas: “Mencegah Kemunduran Demokrasi”	36
Rilis Universitas Hasanuddin: “Maklumat Rektor”	39
Rilis Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	41
Rilis Universitas Islam Indonesia - I: “Kemunduran Demokrasi di Indonesia”	43
Rilis Forum Dosen & Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia - II: “Wajah Hukum dan Demokrasi”	45
Rilis Civitas Academica Universitas Islam Indonesia - III: “Indonesia Darurat Kenegarawanan”	49
Rilis Universitas Islam Indonesia - IV: “Kematian Demokrasi di Indonesia”	52
Rilis Civitas Academica Universitas Jember: “Seruan Moral Selamatkan Demokrasi”	56
Rilis Universitas Kristen Indonesia: “Bersikap, Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024”	58
Rilis Sivitas Akademika Universitas Kristen Duta Wacana: “Situasi Politik dan Pemilu 2024”	60
Rilis Rektor Universitas Khairun: “Imbau Netral Jelang Pemilu 2024”	62

Rilis Sivitas Akademika Universitas Lambung Mangkurat: “Deklarasi Kebangsaan Kayu Tangi untuk Demokrasi Bermartabat”	65
Rilis Sivitas Akademika Universitas Malikussaleh: “Penyelamatan Reformasi dan Demokrasi Nasional”	67
Rilis Dewan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: “Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban”	70
Rilis Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung: “Darurat Kenegarawanan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”	73
Rilis Universitas Muhammadiyah Surakarta: “Maklumat Kebangsaan”	76
Rilis Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta: “Maklumat”	79
Rilis Senat Universitas Mulia	82
Rilis Sivitas Akademika Universitas Mulawarman: “Pernyataan Sikap”	84
Rilis Civitas Akademika Universitas Negeri Jakarta: “Deklarasi Rawamangun, Selamatkan Demokrasi untuk Selamatkan Indonesia sebagai Negara Republik”	86
Rilis Civitas Academica Universitas Negeri Malang: “Menjaga Cita-Cita Proklamasi dan Reformasi”	90
Rilis Guru Besar dan Civitas Akademika Universitas Negeri Surabaya: “Mengawal Demokrasi, Menjaga NKRI”	93
Rilis Universitas Sriwijaya: “Himbauan”	96
Rilis Civitas Akademika Universitas Tanjungpura: “Himbauan”	98
Rilis Universitas Padjadjaran: “Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat”	99
Rilis Sivitas Akademika Universitas Pendidikan	

Indonesia: “Petisi Bumi Siliwangi, Kampus Pejuang Pendidikan”	103
Rilis Universitas Sebelas Maret Surakarta: “Pernyataan Sikap”	106
Rilis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta: “Menghadapi Pemilu Tahun 2024”	107
Rilis Universitas Siliwangi: “Deklarasi Pemilu Aman dan Damai”	108
Rilis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa: “Rektor Untirta Mendukung Proses Demokrasi dan Mendorong Terciptanya Lingkungan Kampus yang Inklusif dan Demokratis dalam Pemilu 2024”	110
Rilis Sivitas Akademika Universitas Trunojoyo Madura: “Maklumat”	112
Rilis Guru Besar, Dosen dan Alumni Universitas Sumatera Utara	115
Rilis Intelektual Salatiga Peduli Bangsa: “Seruan”	117

ASOSIASI PERGURUAN TINGGI 119

Rilis Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI).....	120
Rilis Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia: “Dinamika Politik Menjelang Pemilu 2024”	122
Rilis Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam Swasta se-Indonesia (BKSPTIS) – I: “Merespon Masalah Pendidikan dan Kebangsaan”	124
Rilis Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam Swasta se-Indonesia (BKSPTIS) – II: “Demokrasi dan Pemilu yang Bermartabat”	127
Rilis Forum Rektor Indonesia: “Deklarasi Pemilu Aman dan Damai Forum Rektor Indonesia”	129
Rilis Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah: “Pernyataan Sikap”	130

Rilis Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Tasikmalaya.....	133
Rilis Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia: “Pentingnya Menjaga dan Memelihara Kondusivitas Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Menghadapi Pemilihan Umum Presiden R.I dan Pemilihan Legislatif Tahun 2024”	135
Rilis Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi Yogyakarta - I: “Pemilu Berkualitas dan Demokratis Bermartabat”	137
Rilis Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi Yogyakarta - II: “Mewujudkan Pemilu Damai, Jujur, dan Adil sebagai Penanda Demokrasi Berkualitas dan Bermartabat”	140
Rilis Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi se-Indonesia: “Seruan Jembatan Serong II”	143

KOMUNITAS ALUMNI

LEMBAGA PENDIDIKAN..... 145

Rilis Alumni Sapen (Alumni IAIN/UIN Sunan Kalijaga) Bersuara: “Kondisi Mutakhir Bangsa Indonesia”	146
Rilis Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta: “Menanggapi Situasi Bangsa Menjelang Pemilu 2024”	149
Rilis Ikatan Keluarga Alumni Unisma: “Matinya Demokrasi: Presiden Harus Sadar Diri”	152
Rilis Komunitas Pecinta Negeri Alumni SMA Kolese De Britto Yogyakarta: “Seruan Moral”	154

KOALISI MASYARAKAT SIPIL..... 156

Rilis Aliansi GEMARAK (Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat): “Seruan Rawamangun,

Selamatkan Republik”	157
Rilis Forum Cik Di Tiro - I: “Sistem Anti Korupsi Dilumpuhkan, Hak Asasi Manusia Diberangus, Demokrasi Dimatikan”	162
Rilis Forum Cik Di Tiro - II: “Selamatkan Indonesia, Menolak Lupa, Melawan Ketamakan Berkuasa”	164
Rilis Forum Cik Di Tiro - III: “Menandai Dua Pekan Matinya Demokrasi Elektoral”	178
Rilis Forum Cik Di Tiro – Gejayan - IV: “30 Hari Matinya Demokrasi di Rezim Jokowi”	182
Rilis Forum Cik Di Tiro – Sejadat - V: “Pernyataan”	187
Rilis Forum Cik Di Tiro – Jagad - VI: “Pernyataan Terbuka”	189
Rilis Ikatan Sarjana Katolik Indonesia - Dewan Pimpinan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta: “Menyikapi Perkembangan Negara dan Bangsa Indonesia yang Mengalami Regresi Demokrasi”	193
Rilis Jaringan Antariman Indonesia (JAI): “Alarm Keutuhan dan Keberagaman Bangsa”	196
Rilis Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi HAM Internasional: “Sisi Gelap Pembangunan Era Jokowi dalam Dua Modus Represi: Populisme Sektarian dan Dalih Pembangunan”	199
Rilis Koalisi Pilih Pulih: “Pilih Pulih dari Krisis Iklim dan Hancurnya Demokrasi dan HAM”	203
Rilis Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2003-2019: “Seruan Moral untuk Pemerintah agar Kembali Menjunjung Tinggi Etika”	206
Rilis Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia: “Sikap MPH PGI terhadap Pelaksanaan Pemilu	

2024 dan Seruan Pastoral kepada Segenap Umat
Kristiani untuk Berpartisipasi dalam Pemilu 2024” 209

Rilis Pimpinan Pusat Muhammadiyah:
“Pelaksanaan Pemilu 2024” 214

**EPILOG: BELAJAR DARI MASA KELAM
UNTUK MASA DEPAN.....216**

PERGURUAN TINGGI

Rilis Aliansi BEM SE-UI dan MWA UI UM: “Mendorong Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang Netral dan Demokratis”

Tanggal rilis: Selasa, 13 Februari 2024

PERNYATAAN SIKAP ALIANSI BEM SE-UI DAN MWA UI UM: MENDORONG PENYELENGGARAAN PEMILU 2024 YANG NETRAL DAN DEMOKRATIS

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam demokrasi suatu negara. Pada dasarnya, pemilu mencerminkan esensi demokrasi dimana rakyat berhak memilih sosok yang pantas menahkodai negeri dan menentukan arah masa depan bangsa ini. Akan tetapi, apa yang kita saksikan di depan mata kini sangat jauh dari idealisme demokrasi yang dicita-citakan. Alih-alih menjadi ajang pesta demokrasi rakyat yang disambut dengan semarak, Pemilu 2024 justru menjadi medan pertarungan elite politik yang dalam dinamika dan kompleksitasnya sering kali meminggirkan dan menjadikan rakyat sebagai komoditas politik semata.

Pemilu 2024 malah dikotori oleh tindakan-tindakan yang mencederai demokrasi dan mengganggu etika, hukum, serta konstitusi sehingga melenceng jauh dari tujuan kedaulatan di tangan rakyat. Kondisi ini terang terlihat dalam berbagai fenomena yang dipertontonkan secara nyata, mulai dari pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK), keberpihakan Presiden Jokowi dan menteri-menterinya, pelanggaran etik Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), politisasi kebijakan-kebijakan populis pemerintah, kasus kertas suara yang sudah tercoblos, politik identitas, dan masih banyak lagi. Hal ini tentu menyalahi asas “jujur” dan “adil” yang seharusnya menjadi pedoman pelaksanaan pemilu.

Pemilu sejatinya bukan sekadar ritual formalitas lima tahun sekali, melainkan pondasi utama dalam membangun

demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, Aliansi BEM se-UI akan terus mengawasi dan mengkritisi setiap tahap pelaksanaannya demi memastikan bahwa hak-hak demokratis rakyat tetap terjaga dan dihormati. Kami siap berperan aktif dalam menjaga integritas dan keadilan pemilu demi mewujudkan cita-cita demokrasi yang sesungguhnya. Maka, Aliansi se-UI menyatakan sikap sebagai berikut:

1. menyalahkan sikap Presiden Jokowi dan para pejabat negara aktif lainnya yang menunjukkan keberpihakannya serta menggunakan fasilitas negara kepada pihak tertentu pada Pemilu 2024;
2. menuntut seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk mengikuti segala aturan yang telah ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu serta berpedoman pada asas luber jurdil;
3. menuntut KPU dan Bawaslu untuk memiliki integritas dalam menindak segala bentuk kecurangan secara tegas dan tidak tebang pilih sesuai dengan aturan yang berlaku;
4. mengecam segala bentuk tindakan represif dan intimidatif yang mempersempit ruang demokrasi;
5. mendesak pemenuhan kesejahteraan bagi KPPS pada penyelenggaraan Pemilu 2024;
6. Aliansi BEM se-UI bertekad untuk mengawal jalannya sisa rangkaian Pemilu 2024.

Demikian pernyataan sikap kami sampaikan.

Aliansi BEM se-UI dan MWA UI UM: BEM UI, BEM IKM FK UI, BEM FKG UI, BEM FMIPA UI, BEM FH UI, BEM FEB UI, BEM FIB UI, BEM FISIP UI, BEM FKM UI, BEM FIK UI, BEM VOKASI UI, BEM FF UI, BEM FIA UI, dan MWA UI UM.

Rilis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret: “Maklumat Supersemar ‘Demokrasi Terkhianati, Pancasila Tercela’”

Tanggal rilis: Rabu, 7 Februari 2024

MAKLUMAT SUPERSEMAR

“DEMOKRASI TERKHIANATI, PANCASILA TERCELA”

Telah terjadi krisis kebangsaan dalam kondisi politik nasional di Pemilu 2024 yang diakibatkan oleh kesewenang-wenangan, ketidakadilan, dan ketidakpedulian terhadap standar etika tinggi. Tindakan-tindakan untuk melanggengkan kekuasaan telah mengkhianati demokrasi yang seharusnya menjadi sistem untuk memerdekakan manusia. Pengabaian kepentingan umum demi keuntungan segelintir pihak telah mencela Pancasila yang seharusnya menjadi pedoman hidup manusia Indonesia.

Pada era pergerakan, Surakarta telah menjadi marwah bagi tumbuhnya kebangsaan Indonesia melalui Budi Oetomo, Serekat Islam, Insulinde, dan elemen pergerakan lainnya di Surakarta yang menjadi aktor-aktor pejuang dalam menentang kesewenangan penjajah. Dengan demikian, kami sebagai penerusnya sangat memiliki kewajiban untuk menjaga marwah nilai-nilai kebangsaan Indonesia dengan menentang ‘para penjajah’ demokrasi dan Pancasila saat ini. ‘Para penjajah’ ini merupakan pejabat publik yang menganggang konstitusi, melakukan pernyataan kontraproduktif mengenai netralitas kampanye, melakukan keberpihakan terhadap salah satu paslon demi keluarga dan kroninya, serta menggunakan kekuasaannya untuk mewujudkan kepentingannya yang jauh dari nilai persatuan Indonesia dan keadilan sosial.

Di sisi lain, Universitas Sebelas Maret sebagai tempat insan cendekia memiliki kewajiban untuk bertanggung

jawab pada masyarakat berdasarkan ilmu, tidak diam atas ketidakbenaran, dan tidak tunduk pada kekuasaan. Universitas Sebelas Maret harus tegak lurus dengan benar-benar menunjukkan sikap sebagai kampus benteng Pancasila.

Pada era pergerakan, Surakarta telah menjadi marwah. Oleh karena demokrasi telah terkhiyati dan Pancasila telah tercela untuk kepentingan segelintir pihak dalam Pemilu 2024, kami, Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Kampus Benteng Pancasila, menyatakan:

1. Kecewa atas keberjalanan demokrasi yang tidak dapat menjunjung tinggi etika dan prinsip-prinsip hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Mendesak seluruh lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2024 agar menegakkan independensi dan didasarkan pada prinsip *luber jurdil*.
3. Menuntut Presiden dan semua pejabat pemerintahan untuk tidak melakukan politisasi maupun personalisasi bantuan sosial dan tidak terlibat dalam tim sukses atau tim kampanye pasangan calon.
4. Menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri terbebas dari paksaan memihak salah satu calon.
5. Kecewa atas segala sikap maupun tuduhan yang memposisikan kampus yang telah bersuara berdasarkan pada standar etika dan keilmuan sebagai partisan.

**Rilis Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang:
“Mahasiswa UMM Bersuara: Pernyataan Sikap untuk
Pemilu 2024”**

Tanggal rilis: Jumat, 9 Februari 2024

**MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MALANG BERSUARA: PERNYATAAN SIKAP UNTUK
PEMILU 2024**

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini tertuang secara jelas di dalam pasal 1 ayat 3 sehingga segala kebijakan negara harus sesuai dengan hukum. Hukum dan etika merupakan satu perpaduan yang tidak bisa saling terpisahkan. Maka dari itu, etika di atas segala-galanya. Untuk melakukan sesuatu, diperlukan etika untuk menjadi tolak ukur dalam kebijakan yang dibuat. Begitu pun pada kondisi hari ini bahwa intervensi penguasa dalam pemilu merupakan suatu kebijakan yang kontradiksi dan distorsi sehingga mengakibatkan adanya pertentangan etika publik di sebuah tatanan kenegaraan. Menjelang menyambut Pemilu 2024, berbagai isu kontroversi muncul seperti pelanggaran etika, menodai integritas demokrasi dan statement kontradiksi. Hal ini akan menjadi pemicu dan membuat esensi demokrasi menjadi semakin mundur.

Dalam menyikapi isu tersebut Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang perwakilan dari beberapa organisasi di UMM yakni BEM UMM, IMM UMM, GMNI UMM, PMII UMM serta beberapa BEM Fakultas (BEM FKIP, BEM FT, BEM FISIP) di UMM melakukan Pernyataan Sikap pada (09/02) pukul 10.15 WIB di Helipad UMM untuk merespon isu pada hari ini, demi merawat esensi berdemokrasi dan tetap menjaga pesta demokrasi sebagai ajang pesta rakyat yang istimewa disambut tanpa kepentingan politik maupun elite yang ada.

Melalui pernyataan sikap ini diharapkan dapat memberikan dukungan agar Pemilu 2024 tetap terlaksana sesuai prinsip-

prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yakni prinsip keadilan, jujur, damai dan sejahtera.

Tak hanya itu, mereka pun menekankan perlunya institusi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pernyataan sikap yang disampaikan Presiden Mahasiswa BEM UMM, Yogi Syahputra Al Idrus mengatakan, ada 9 poin pernyataan sikap tersebut untuk mengawal demokrasi untuk pemilu damai, jujur, bersih, dan sejahtera, yakni:

1. Mengimbau pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak tebang pilih, tidak mencederai demokrasi dan kebebasan berpendapat, dan bebas dari politik praktis.
2. Mengimbau kepada seluruh institusi pemerintah (DPR, MPR, MK, Penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu, DKPP dan aparat penegak hukum yakni TNI, Polri dan BIN) untuk menjunjung tinggi nilai demokrasi sehingga terwujud pemilu yang damai, jujur, adil dan bersih.
3. Mengimbau kepada pimpinan nasional harus menjadi teladan untuk menjunjung hukum dan nilai demokrasi agar masyarakat memiliki panutan hiruk pikuk pesta rakyat dan tidak boleh ada campur tangan kekuasaan.
4. Mendesak kepada seluruh Sivitas Akademika PTMAI terkhusus UMM untuk memegang teguh kepada arahan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam menghadapi Pemilu 2024.
5. Mengimbau para tokoh masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga ketenangan dan ketenteraman pemilu demi kesatuan dan persatuan bangsa.
6. Mengimbau kepada para pimpinan parpol dalam hal ini tim sukses ketiga paslon capres-cawapres untuk

menjunjung tinggi nilai demokrasi demi mewujudkan pemilu damai, jujur, dan adil.

7. Mengimbau DPR dan DPRD agar aktif melakukan fungsi pengawasan dan memastikan pemerintah berjalan sesuai konstitusi dan hukum serta tidak mencederai demokrasi yang mengabaikan kepentingan masa depan bangsa.
8. Mendesak pejabat yang terlibat dalam tim sukses calon pemenang agar cuti dan tidak memakai fasilitas negara sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
9. Mendesak seluruh institusi pemerintahan baik pusat maupun daerah untuk menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan berpendapat seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi, intimidasi, dan represif.

Presiden Mahasiswa BEM UMM berharap pemilu dapat berjalan dengan damai “....Kami akan terus menjaga pemilu, sehingga pemilu tetap berjalan sesuai dengan kaidah dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang ada,” pungkasnya. Sementara itu, Ketua BEM FISIP UMM yakni M. Gery Gianolla mengatakan pihaknya mengajak seluruh Indonesia untuk menjaga Pemilu 2024 agar berjalan dengan aman dan damai, “Melihat kondisi saat ini kami menyikapinya dengan damai dan mengedukasi masyarakat, kami harap Pemilu 2024 berjalan damai dan aman,” ujarnya.

Sumber: <https://bemu.umm.ac.id/id/berita/mahasiswa-umm-bersuara-pernyataan-sikap-untuk-pemilu-2024.html>, diakses pada 19 Maret 2024.

**Rilis Mahasiswa DPP Fisipol UGM Lintas Angkatan:
“Surat untuk Menyampaikan Rasa Cinta Sekaligus Kecewa”**

Tanggal rilis: Minggu, 11 Februari 2024

Kepada:

**Pak Pratikno dan Mas Ari Dwipayana
Guru-guru kami di Dept. Politik dan Pemerintahan
(DPP)FISIPOL UGM**

Izinkan kami menulis surat ini untuk menyampaikan rasa cinta sekaligus kecewa.

Rasanya baru kemarin kami mendengarkan ceramah Pak Tik dan Mas Ari di kelas mengenai demokrasi. Kami diyakinkan bahwa demokrasi merupakan sebuah berkah yang harus kita jaga selalu keberlangsungannya. Bagaimana tidak? Indonesia telah bertransformasi dari salah satu simbol otoritarianisme terbesar di dunia menjadi salah satu negara demokrasi paling dinamis di Asia. Transisi ini ditandai oleh beberapa hal, mulai dari penarikan angkatan bersenjata dari politik, liberalisasi sistem kepartaian, pemilu yang jujur, kebebasan berbicara, kebebasan pers, serta hal-hal lainnya. Semua ini tidaklah mudah dilakukan di negara dengan masyarakat majemuk, yang pada saat itu sedang berjuang untuk pulih dari dampak krisis keuangan. Karena itu, semuanya sangat patut kita syukuri.

Namun, sayangnya, lebih dari 20 tahun sejak datangnya berkah tersebut, demokrasi Indonesia justru mengalami kemunduran. Melihat situasi politik Indonesia saat ini, rasanya kami semakin resah, sama seperti Mas Ari yang khawatir dengan harga tinggi demokrasi atau seperti Pak Tik yang resah dengan otoritarianisme Orde Baru seperti disampaikan dalam beberapa tulisan di masa lalu.

Tahukah Pak Tik dan Mas Ari, kenapa kami resah? Sejak 2019 kami telah turun ke jalan untuk memprotes banyak hal yang kami rasakan mengancam demokrasi. Ada revisi

UU KPK, terbitnya UU Ciptakerja, revisi UU ITE, dan lainnya. Justru di hari ini, di tengah perhelatan Pemilu 2024, kita menyaksikan demokrasi sedang menuju ambang kematiannya. Rakyat disuguhi serangkaian tindakan pengangkangan etik dan penghancuran pagar-pagar demokrasi yang dilakukan oleh kekuasaan. Para penguasa dengan tidak malu menunjukkan praktik-praktik korup demi langgengnya kekuasaan. Konstitusi dibajak untuk melegalkan kepentingan pribadi dan golongannya. Melihat ini semua, rasanya demokrasi Indonesia bukan hanya sekedar mundur ataupun cacat, tetapi sedang sekarat.

Kita melihat bersama, bahwa kekuasaan telah merusak pagar yang menjaga agar demokrasi tetap hidup dan terus dapat dirayakan. Jika pada akhirnya demokrasi kita, demokrasi milik rakyat Indonesia ini, mati, maka sejarah akan mengingat siapa saja pembunuhnya. Untuk itu, menjadi keharusan bagi seluruh pihak untuk menyadarkan kekuasaan atas perbuatannya.

Tolong bantu kami mengingat, bukankah peran Pak Tik dan Mas Ari ambil dalam pusaran kekuasaan adalah suatu bentuk upaya untuk menjawab tantangan tersebut? Izinkan kami kaitkan hal itu dengan pelajaran yang pernah kami dapat di DPP.

Antonio Gramsci, pemikir yang sangat sering dikutip Mas Ari, membedakan kaum intelektual menjadi dua jenis: intelektual tradisional dan intelektual organik. *Intelektual tradisional* adalah sekelompok intelektual yang membantu melegitimasi kekuasaan kelas penguasa. Para intelektual tradisional ini menjadi alat para penguasa dalam mengokohkan konsolidasi mereka atas kekuasaan, dan dalam konteks saat ini, intelektual hanya menjadi instrumen “penjustifikasi” bagi penguasa dalam melegitimasi kebijakan yang cenderung mendorong kemunduran demokrasi. *Intelektual organik* didefinisikan Gramsci sebagai intelektual yang kritis pada kekuasaan, berpikir bebas, dan berlandaskan nilai kemanusiaan. Intelektual organik memang bisa menjadi ancaman utama terhadap ambisi-ambisi licik kelas penguasa. Mereka mampu menyadari

segala niat busuk penguasa yang berlandung dibalik diksi “stabilitas”, yang sejatinya bermakna stabilitas bagi upaya konsolidasi kekuasaan yang semena-mena.

Di luar klasifikasi biner ala Gramsci, terdapat satu jalur alternatif bagi para intelektual yang oleh guru kami yang lain, koleganya Pak Tik dan gurunya Mas Ari, yakni Mas Cornelis Lay (Conny), disebut sebagai “intelektual jalan ketiga”. Jalur alternatif ini adalah jawaban dari peran yang dilematis bagi para intelektual untuk menjadi bagian dari kekuasaan, atau menjauhinya atas dasar nilai kemanusiaan. Mereka adalah intelektual yang mampu dengan leluasa keluar masuk kekuasaan, tanpa perlu mengorbankan karakter akademisnya yang bebas, kritis, dan bijak. Untuk bisa leluasa dengan aksesibilitas “keluar masuk” kekuasaan, Mas Conny menekankan “penilaian yang matang dan menyeluruh” dengan berlandaskan pada integritas keilmuan dan kredibilitas bagi kaum intelektual. Poin utamanya adalah bagaimana para intelektual bisa bersahabat dengan kekuasaan tetapi tetap membawa nilai dasar intelektual, demi kepentingan pembebasan manusia dan pemuliaan kemanusiaan.

Pemerintahan saat ini jelas berada dalam upaya melanggengkan kekuasaan, terbilang tidak anti-intelektual dan malah mendegradasi intelektualisme, tetapi justru disokong oleh banyak intelektual sebagai instrumen “stempel” dan pihak justifikasi kebijakan penguasa. Lalu, berada di jalan mana para intelektual yang saat ini menjadi bagian dari kekuasaan berada?

Dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar, Mas Conny berkata:

“Dosa terbesar kaum intelektual tidak diperhitungkan berdasarkan jumlah kesalahan yang dibuat, tetapi oleh kebohongan dan ketakutan dalam mengungkapkan kebenaran yang diketahuinya”

Jalur intelektual jalan ketiga ini bagi kami adalah jalur yang ideal bagi para akademisi yang memutuskan untuk

mengambil peran dalam kekuasaan tanpa mengkhianati nilai-nilai prinsipil yang dipegang. Jalur itulah yang seharusnya diyakini dengan teguh oleh setiap akademisi, saat mereka memberanikan diri naik ke panggung kekuasaan.

“Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan”, begitulah kata Pramodya Ananta Toer. Sebagai pembelajar ilmu politik sekaligus murid-muridnya Pak Tik dan Mas Ari, kami menyadari bahwa segala permasalahan terkait kemerosotan demokrasi adalah permasalahan sistemik yang disebabkan oleh banyak aktor. Ini bukan kesalahan Pak Tik dan Mas Ari semata. Namun, biar bagaimanapun kami menyadari, dua guru kami telah menjadi bagian dari persoalan bangsa. Untuk itu, izinkan kami mewakili Pak Tik dan Mas Ari menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas hal itu.

Kami masih ingat betul suara Pak Tik dan Mas Ari, ketika menyebut kata ‘demokrasi’ di ruang-ruang kelas. Gema suara itulah, Pak Tik dan Mas Ari, yang membangunkan kami dari kematian kepedulian terhadap bangsa dan negara ini. Kami menjaga gema itu di sini, memastikan semuanya mendengar dan mengamini.

Kami menyaksikan, betapa manifestasi gema itu sungguh terjal. Tapi jeritan dan tangisan nestapa yang tak pernah usai dari siapa-siapa yang sukar merasakan keadilan terus melucuti batin. Bagi kami, Pak Tik dan Mas Ari adalah guru, rekan, sahabat, kerabat, dan bapak. Hari ini kami berseru bersama: kembalilah pulang. Kembalilah kebersamai yang tertinggal, yang tertindas, yang tersingkirkan. Kembalilah ke demokrasi; dan kembalilah mengajarkannya kepada kami, dengan kata dan perbuatan.

Yogyakarta, 11 Februari 2024

Mahasiswa DPP FISIPOL UGM lintas angkatan

Rilis Universitas Airlangga: “Rektor Unair Serukan Demokrasi Bermartabat dan Pemilu Berkualitas”

Tanggal rilis: Kamis, 8 Februari 2024



UNIVERSITAS AIRLANGGA
PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043 Fax (031) 591551
Laman : <https://www.unair.ac.id>, e-mail : adm@pkip.unair.ac.id

SIARAN PERS

Nomor: 061/UN3.23/MB/HM.01.03/2024

REKTOR UNAIR SERUKAN DEMOKRASI BERMARTABAT DAN PEMILU BERKUALITAS

Surabaya, 8 Februari 2024 - Menghadapi dinamika menuju Pemilu 2024, Rektor Universitas Airlangga (UNAIR), Prof Dr Mohammad Nasih SE MT Ak, mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga demokrasi bermartabat dan menyelenggarakan pemilu yang berkualitas. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang diselenggarakan pada Selasa (07/02/2024) di Gedung Kantor Manajemen, Kampus MERR-C.

Serukan Demokrasi Bermartabat

Dalam sepuluh pesan yang disampaikan, UNAIR menegaskan pentingnya menjunjung tinggi adab, moralitas, etika, tata krama, dan sopan santun dalam berpolitik. Prof Nasih menyoroti para elite politik, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menjadi contoh yang baik dalam mewujudkan demokrasi yang bermartabat. Pihaknya juga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segala kepentingan pribadi, suku, golongan, maupun partai.

“Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan demokrasi yang bermartabat di Indonesia, dengan pemilu yang berkualitas, jujur, adil, bebas, rahasia, aman, dan damai. Hal ini adalah tanggung jawab bersama

demi persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.

Pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terutama terkait pemilihan umum juga menjadi fokus UNAIR. Secara tegas, UNAIR menolak politik uang dan upaya merusak persatuan melalui politik pecah belah. UNAIR juga mengimbau agar penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya secara profesional, adil, dan transparan, menjadi pijakan utama dalam pesan tersebut.

Terkait keamanan, Prof Nasih menekankan netralitas aparat penegak hukum. Termasuk Polri dan TNI serta penjaminan keamanan bagi seluruh warga negara yang hendak menggunakan hak pilihnya. Pesan khusus diberikan kepada elemen masyarakat, seperti profesor, guru besar, ulama, kiai, cendekiawan, intelektual, akademisi, dosen, dan mahasiswa, untuk aktif mengedukasi masyarakat tentang pemilu.

Tugaskan Mahasiswa

“Mahasiswa UNAIR akan turun langsung mengawasi TPS, menjaga integritas pemilihan. Kami juga memberikan ruang bagi penelitian dan riset yang relevan dengan dinamika pemilu untuk mendukung proses demokrasi yang sehat,” jelasnya.

Dalam penutupan konferensi pers, Prof Nasih menegaskan bahwa pandangan atau aksi yang muncul selama ini bukanlah representasi resmi universitas, melainkan pandangan pribadi. Dengan demikian, UNAIR memberikan suara tegas dalam mendukung demokrasi yang bermartabat dan pemilu berkualitas, menegaskan komitmennya terhadap proses demokrasi yang adil dan transparan di Indonesia.

“UNAIR mendukung demokrasi yang bermartabat dan pemilu berkualitas, menegaskan komitmen kami terhadap proses demokrasi yang adil dan transparan di Indonesia,” pungkasnya.

Sumber: <https://unair.ac.id/rilis-rektor-unair-serukan-demokrasi-bermartabat-dan-pemilu-berkualitas/>, diakses 22 Maret 2024.

**Rilis Universitas Ahmad Dahlan: “Seruan Moral
Menyelamatkan Demokrasi Indonesia”**

Tanggal rilis: Senin, 5 Februari 2024

**CIVITAS ACADEMICA
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
SERUAN MORAL MENYELAMATKAN DEMOKRASI
INDONESIA**

Hari-hari ini terus terjadi begitu banyak pengingkaran akhlak, etika dan sikap kenegarawanan yang sangat berpotensi merusak prinsip-prinsip demokrasi yang susah payah telah kita perjuangkan sejak era Reformasi. Kondisi ini menggugah kami para akademisi untuk ikut turun tangan. Kami tidak rela jika usaha berpuluh-puluh tahun institusi pendidikan dalam menjaga marwah dan peradaban bangsa, terdegradasi oleh sikap dan ambisi segelintir elite politik yang tidak elok dipertontonkan kepada rakyat Indonesia. Kami tegaskan bahwa pernyataan yang kami sampaikan ini adalah murni seruan moral *Civitas Academica* Universitas Ahmad Dahlan, demi menjaga kehidupan demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan niat tulus dan dilandasi oleh teladan K.H. Ahmad Dahlan, bahwa tugas pendidik dan perguruan tinggi adalah mengajarkan dan menjaga akhlak serta etika kemanusiaan, maka kami *Civitas Academica* Universitas Ahmad Dahlan menyampaikan seruan moral untuk penyelamatan demokrasi Indonesia yang kami tujukan kepada:

1. Seluruh penyelenggara negara baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk Presiden, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar menjaga etika pemerintahan, etika jabatan dan etika pejabat.
2. Presiden dan seluruh penyelenggara negara

agar menjaga dan menegakkan netralitas, tidak menggunakan fasilitas negara serta tidak mempolitisasi segala bentuk bantuan pemerintah yang dikaitkan dengan kontestasi Pemilu tahun 2024.

3. Pimpinan dan seluruh aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar tetap konsisten menjadi pelindung dan pengayom rakyat dengan berpegang teguh pada Sapta Marta TNI, dan Tribrata serta Catur Prasetya Polri.
4. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu serta seluruh elemen pengawas pemilu agar bersikap adil dan tegas dalam menindak segala bentuk pelanggaran dan kecurangan pemilu. Bawaslu harus bekerja lebih keras, lebih independen dan lebih berani untuk menjaga kualitas pemilu yang sejalan dengan amanah konstitusi dan Undang-Undang Pemilu.
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan seluruh jajaran penyelenggara pemilu agar memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan tertib, jujur, adil dan bermartabat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai wakil rakyat hendaknya segera menyesuaikan diri dan bersikap sejalan dengan hati nurani masyarakat Indonesia terkini.

Demikian seruan moral penyelamatan demokrasi *Civitas Academica* Universitas Ahmad Dahlan kami sampaikan. Hal ini semata-mata demi persatuan dan kesatuan bangsa, serta memberikan *legacy* yang baik bagi rakyat Indonesia terutama generasi penerus bangsa. Rasanya, belum terlambat untuk memperbaiki keadaan sehingga demokrasi di Indonesia bisa diselamatkan. Tak terbayang akan begitu sulitnya bangsa ini untuk kembali dalam kehidupan demokrasi yang normal, jika “pembusukan” demokrasi tidak segera diakhiri.

Yogyakarta, 5 Februari 2024

Civitas Academica Universitas Ahmad Dahlan

Rilis *Civitas Academica* Universitas Andalas: “Manifesto untuk Penyelamatan Bangsa”

Tanggal rilis: Jumat, 2 Februari 2024



MANIFESTO UNTUK PENYELAMATAN BANGSA

Dengan penuh kesadaran terhadap lintasan sejarah bangsa ini, kami, *civitas academica* yang tumbuh dan lahir di ranah pendiri republik ini, bersatu dalam tekad bulat untuk mengembalikan peran mulia perguruan tinggi sebagai penjaga nilai-nilai dan benteng moral kebaikan serta keadilan di negeri ini.

Kami menyaksikan dengan keprihatinan bagaimana peran perguruan tinggi, sebagai pilar utama pembangunan intelektual dan moral, perlahan menyusut bahkan hampir menghilang selama satu dekade terakhir. Penyimpangan kekuasaan yang merajalela di seluruh lini kehidupan masyarakat, termasuk di perguruan tinggi, telah menggoyahkan fondasi nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi.

Di tengah-tengah gejolak politik saat ini, upaya merusak demokrasi dan kekerasan budaya terlihat nyata. Bau busuk kelahiran “oligarki baru” melalui politik dinasti semakin kuat tercium. Intervensi penguasa terhadap Mahkamah Konstitusi, ketidaknetralan penyelenggara pemilu, dan tidak independennya pejabat publik dari tingkat kementerian hingga kepala desa menjadi pemandangan ironis dalam tatanan demokrasi.

Perlindungan dan jaminan sosial, hak konstitusional warga negara, termanipulasi menjadi “alat” untuk memperkuat dukungan pada calon presiden dan wakil presiden tertentu. Presiden, yang seharusnya menjadi pemimpin yang etis, terlihat melanggar peraturan perundang-undangan tanpa rasa bersalah. Kami menegaskan bahwa Indonesia bukanlah kerajaan, dan presiden bukanlah seorang raja yang bisa mewarisi kekuasaan kepada putra mahkota. Etika kenegarawanan dan ketidakberpihakan harus menjadi prinsip utama yang dijunjung tinggi.

Sengkarut di berbagai lini yang terjadi di Indonesia pada saat ini, disebabkan “air keruh dari hulu”, karena ada gajah besar yang menyeberang, yang mengakibatkan air keruh sampai ke muara. Artinya, semua sengkarut yang terjadi ini karena ulah dan perilaku elite, yang mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, seumpama kusut sarang burung tempua, maka solusinya adalah dibakar dengan api. Perilaku penguasa yang cenderung “ber-sultan” di mata, “ber-raja” di hati, harus dihentikan dengan segera, karena “Raja alim Raja Disembah, Raja zalim raja disanggah”. Cukup sudah Indonesia berada di situasi demokrasi yang centang-perenang ini.

Saat ini adalah momentum bagi seluruh lapisan masyarakat untuk bangkit melakukan koreksi serta perlawanan terhadap pelemahan demokrasi secara terstruktur. Perguruan tinggi, sebagai institusi yang menjaga etika dan nilai-nilai kebaikan, harus tampil sebagai garda terdepan dalam melawan segala bentuk pelemahan terhadap demokrasi, penguatan oligarki, dan sikap politik keliru yang sedang dipertontonkan oleh presiden.

Kami, *civitas academica*, bersumpah untuk tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi juga pelaku perubahan. Melalui pemikiran kritis, tindakan nyata, dan solidaritas yang kokoh, kami berkomitmen untuk mendukung dan menjalankan peran mulia perguruan tinggi sebagai penjaga nilai-nilai, benteng moral kebaikan, dan pelindung demokrasi di negeri ini. Maka, kami atas nama *civitas*

academica Universitas Andalas, menyatakan:

1. Menolak segala bentuk praktek politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi.
2. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadinya segala bentuk praktik kecurangan pemilu.
3. Menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegakkan aturan netralitas dalam pemilu, serta menjalankan tugas sesuai amanah reformasi konstitusi.
4. Mendesak Pemerintah untuk mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen tanpa intervensi dan politisasi elite.
5. Mengajak masyarakat bersikap kritis dan menolak politisasi bantuan sosial untuk kepentingan politik *status quo*/kelompok tertentu dalam politik elektoral, kekerasan budaya, pengekangan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpendapat serta penyusutan ruang sipil.

Demikian manifesto ini dibuat dan disampaikan, sebagai wujud tanggung jawab moral institusi perguruan tinggi terhadap keselamatan serta kejayaan bangsa.

Padang, 2 Februari 2024

Aliansi Civitas Academica Universitas Andalas

Rilis Civitas Akademika Universitas Brawijaya: “Penegakan Hukum dan Etika Demokrasi di Indonesia”

Tanggal rilis: Selasa, 6 Februari 2024

PERNYATAAN SIKAP CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS BRAWIJAYA TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN ETIKA DEMOKRASI DI INDONESIA

Anggota dewan profesor dan perwakilan *civitas academica* Universitas Brawijaya memberikan pernyataan sikap tentang penegakan hukum dan etika demokrasi di Indonesia, bertempat di depan gedung rektorat Universitas Brawijaya pada Selasa (6/2/2024).

Sekretaris Dewan Profesor UB, Prof. Ir. Sukir Maryanto, S.Si., M.Si., Ph.D, sebagai pembaca pernyataan sikap menyampaikan bahwa para *civitas academica* yang ikut dalam pernyataan sikap ini terdiri dari dewan guru besar, dosen, hingga mahasiswa Universitas Brawijaya.

Dalam pernyataan sikap Prof. Sukir menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara yang berdasarkan Demokrasi Pancasila. Negara hukum sebagaimana yang dimaksud oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara yang memberikan perlindungan hak bagi yang benar dan memberikan hukuman bagi yang melawan hukum. Penegakan hukum yang lemah, menandakan lemahnya etika, tata kelola dan kepemimpinan. Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menempatkan sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat atau dengan persetujuan rakyat.

“Melihat dinamika kondisi politik menjelang Pemilu tahun 2024 yang semakin panas dan mengarah pada ancaman keharmonisan bangsa, serta mencermati praktik penegakan hukum yang ada saat ini maka pada Selasa tanggal 6 Februari 2024 ini menurutnya adalah merupakan momentum yang tepat untuk melakukan koreksi total

dalam rangka kembali mewujudkan semangat reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, menegakkan etika berpolitik dan demokrasi serta meneguhkan moralitas yang mendasari demokrasi berkeadilan” lanjut Prof. Sukir.

Dia mengatakan, kampus sebagai sumber mata air kebenaran mengimbuu agar demokrasi dan nilai luhur Pancasila tetap menjadi landasan politik berbangsa dan negara, Universitas Brawijaya sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen menjunjung nilai perjuangan, persatuan dan etika luhur, meminta semua pihak untuk menjaga pesta demokrasi yang berkeadilan, berbudaya dan menjunjung nilai Brawijaya dan Pancasila.

Pernyataan Sikap *Civitas Academica* Universitas Brawijaya tentang Penegakan Hukum dan Etika Demokrasi di Indonesia:

Pertama: Mengimbuu pemerintah dan aparat penegak hukum agar menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak tebang pilih, tidak mencederai demokrasi dan kebebasan berpendapat, dan bebas dari kepentingan politik praktis.

Kedua: Mengimbuu pemerintah, DPR, MK, dan aparat penegak hukum untuk tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik sehingga hukum alpa dari nilai-nilai moral dan etika.

Ketiga: Mengimbuu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten, dan Desa agar tetap menjaga etika berdemokrasi, netralitas dan menjaga suasana agar Pemilu tahun 2024 berjalan luber dan jurdil. Kepemimpinan nasional harus mampu menjadi teladan untuk menjunjung nilai-nilai hukum dan demokrasi, agar masyarakat memiliki panutan dalam menghadapi hiruk pikuk yang seharusnya menjadi pesta rakyat yang menyenangkan dan membahagiakan.

Keempat: Mengimbuu TNI, POLRI, dan ASN agar bersikap netral dan menjaga agar pemilu berjalan damai dan aman.

Kelima: Mengimbau para penyelenggara pemilu, KPU, dan BAWASLU, agar berkomitmen kuat melaksanakan pemilu yang bermartabat, luber, dan jujur.

Keenam: Mengimbau calon presiden, calon wakil presiden, dan calon anggota legislatif untuk melaksanakan etika berpolitik, mengedepankan visi dan program, tidak menggunakan fasilitas negara, dan tidak melakukan *money politics*.

Ketujuh: Mengimbau para pimpinan partai politik untuk mengembalikan citra dan kemurnian demokrasi pada rohnya. Kedaulatan ada pada rakyat dan tidak boleh ada campur tangan kekuasaan; dan

Kedelapan: Mengimbau tokoh masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia agar menjaga ketentraman, ketertiban selama penyelenggaraan pemilu demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Sumber: <https://prasetya.ub.ac.id/ub-beri-pernyataan-sikap-terkait-penegakan-hukum-dan-etika-demokrasi-indonesia/>, diakses 19 Maret 2024.

Rilis Civitas Akademika Universitas Bung Karno: “Mencegah Kemunduran Demokrasi”

Tanggal rilis: Senin, 5 Februari 2024

PETISI CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS BUNG KARNO “MENCEGAH KEMUNDURAN DEMOKRASI”

Demokrasi Pemilu 2024 hendaknya tidak berjalan dengan demokrasi liberal yang akan merusak tatanan berbangsa dan bernegara, serta menggerus nilai-nilai nasionalisme dan sosio demokrasi atau demokrasi masyarakat, yaitu demokrasi politik dan ekonomi rakyat. Sosio demokrasi mengabdikan kepada masyarakat bukan kepentingan kelompok dan golongan.

Realitas demokrasi di Indonesia saat ini tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai kesetaraan, nilai kerakyatan dan menuju pada kebebasan liberal. Kini Indonesia berjalan demokrasi liberal kapitalistik dan melahirkan penindasan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kedaulatan rakyat tergadaikan, serta demokrasi yang tidak berujung pada keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan.

Sebagai kampus penyambung lidah rakyat, sivitas akademika Universitas Bung Karno mengajak sivitas akademika perguruan tinggi di seluruh tanah air, untuk segera merapatkan barisan guna mengawal pelaksanaan Pemilu tahun 2024 yang adil, jujur dan bermartabat, dengan ini menyatakan:

1. Pemerintah dalam pelaksanaan Pemilu 2024 harus berjalan demokratis dan tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.
2. Pemerintah, seluruh aparatur negara termasuk Badan Intelijen Negara, aparat hukum (TNI/POLRI), dan birokrasi harus bersikap netral, jujur, adil, bagi semua kelompok dan golongan.
3. Pemerintah tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan dan memanfaatkan sumberdaya negara untuk

kepentingan politik praktis.

4. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah harus aktif melakukan fungsi pengawasan dalam proses demokrasi.
5. KPU, Bawaslu, DKPP serta organ yang berada di bawahnya harus bersikap independen demi terlaksananya Pemilu 2024 yang jujur dan adil.
6. Menolak praktik politik uang dan sejenisnya dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi Pemilu 2024 dan mengedepankan politik gagasan dan edukasi politik yang mencerdaskan rakyat. Lembaga peradilan (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi) harus bersikap independen, adil dalam menangani sengketa dan pelanggaran dalam proses Pemilu 2024.
7. Mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat secara partisipatif dalam memastikan pemilihan umum berjalan secara jujur, adil, dan aman serta bermartabat demi terwujudnya pemerintahan yang *legitimate*.

Kita harus menciptakan sosio demokrasi, demokrasi rakyat yaitu adanya persamaan kodrat, harkat, dan martabat manusia, serta mengakui adanya persamaan derajat manusia. Sebagai arah untuk pengembangan demokrasi, maka demokrasi konsep Indonesia mestinya bukan bercermin pada demokrasi liberal, namun sebuah demokrasi yang berdasarkan religius, demokrasi berkeadaban, mengutamakan kepentingan rakyat dan memihak pada rakyat, dan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur

Demikian Petisi sivitas Universitas Bung Karno sebagai wujud tanggung jawab moral terhadap masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia.

Senat Rektor

Sumber: <https://kabardpr.com/rektor-dekan-dan-civitas-akademika-sampai-alumni-universitas-bung-karno-serukan-petisi-kemunduran-demokrasi/>, diakses 1 April 2024.

Rilis Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada - I: “Petisi Bulaksumur”

Tanggal rilis: Rabu, 31 Januari 2024

PETISI BULAKSUMUR

Dengan Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa

Kami sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri Universitas Gadjah Mada, menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara diberbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik, serta netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi.

Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah (*legitimate*) demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang dalam

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. “Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupuhi dharma bhakti tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara”.

Alih-alih mengamalkan dharma bhakti almamaternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya. Tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila.

Karena itu, melalui petisi ini kami segenap sivitas akademika UGM, meminta, mendesak dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden termasuk Presiden sendiri untuk segera kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial.

Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejala politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat.

“Gadjah Mada adalah sumbermu. Gadjah Mada adalah mata airmu. Gadjah Mada adalah sumber airmu. Tinggalkanlah kelak Gadjah Mada ini bukan untuk mati tergenang dalam rawanya ketiadaan amalan atau rawanya kemuktian diri sendiri, tetapi mengalirilah ke laut, tujulah ke laut, lautnya pengabdian kepada negara dan tanah air yang berirama, bergelombang, bergelora”. Ir. Soekarno

Bulaksumur, 31 Januari 2024

Sumber: <https://tirto.id/isi-lengkap-petisi-bulaksumur-ugm-untuk-jokowi-gU99>, diakses 22 Maret 2024.

Rilis Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada - II:
“Kampus Menggugat: Tegakan Etika dan Konstitusi,
Perkuat Demokrasi”

Tanggal rilis: Selasa, 12 Maret 2024

**KAMPUS MENGGUGAT: TEGAKKAN ETIKA DAN
KONSTITUSI, PERKUAT DEMOKRASI**

Sivitas akademika UGM melalui gerakan Kampus Menggugat, mengundang para sivitas akademika dan alumni di tiap universitas dan elemen masyarakat sipil untuk mengembalikan etika dan konstitusi yang terkoyak selama lima tahun terakhir. Universitas adalah benteng etika dan akademisi adalah insan ilmu pengetahuan yang bertanggungjawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga keadaban (*civility*), dan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Inilah momentum kita sebagai warga negara melakukan refleksi dan evaluasi terhadap memburuknya kualitas kelembagaan di Indonesia dan dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Reformasi 1998 adalah gerakan rakyat untuk mengembalikan amanah konstitusi, setelah terkoyak oleh Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di masa Orde Baru. Namun, pendulum reformasi berbalik arah sejak 17 Oktober 2019 yang ditandai revisi UU KPK dan diikuti pengesahan beberapa UU lain yang dipandang kontroversial (UU Minerba, UU Cipta Kerja, dll). Pelanggaran etika dan konstitusi meningkat drastis menjelang Pemilu 2024 dan memperburuk kualitas kelembagaan formal maupun informal. Kemunduran kualitas kelembagaan ini menciptakan kendala pembangunan bagi siapapun presiden Indonesia 2024-2029 dan selanjutnya. Konsekuensinya, kita semakin sulit untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045, yang membayangkan justru adalah Indonesia Cemas.

Konstitusi memberikan amanah eksplisit kepada

kita, warga negara Indonesia, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun peradaban, menjaga keberlanjutan pembangunan, menjaga lingkungan hidup, dan menegakkan demokrasi. Akademisi menjalankan tugas konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun peradaban melalui tridharma perguruan tinggi. Tugas ini hanya dapat dilakukan ketika etika dan kebebasan mimbar ditegakkan.

Kualitas kelembagaan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Negara-negara yang merdeka dan kemudian berkembang menjadi negara maju adalah negara yang dengan sadar melakukan reformasi untuk memperbaiki kualitas kelembagaannya. Pelanggaran etika bernegara oleh para elite politik, akan mudah dicontoh oleh berbagai elemen masyarakat. Hal ini mengancam kelangsungan berbangsa dan bernegara, dan menjauhkan Indonesia sebagai negara hukum.

Kami, sivitas akademika UGM, melalui gerakan moral Kampus Menggugat, menyerukan agar:

1. Universitas sebagai benteng etika menjadi lembaga ilmiah indenpenden yang memiliki kebebasan akademik penuh untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menyuarakan kebenaran berbasis fakta, nalar dan penelitian ilmiah.
2. Segenap elemen masyarakat sipil terus kritis terhadap jalannya pemerintahan dan tak henti memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Ormas sosial keagamaan, pers, NGO, CSO, tidak terkooptasi, apalagi menjadi kepanjangan tangan pemerintah.
3. Para pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif:
 - a. Memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi secara substansial dan menjunjung tinggi amanah konstitusi dalam menjalankan kekuasaan demi mewujudkan cita- cita proklamasi dan janji

reformasi. Politik dinasti tak boleh diberi ruang dalam sistem demokrasi.

- b. Menegakkan supremasi hukum dan memberantas segala macam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) tanpa mentolerir pelanggaran hukum, etika dan moral dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. Secara serius mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial bagi semua warga dan tak membiarkan negara dibajak oleh para oligark dan para politisi oportunis yang terus mengeruk keuntungan melalui kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat pada umumnya.

Sebagai akademisi yang memahami hak dan tanggungjawab konstitusional, kami mengetuk nurani segenap elemen masyarakat untuk bersinergi membangun kembali etika dan norma yang terkoyak dan mengembalikan marwah konstitusi yang dilanggar. Apa yang kita perjuangkan saat ini akan menentukan Indonesia yang akan kita wariskan kepada generasi anak-cucu. **Hidup Demokrasi, Panjang Umur Republik!!**

Yogyakarta, 12 Maret 2024

Akademisi Universitas Gadjah Mada

Rilis Guru Besar Universitas Indonesia: “Seruan Kebangsaan Kampus Perjuangan ‘Genderang Universitas Indonesia Bertalu Kembali”

Tanggal rilis: Jumat, 2 Februari 2024

**SERUAN KEBANGSAAN KAMPUS PERJUANGAN
“GENDERANG UNIVERSITAS INDONESIA BERTALU
KEMBALI”**

Kampus kami adalah kampus perjuangan yang telah melahirkan para petarung yang berdiri paling depan dalam menghadapi berbagai peristiwa berat bangsa ini. Para pendahulu kami, bahkan telah menumpahkan darahnya, sebut saja Arief Rahman di tahun 1965 dan Yap Yun Hap di tahun 1998. Tak terbilang pula, mereka yang dipenjara tanpa pengadilan pada tahun 1974 dan tahun 1978 karena menolak penguasa yang otoritarian.

Sungguhpun nampak diam, seakan kami tenggelam dalam kerja-kerja akademik di ruang kelas, di ruang seminar, laboratorium, dalam tumpukan buku, atau menulis gagasan di ujung pena, kami tetap mewaspadaai hidupnya demokrasi dan mewaspadaai pula kedaulatan agar tetap di tangan rakyat. Lima tahun terakhir, utamanya menjelang Pemilu 2024 ini, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa, dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejahteraan bangsa.

Berbagai hak yang berkaitan dengan kelayakan hidup, keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik yang berbasis data, kewarasan akal budi, dan kendali nafsu keserakahan telah menyebabkan punahnya sumber daya alam, hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati, dan hampir semua kekayaan bangsa kita. Mereka lupa bahwa di dalam hutan, di pinggir sungai, danau, dan pantai, ada orang, ada manusia, ada flora dan fauna, dan keberlangsungan

kebudayaan masyarakat adat, bangsa kita, bangsa Indonesia. Kami resah dan sekaligus geram atas sikap tindak para pejabat, elite politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, menumpuk kekuasaan, membiarkan negara tanpa kelola, dan digerus korupsi yang memuncak menjelang pemilu. Kami cemas; kegentingan saat ini akan menghancurkan masa depan bangsa kita dan ke-Indonesia-an kita.

Mr. Soepomo, salah satu perumus konstitusi Undang-Undang Dasar '45, Rektor UI tahun 1951-1954, berpesan agar *Civitas Academica* Universitas Indonesia dengan otonomi atau kebebasan akademik yang melekat harus bisa merebut kembali zaman keemasan Sriwijaya yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kesejahteraan. Maka, berdasarkan ruh kebebasan akademik yang kami punya, kami berdiri di sini, mengajak warga dan alumni Universitas Indonesia dan juga seluruh warga Indonesia untuk segera merapatkan barisan.

Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi.

Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil.

Tiga, menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri, bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon (red: pasangan calon).

Yang keempat, menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing.

Mari kita jaga bersama demokrasi dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan banggakan.

Depok, 2 Februari 2024

Sumber: <https://suaramahasiswa.com/genderang-ui-bertalu-kembali-pernyataan-guru-besar-ui-untuk-melindungi-demokrasi>, diakses 22 Maret 2024.

Rilis Institut Pertanian Bogor: “Himbauan Menyikapi Pemilu 2024”

Tanggal rilis: Jumat, 2 Februari 2024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Kampus IPB Dramaga, Bogor 1
Telepon (0251) 8622642
Faksimile (0251) 8622708
ask@apps.ipb.ac.id | ipb.ac.id

Nomor: 5041/IT3/TU/M/B/2024 2Februari2024
Hal : Himbauan Menyikapi Pemilu 2024

Kepada Yth.:

Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa
di lingkungan IPB University

Menyikapi semakin dinamisnya situasi politik nasional pada proses Pemilihan Umum 2024, saya mengajak warga IPB University yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa untuk bersama-sama memelihara nilai-nilai integritas akademik. Dengan semangat kebersamaan, izinkan saya menyampaikan imbauan sebagai berikut:

Mari kita berkontribusi secara aktif menjaga dan memastikan kampus kita tetap menjadi lingkungan yang kondusif dan nyaman untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi. Dosen dan tenaga kependidikan diharuskan menjunjung tinggi asas netralitas.

Kebebasan berpendapat adalah hak kita semua yang dijamin konstitusi, karena itu, diskusi dan dialog yang konstruktif dalam kerangka kebebasan mimbar akademik harus terus kita jaga. Selanjutnya, penting bagi kita untuk menyampaikan pemikiran dan pendapat dengan penuh tanggung jawab, menghormati perbedaan pandangan

situasi politik, dan menjunjung tinggi etika serta moral akademis.

Dalam setiap diskusi, sangat penting bagi kita untuk menjaga integritas akademik, dengan mengutamakan pendekatan yang berbasis fakta dan data, serta menghargai keragaman pandangan dengan sikap yang santun.

Saya mengajak warga IPB untuk berpikir kritis dalam menerima berbagai informasi yang beredar dan menghindari penyebaran informasi yang tidak benar.

Mari kita perkuat tali silaturahmi dan persaudaraan di antara kita, dengan sikap saling menghormati dan menerima perbedaan, termasuk dalam hal pilihan politik. Warga IPB diharapkan berperan serta dalam menghindari polarisasi di masyarakat yang mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan memelihara integritas akademik dan nilai-nilai kebangsaan yang luhur, kita semua diharapkan berkontribusi secara positif terhadap pembangunan bangsa dan negara, terutama di bidang Agromaritim. Mari kita tunjukkan bahwa IPB adalah lembaga pendidikan yang selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa.

Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab sebagai bagian dari insan akademis yang berintegritas dan profesional.

Rektor

Arif Satria

Rilis Keluarga Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Peduli Negeri: “Menjaga Integritas Berbangsa dan Merawat Demokrasi”

Tanggal rilis: Senin, 5 Februari 2024

**MENJAGA INTEGRITAS BERBANGSA
DAN MERAWAT DEMOKRASI**

Kami, sebagai Keluarga Besar ITS Peduli Negeri, dengan ini menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi kebangsaan terkini. Kami prihatin dengan kondisi saat ini yang diwarnai berbagai dinamika dan potensi polarisasi.

Sebagai akademisi, kami selalu mengedepankan semangat persatuan bangsa dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Kami meyakini Presiden Republik Indonesia adalah pemimpin negara, sekaligus saudara sebangsa yang mengemban amanah rakyat.

Oleh karena itu, kami memohon Bapak Rektor ITS untuk menyampaikan kepada Bapak Presiden agar tetap konsisten pada koridor demokrasi dan semangat reformasi. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas nasional dan menghindari polarisasi bangsa di masa yang akan datang.

Hal-hal yang kami anggap penting sebagai komitmen dari Bapak Presiden adalah sebagai berikut:

1. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan yang lain.
2. Menjaga netralitas, mencegah aparaturnegara untuk terlibat dalam politik praktis & menjamin pelaksanaan Pemilu 2024 yang damai, adil, dan berintegritas.

Kami percaya bahwa Bapak Presiden memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nasional dan kelancaran proses demokrasi. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan melindungi bangsa dan negara kita.

Pernyataan sikap itu dibacakan oleh Guru Besar Departemen Teknik Mesin ITS Prof Harus Laksana Guntur. Didampingi oleh 44 guru besar lain, puluhan dosen, dan sejumlah mahasiswa dari BEM ITS.

Sumber: <https://harian.disway.id/read/760420/44-guru-besar-its-minta-jokowi-netral-di-pemilu-2024-begini-isi-pernyataannya> diakses 1 April 2024

Rilis Komunitas Guru Besar dan Dosen Institut Teknologi Bandung Peduli Demokrasi Berintegritas: “Mencegah Kemunduran Demokrasi”

Tanggal rilis: Senin, 5 Februari 2024

MENCEGAH KEMUNDURAN DEMOKRASI

Dengan nama Tuhan Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana

Penerapan sistem demokrasi di Indonesia saat ini adalah upaya untuk memenuhi amanat dari Amendemen Keempat UUD 1945 tahun 2002, yakni berlandaskan cita-cita luhur untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya, masyarakat adil dan sejahtera, tegaknya hukum dan norma-norma publik, terjaminnya hak-hak asasi manusia, dan terangkatnya harkat dan martabat bangsa Indonesia. Pemilihan presiden (Pilpres) 2024 sejatinya merupakan wujud dari berfungsinya nilai-nilai demokrasi, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berdasarkan hal-hal tersebut dan diiringi oleh rasa tanggung jawab dan kecintaan kepada negara dan bangsa, serta berdasarkan akal budi dan mata hati yang kritis dan logis, maka Komunitas Guru Besar dan Dosen ITB Peduli Demokrasi Beintegritas menyampaikan pernyataan akademik sebagai berikut:

1. Mendukung pilpres yang jujur, adil, dan damai, serta menjunjung hak asasi setiap pemilih.
2. Mendukung pemimpin sebagai negarawan serta menjadi teladan dalam menegakkan aturan hukum dan etika publik untuk membangun demokrasi yang berkualitas.
3. Mendukung pemimpin dan pihak pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan mewujudkan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, yang menjunjung

tinggi asas-asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

4. Mendukung pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk menjunjung sikap netral dan non-partisan dalam proses demokrasi, yang berada di atas semua kelompok dan golongan.
5. Mendorong para pemimpin bangsa untuk berperan sebagai penengah dalam masyarakat yang terpolarisasi saat ini, dengan mengayomi semua kelompok dan golongan yang berbeda, untuk menghindari keterbelahan masyarakat yang mengancam kesatuan bangsa.
6. Mendorong pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mendahulukan kepentingan negara-bangsa yang lebih besar di atas kepentingan kelompok dalam setiap tindakannya, dengan semangat kebersamaan, kerja sama, dilandasi asas keadilan dan inklusivitas.
7. Mendorong pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat menjalankan sikap adil dan berpihak kepada semua dalam proses demokrasi, dengan memberikan fasilitas dan perlakuan yang sama bagi setiap kontestan pilpres, untuk menjaga pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Mendorong pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mendahulukan pembangunan fondasi kepemimpinan bangsa yang kuat secara terstruktur dan sistematis untuk mempersiapkan pemimpin masa depan, yang memiliki integritas, rasa keadilan, prestasi, serta kinerja tinggi, untuk membawa kepada kemajuan bangsa.
9. Mendorong pemimpin meningkatkan kualitas institusi pendidikan dan sumber dayanya dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan dengan prioritas menggunakan sumber daya dan teknologi dalam negeri.

Semoga pemilu yang segera akan berlangsung menghasilkan pasangan presiden dan wakil presiden, para anggota

dewan (DPR, DPD, DPRD) yang terbaik dalam memenuhi harapan kebanyakan rakyat Indonesia.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi bangsa dan negara Indonesia.

Bandung, 5 Februari 2024

Komunitas Guru Besar dan Dosen ITB Peduli Demokrasi Berintegritas

Rilis Universitas Hasanuddin: “Maklumat Rektor”

Tanggal rilis: Jumat, 2 Februari 2024



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, (6 Saluran), 584200, FAX (0411)
585188

Laman www.unhas.ac.id

MAKLUMAT REKTOR NOMOR: 05426/UN4.1/HK.05/2024

Yth. Bapak/Ibu/Unhas leaders/Guru Besar/Dosen dan segenap sivitas akademika Unhas.

Menyimak kontestasi politik yang semakin panas dengan eskalasi yang semakin mengkhawatirkan, terutama debat dan pertentangan mengenai pilihan calon presiden, maka saya selaku Rektor Unhas menyampaikan secara tegas kepada semua sivitas akademika di lingkungan Universitas Hasanuddin agar:

Harus aktif menjaga situasi dan kondisi termasuk ikut memperbaiki suasana perbincangan agar tidak mengarah ke hal-hal yang provokatif dan intimidatif.

Kebebasan berpendapat kita hargai dan junjung tinggi sebagai amanat konstitusi, tapi pilihan politik yang beragam juga harus dihormati dan dihargai.

Meskipun terdapat perbedaan pilihan dan preferensi calon presiden, saya ingatkan untuk tidak melakukan kampanye hitam terhadap calon presiden yang tidak disukai. Hindari menyebarkan informasi *hoax* dan berita-berita yang belum terverifikasi kebenarannya dan tidak diketahui sumbernya.

Mari kita menjaga atmosfir akademik yang sehat dalam bingkai kebebasan mimbar akademik yang bertanggung jawab.

Mari kita menjaga silaturahmi dan persaudaraan kampus yang kita cintai bersama. Mari kita jaga dan dewasa menerima perbedaan pilihan politik dalam suasana kekeluargaan.

Adanya *flyer* yang mengatasnamakan Guru Besar dan Dosen Unhas untuk mengajak menyampaikan keprihatinan “Menyelamatkan Demokrasi”, tidak mewakili Unhas sebagai institusi.

Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan diberi kekuatan untuk selalu menjadi insan akademis yang bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan NKRI dan mengabdikan untuk bangsa dan negara.

Makassar, 2 Februari 2024

Rektor.

Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.

Rilis Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tanggal rilis: Minggu, 4 Februari 2024

PERNYATAAN SIKAP REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan semakin dekatnya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, saya sebagai Rektor dan pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

Pemilu merupakan salah satu tonggak demokrasi yang berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara, kita bersama-sama bertanggung jawab untuk ikut serta dalam menentukan arah masa depan bangsa melalui hak pilih yang dimiliki. Untuk itu, mari kita kawal pelaksanaan Pemilu 2024 sebagai panggung yang sarat dengan nilai-nilai kebangsaan, solidaritas, dan persatuan.

Dalam menjaga Pemilu 2024 sebagai panggung sarat nilai-nilai kebangsaan, solidaritas, dan persatuan, saya mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk:

1. Menghargai dan menghormati perbedaan pilihan politik setiap individu. Perbedaan pandangan dan pilihan politik merupakan modal dalam memperkaya pemahaman sekaligus memperkuat kesadaran berbangsa-bernegara.
2. Mengutamakan pendidikan politik bagi masyarakat dan meningkatkan partisipasi pemilu dengan menjunjung tinggi harmoni, damai, dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilihnya.
3. Menolak segala bentuk kampanye yang mengandung kebencian dan merendahkan martabat pihak lain sehingga menyulut konflik dan permusuhan.

4. Menghentikan segala upaya penyebaran informasi palsu (hoaks) yang merusak iklim demokrasi dan mengajak masyarakat untuk bersikap kritis dan bijak dalam menyaring informasi sebelum menyebarkannya, serta mengutamakan sumber informasi yang dapat dipercaya.
5. Menjaga keadaban publik dan mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dan memperkuat ikatan persaudaraan dalam membangun Indonesia yang lebih baik.
6. Berkomitmen mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 sebagai proses demokrasi yang mengedepankan sikap *tawassuth, i'tidal, tasamuh, musyawarah, dan ishlah* sehingga pemilu berlangsung damai bagi kemajuan Indonesia.

Demikian pernyataan ini disampaikan. Semoga Pemilu 2024 yang damai, adil, dan bermartabat tercapai serta diridhoi Allah SWT menjadi bangsa dan negara Indonesia *baladatul thayyibatun wa rabbun ghafur*.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ciputat, Ahad 4 Februari 2024

Prof. Asep Saepudin Jahar M.A. Ph.D.

Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Sumber: <https://www.uinjkt.ac.id/id/pemilu-2024pernyataan-sikap-rektor-uin-syarif-hidayatullah-jakarta>, diakses 19 Maret 2024.

Rilis Universitas Islam Indonesia - I: “Kemunduran Demokrasi di Indonesia”

Tanggal rilis: Rabu, 13 Desember 2023



PERNYATAAN SIKAP UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA KEMUNDURAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Perkembangan mutakhir praktik berbangsa dan bernegara telah mempertontonkan secara telanjang kepada publik maraknya penyalahgunaan kekuasaan. Politik kekuasaan yang abai terhadap kepentingan rakyat seakan kembali hadir sebagai panglima. Praktik berpolitik semakin jauh dari nilai-nilai kebajikan dan tidak lagi dibingkai sebagai sarana melayani kepentingan bangsa dan negara.

Kondisi ini telah membawa Indonesia pada kemunduran demokrasi yang diindikasikan oleh banyak aspek, seperti penegakan hukum yang tidak konsisten, pemberantasan korupsi yang tebang pilih, dan kebebasan berekspresi yang semu. Hal ini juga telah menghadirkan perselingkuhan antarpenguasa yang melahirkan oligarki dan menumbuhkan subur fenomena kolusi dan nepotisme. Akhirnya, rakyat hanya menjadi objek pelanggaran kekuasaan yang tidak dihargai martabatnya.

Tergerak dari situasi di atas, Universitas Islam Indonesia menyatakan:

1. Mengutuk berbagai upaya pengangkangan hukum dalam segala bentuk yang mengabaikan kemaslahatan

bangsa dan negara. Hukum wajib dikembalikan menjadi panglima, yang pembentukannya harus kalis dari kepentingan dan penegakannya tidak boleh menguntungkan kelompok atau golongan tertentu.

2. Mendesak negara untuk lebih serius memperjuangkan pemberantasan korupsi dengan membangun sistem pemerintahan yang bersih dan mengefektifkan penegakan hukum, termasuk salah satunya mengembalikan kesaktian Komisi Pemberantasan Korupsi dan membebaskannya dari segala intervensi yang melemahkan.
3. Menuntut negara dan semua aparatnya untuk menjamin kebebasan berpendapat untuk menyampaikan aspirasi untuk mengingatkan penguasa ketika lupa dengan tugasnya atau keluar dari rel konstitusi. Pemerintah jangan sampai menjadi penjaga gerbang informasi yang mengelabui akal sehat publik.
4. Mengajak masyarakat untuk lebih cermat dalam merespons beragam informasi yang diterima, mengedepankan tabayun, tidak gampang diadu domba, dan tidak mudah terkecoh dengan muslihat politik yang mempermainkan emosi publik sehingga melupakan berpikir kritis.

Demikian pernyataan sikap ini disusun sebagai wujud tanggung jawab moral anak bangsa.

Yogyakarta, 13 Desember 2023/29 Jumadilawal 1445

Rektor

Fathul Wahid

Rilis Forum Dosen & Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia - II: “Wajah Hukum dan Demokrasi”

Tanggal rilis: Selasa, 19 Desember 2023

PERS RILIS

**FORUM DOSEN & GURU BESAR
FAKULTAS HUKUM UII**

WAJAH HUKUM DAN DEMOKRASI

Menyikapi situasi wajah penegakan hukum serta demokrasi saat ini, Forum Dosen dan Guru Besar Fakultas Hukum UII menyatakan sebagai berikut:

- **Telah terjadi pembajakan dunia peradilan khususnya Mahkamah Konstitusi:** Kasus yang menimpa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 90/PUU-XXI/2021 dan juga putusan MKMK telah membuktikan adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman dalam mengadili perkara yang melibatkan keluarganya. Telah terjadi pembajakan serius terhadap Mahkamah Konstitusi dan penegakan hukum kita, sehingga ke depan kami mendorong agar hakim konstitusi ke depan bersikap adil, memegang prinsip integritas, dan profesional dalam profesinya. Tidak boleh mengorbankan kepentingan negara demi kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok.
- **Penegakan hukum lingkungan yang masih lemah:** pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah belum sepenuhnya memperhatikan aspek keberlanjutan. Dalam perspektif hukum, kelemahan terletak pada disharmoni peraturan, kelengkapannya, maupun penegakannya. Dikarenakan konsep pembangunan berkelanjutan bersifat subjektif dan multitafsir, di masa mendatang perlu diperhatikan

kemampuan ketahanan hidup bagi warga miskin di Indonesia kaitannya dengan pemanfaatan tanah sebagai tempat tinggal dan usahanya dengan memberi akses yang secara berkelanjutan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan derajat kesejahteraannya.

- **Belum efektifnya kebijakan perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA):** banyaknya kasus yang meminggirkan masyarakat hukum adat dalam proses pembangunan negara merupakan tindakan inkonstitusional. Hal ini karena konstitusi telah menjamin eksistensi masyarakat hukum adat yang tidak hanya sekedar diakui, namun juga dilindungi. Fakta riil menunjukkan bahwa keberadaan MHA sebagai kelompok minoritas selama ini termarginalkan dalam mengakses dan memenuhi bukan saja hak tradisionalnya, melainkan juga hak-haknya dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, hukum dan budaya sehingga diperlukan tindakan afirmasi khusus. Untuk itu, terkait pemenuhan hak MHA diperlukan cara yang sesuai utamanya dalam hal harmonisasi dan sinkronisasi, baik antar hukum adat maupun hukum adat dan hukum nasional.
- **Perlindungan dan penegakan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang belum optimal:** saat ini Sistem HKI di Indonesia masih belum memenuhi HAM, tidak efektif dan *conflict of interest* sehingga upaya mendorong kreatifitas yang meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia sangat terganggu. Faktanya, tata kelola HKI beserta regulasi dan kelembagaannya masih belum jelas. Hal ini tentu berdampak lebih lanjut kepada pencapaian cita-cita negara untuk melindungi, mencerdaskan dan menyejahterakan bangsa dan negara. Ke depan, masalah kelembagaan dan tata kelola HKI yang ideal hendaknya dapat menyinergikan dan mengkolaborasi semua sektor baik sektor publik maupun privat. Sinergi dan kolaborasi ini diwujudkan dengan memberikan peran yang jelas kepada setiap sektor yang ada. Hal ini dapat diwujudkan dalam konteks kelembagaan dan tata kelola HKI yang efektif,

efisien, transparan, akuntabel dan terpadu.

- **Penunjukan kepala daerah yang tidak demokratis:** kebijakan penunjukan kepala daerah harus dievaluasi karena tidak demokratis dan mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat. Kepala daerah itu dipilih oleh rakyat di masing-masing daerah, bukan ditetapkan melalui penunjukan (*aanstelling*). Penunjukan pejabat kepala daerah saat ini yang difungsikan untuk masa jabatan yang relatif lama, menimbulkan problem dalam kaitannya dengan administrasi pemerintahan di bidang keuangan dan kepegawaian. Penunjukan kepala daerah oleh Mendagri dapat menimbulkan politik transaksional yang tidak dapat diawasi oleh publik;
- **Eksplotasi sumber daya alam oleh segelintir orang:** demokrasi yang terbelenggu oligarki telah mengakibatkan Indonesia menjadi negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, akan tetapi pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh Indonesia tidak disertai adanya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan perlindungan serta pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Oleh karena itu, terjadi eksploitasi SDA yang tidak berwawasan lingkungan dan berlebihan (*over exploitation*) yang disebabkan praktik demokrasi yang terbelenggu oleh oligarki. Politik oligarki terutama dalam eksploitasi SDA harus dilawan!
- **Pembentukan undang-undang yang manipulatif:** pembentukan UU yang meminggirkan partisipasi publik sudah sering dilakukan oleh Presiden dan DPR. Pembentukan UU dilakukan hanya untuk menjalankan kepentingan mereka dan bukan kepentingan rakyat. Padahal UU 13/2022 sudah menegaskan bahwa dalam pembentukan UU harus memenuhi prinsip partisipasi yang bermakna (*meaningfull participation*) dengan mengakomodasi hak rakyat untuk didengarkan, hak rakyat untuk dipertimbangkan pendapat/usul yang diberikan, dan hak rakyat untuk diberikan penjelasan atas pendapat/usul yang diberikan.

- **Sikap dan kebijakan pemerintah belum jelas terkait pengungsi Rohingya:** ketegasan pemerintah diperlukan. Solusinya, pertama Indonesia dapat bekerjasama dengan UNHCR untuk merelokasi sementara mereka yang memenuhi syarat sebagai *refugee* (tidak hanya etnis Rohingnya) di pulau terpencil, sehingga tidak menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat setempat serta mencegah mereka melarikan diri dari tempat penampungan, dengan jangka waktu dan kuota tertentu, juga dana dari badan internasional. Indonesia pernah mempraktikkan hal ini di kasus pengungsi Vietnam di Pulau Galang (1979-1996). Kedua, Indonesia harus tegas memulangkan kembali atau mendeportasi mereka yang tidak memenuhi syarat *refugee* menurut Konvensi 1951. Yang paling penting, yang juga harus dilakukan oleh Pemerintah yaitu mendorong ASEAN bersikap tegas kepada Myanmar untuk menghentikan pelanggaran HAM yang berat di Myanmar, karena ini yang menjadi akar masalah datangnya pengungsi Rohingnya di berbagai negara. ASEAN juga perlu menemukan solusi jangka panjang masalah Rohingnya.

Demikian sikap akademik ini kami sampaikan, ke depan harus ada perubahan dan strategi untuk menyelesaikan berbagai persoalan di atas.

Dosen dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Rilis Civitas Academica Universitas Islam Indonesia - III: “Indonesia Darurat Kenegarawanan”

Tanggal rilis: Kamis, 1 Februari 2024



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

PERNYATAAN SIKAP CIVITAS ACADEMICA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

INDONESIA DARURAT KENEGARAWANAN

Dua pekan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran.

Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. Putusan yang proses pengambilannya sarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga menyebabkan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Anwar Usman, diberhentikan.

Gejala ini kian jelas ke permukaan saat Presiden Joko

Widodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak. Perkembangan termutakhir, distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presiden Joko Widodo juga ditengarai sarat dengan nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu. Mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu adalah tindakan melanggar hukum sekaligus melanggar konstitusi.

Situasi di atas menjadi bukti, Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi.

Menanggapi hal itu, *civitas academica* Universitas Islam Indonesia menyatakan:

1. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden. Presiden harus bersikap netral, adil, dan menjadi pemimpin bagi semua kelompok dan golongan, bukan untuk sebagian kelompok.
2. Menuntut Presiden Joko Widodo beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial.
3. Menyeru Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah agar aktif melakukan fungsi pengawasan, memastikan pemerintahan berjalan sesuai koridor konstitusi dan hukum, serta tidak membajak demokrasi yang mengabaikan kepentingan dan masa depan bangsa.

4. Mendorong calon presiden, calon wakil presiden, para menteri dan kepala daerah yang menjadi tim sukses, serta tim kampanye salah satu pasangan calon, untuk mengundurkan diri dari jabatannya, guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara.
5. Mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat memastikan pemilihan umum berjalan secara jujur, adil, dan aman demi terwujudnya pemerintahan yang mendapatkan legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat.
6. Meminta seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama merawat cita-cita kemerdekaan dengan memperjuangkan terwujudnya iklim demokrasi yang sehat.

Demikian pernyataan sikap ini disusun sebagai wujud tanggung jawab moral anak bangsa.

Yogyakarta, 1 Februari 2024/20 Rajab 1445

Atas nama seluruh *civitas academica* UII

Fathul Wahid

Rektor

Rilis Universitas Islam Indonesia - IV: “Kematian Demokrasi di Indonesia”

Tanggal rilis: Kamis, 14 Maret 2024



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

PERNYATAAN SIKAP UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA KEMATIAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tanda-tanda kematian demokrasi sudah terasa. Namun, saking halusanya tanda tersebut, tidak banyak yang merasakannya. Penciptaan segregasi sosial sejak 2014 hingga sekarang dengan label kadrin vs. kampret terbukti menjadi sarana ampuh untuk melumpuhkan struktur demokrasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikebiri. Pengkritik pemerintah dibawa ke meja hijau dan bahkan dijabloskan ke balik jeruji besi. Aktor masyarakat sipil dibayar menjadi loyalis *sok* sejati.

Upaya membunuh demokrasi lainnya adalah tindakan “main kasar konstitusional”. Sebagai contoh, amendemen terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang seakan-akan dilakukan secara konstitusional. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah manipulasi jalur dan mekanisme konstitusional. Kasarnya permainan itu dilanjutkan dengan memunculkan gagasan ‘tiga periode’ dan perpanjangan masa jabatan presiden tanpa pemilu.

Tindakan paling kasar adalah mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meloloskan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden. Ini adalah serangan terhadap independensi lembaga peradilan sekaligus pengkhianatan terhadap amanat Reformasi 1998.

Demokrasi sebagai kesepakatan publik yang suci, telah mati di tangan Presiden Jokowi. Ini merupakan fakta pahit setelah Indonesia melewati 26 tahun reformasi. Banyak ahli dan lembaga independen terpercaya menilai bahwa Pemilu 2024 merupakan yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Kami sepakat.

Di permukaan, Pemilu 2024 tampak damai dan aman. Namun, di balik itu, Pemilu 2024 telah dimanipulasi oleh elite politik yang bekerja sama dengan kelompok oligarki untuk memperdaya masyarakat demi dukungan politik elektoral. Pemilu, sebagai salah satu pilar utama demokrasi, telah ambruk dan sekadar menjadi sarana pelanggaran kekuasaan politik dinasti Presiden Jokowi.

Melihat situasi di atas, Universitas Islam Indonesia (UII), sebagai kampus yang lahir sebelum kemerdekaan Indonesia, didirikan oleh para pembesut republik ini, dan menjadi pelantang Reformasi 1998, memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk terus berjuang menegakkan Indonesia agar berjalan di atas dasar konstitusi dan menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, kami menyatakan hal-hal berikut:

1. Menuntut seluruh penyelenggara negara untuk menjunjung tinggi etika berbangsa dan bernegara, menghormati hak dan kebebasan warga negara, dan mengembalikan prinsip independensi peradilan.
2. Mengingatkan pejabat negara bahwa mereka memiliki tugas konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa demi tercapainya masyarakat yang sejahtera, beradab, adil, dan makmur.
3. Mendorong partai politik untuk menjaga independensinya sehingga berdaya dalam menjunjung

tinggi kedaulatan rakyat dan mampu menjalankan perannya untuk membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4. Mendesak partai politik yang kalah dalam Pemilihan Presiden 2024 ini untuk menjadi oposisi penyeimbang yang berpegang teguh pada etika berbangsa dan bernegara, serta menjunjung tinggi konstitusi dan hak-hak asasi manusia dengan menggunakan hak angket dan mencari langkah politik dan hukum lainnya sebagai penghukuman terhadap Presiden Jokowi yang terbukti mengkhianati Reformasi 1998 dan telah melakukan praktik korupsi kekuasaan secara terbuka.
5. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali sadar dengan memboikot partai politik yang menjelma menjadi penghamba kekuasaan dan uang serta terang-terangan mengkhianati tugas utamanya sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.
6. Meminta lembaga-lembaga negara sesuai tugasnya seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk mengusut semua kecurangan pemilu, termasuk yang dilakukan Presiden Jokowi, pada masa sebelum, ketika, dan sesudah pemungutan suara. Pemilu harus menjadi sarana menghasilkan pemerintahan yang absah (*legitimate*).
7. Menyerukan kepada aktivis masyarakat sipil untuk melakukan pembangkangan sipil dan menolak menjadi bagian dari kekuasaan yang direbut dengan berbagai muslihat tuna etika. Secara khusus, kami menyeru para tokoh kritis nasional untuk bersatu dan membuat oposisi permanen melawan rezim politik dinasti yang menjadi predator pemangsa dan pembunuh demokrasi di Indonesia.

Pernyataan sikap ini digerakkan oleh hati nurani kami dan

kesadaran anak bangsa yang melihat praktik berbangsa dan bernegara yang semakin jauh dari nilai-nilai keadaban.

Yogyakarta, 14 Maret 2024

Atas nama keluarga besar Universitas Islam Indonesia

Fathul Wahid

Rilis *Civitas Academica* Universitas Jember: “Seruan Moral Selamatkan Demokrasi”

Tanggal rilis: Senin, 5 Februari 2024

CIVITAS ACADEMICA UNIVERSITAS JEMBER SERUAN MORAL SELAMATKAN DEMOKRASI

Civitas academica Universitas Jember (Unej) mulai dari guru besar, dosen, dan mahasiswa menggelar deklarasi seruan moral untuk selamatkan demokrasi dalam Pemilu 2024.

Deklarasi seruan moral dengan lima tuntutan itu dibacakan oleh guru besar Fakultas Hukum Unej, Prof Dominikus Rato yang diikuti oleh dosen dan puluhan mahasiswa di bundaran patung Triumviraat kampus setempat, Senin.

“Pertama, kami menuntut seluruh cabang kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif, yudikatif, untuk senantiasa berpedoman pada TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan menjalankan nilai-nilai Pancasila,” tuturnya Prof Dominikus.

Kedua, lanjut dia, menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pemerintah memastikan netralitas penyelenggara negara dan harus memberikan teladan terbaik.

Ketiga, yakni menuntut penghentian upaya politisasi kebijakan negara yang berpotensi merusak proses demokrasi dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam pemilihan umum.

“Keempat, kami menuntut tegaknya hukum dan etika penyelenggaraan pemilu serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pihak-pihak tertentu,” ujarnya.

“Terakhir, kami mengajak *civitas academica* perguruan tinggi

terlibat bersama rakyat untuk terus mengawal Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” ujarnya.

Menurutnya, Pemilu 2024 merupakan perwujudan demokrasi dan seharusnya menjadi peristiwa yang melibatkan partisipasi rakyat tanpa rasa takut dan intimidasi demi mendapatkan pemimpin dan perwakilan rakyat terbaik yang akan memperjuangkan kesetaraan, pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan.

“Pernyataan sikap tersebut disampaikan sebagai bagian dari bangsa yang selalu memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi, menegakkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945,” ujarnya.

Sementara juru bicara Forum Civitas Academica Unej, Dr Muhammad Iqbal mengatakan aksi tersebut digelar atas kepedulian dan keprihatinan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Kami berharap suara dari *civitas academica* itu bisa didengar oleh pemerintah, KPU, Bawaslu, DKPP dan seluruh rakyat yang ingin pemilu berjalan aman damai jujur adil tanpa ada intimidasi,” harapnya.

Sumber: <https://www.antaranews.com/berita/3948249/civitas-academica-unej-deklarasi-seruan-moral-selamatkan-demokrasi>, diakses 9 April 2024.

Rilis Universitas Kristen Indonesia: “Bersikap, Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024”

Tanggal rilis: Selasa, 6 Februari 2024

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA BERSIKAP, JELANG PELAKSANAAN PEMILU 2024

Sivitas akademika Universitas Kristen Indonesia (UKI) menyampaikan sikap terkait situasi politik di Indonesia menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Pembacaan sikap dipimpin oleh Rektor UKI, Prof. Dhaniswara K. Harjono dengan diikuti oleh sivitas akademika UKI.

“Mencermati situasi politik di tanah air akhir-akhir ini, menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, khususnya yang berpotensi mencederai prinsip-prinsip moral, etika, demokrasi, kemanusiaan dan keadilan sosial, terutama yang mengancam perpecahan bangsa,” ujar Prof. Dhaniswara dalam pembacaan sikap di Ruang Seminar Gedung AB, UKI Cawang (06/02).

UKI menyampaikan 4 hal yakni:

1. menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk ikut menciptakan suasana kondusif dalam pemilihan umum yang damai, guna menentukan pemimpin bangsa Indonesia 5 tahun ke depan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa;
2. mengimbau pejabat penyelenggara negara, Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, untuk selalu menjunjung tinggi sumpah jabatan, etika, moral serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok/golongan atau partai politik tertentu;
3. mendesak dihentikannya segala bentuk tindakan intervensi serta tindakan yang mengekang dan menindas kebebasan berekspresi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. mengajak masyarakat dan sivitas akademika untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil) demi tegaknya demokrasi dan hukum yang berkeadilan sosial, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta mementingkan kesejahteraan rakyat, mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan pemungutan suara.

Sumber: <https://uki.ac.id/berita/index/2024020664-universitas-kristen-indonesia-bersikap-jelang-pelaksanaan-pemilu-2024>, diakses 19 Maret 2024.

**Rilis Sivitas Akademika Universitas Kristen Duta Wacana:
“Situasi Politik dan Pemilu 2024”**

Tanggal rilis: Selasa, 6 Februari 2024

**PERNYATAAN SIKAP SIVITAS AKADEMIKA UKDW
TENTANG SITUASI POLITIK DAN PEMILU 2024**

Tuhan memberikan kepada bangsa Indonesia beragam anugerah dalam bentuk kemajemukan, situasi sosial, kekayaan alam, religiusitas, dan potensi sumber daya manusia yang luar biasa. Oleh karena itu, sudah selayaknya seluruh bangsa Indonesia bangga dan bersyukur untuk mengembangkan anugerah tersebut bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Demokrasi adalah bagian dari anugerah yang menjamin kebebasan berpendapat yang beradab, sehingga seharusnya mendatangkan kegembiraan dalam pesta demokrasi bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Dalam rangka menyikapi situasi politik dan pesta demokrasi yang sedang terjadi, dan dengan berpegang pada nilai-nilai kedutawacanaan yaitu *obedience to God*, *walking in integrity*, *striving for excellence*, dan *service to the world*, sivitas akademika UKDW menyatakan:

1. Berdasarkan nilai *obedience to God*, kami meyakini bahwa pemilu adalah bentuk pertanggungjawaban keimanan bangsa Indonesia yang religius. Inilah momen ketika masyarakat Indonesia secara bebas, dan jauh dari segala bentuk intimidasi dari pihak manapun juga, menentukan pemimpin bangsa dan wakil rakyat periode berikutnya.
2. Berdasarkan nilai *walking in integrity*, kami menolak segala bentuk kemunafikan, kekerasan dan pemaksaan yang melanggar etika, melukai nilai kemanusiaan dan kebebasan karena hal-hal tersebut bertentangan dengan semangat reformasi bangsa ini.

3. Berdasarkan nilai *striving for excellence*, kami mendorong pemerintah mampu mengayomi semua anak bangsa tanpa membedakan agar tidak terjadi polarisasi dan perpecahan di kalangan masyarakat yang bisa merusak keharmonisan bangsa.
4. Berdasarkan nilai *service to the world*, kami meminta presiden dan wakil presiden serta para anggota badan legislatif yang terpilih, untuk menjunjung tinggi sikap etis dalam melayani segenap lapisan masyarakat demi mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama, serta kelanggengan bangsa Indonesia.

Demikian pernyataan sivitas akademika UKDW, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, tetap melindungi dan menyertai bangsa Indonesia, dan menganugerahkan pemimpin yang terbaik sehingga membawa bangsa ini pada keadaban dan kemajuan.

Sumber: <https://www.ukdw.ac.id/pernyataan-sikap-sivitas-akademika-ukdw-tentang-situasi-politik-dan-pemilu-2024/>, diakses 19 Maret 2024.

Rilis Rektor Universitas Khairun: “Imbau Netral Jelang Pemilu 2024”

Tanggal rilis: Kamis, 1 Februari 2024

REKTOR UNKHAIR, IMBAU NETRAL JELANG PEMILU 2024

UNKHAIR-Pemilihan Umum (Pemilu) tinggal menghitung hari, Rektor Universitas Khairun (Unkhair), Ternate Dr. M. Ridha Ajam, M. Hum, mengimbau seluruh Aparat Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun honorer, selalu menjaga netralitas jelang pesta demokrasi 14 Februari 2024.

Hal itu ditegaskan Rektor Unkhair, Dr. M. Ridha Ajam, M. Hum. Sebagai pimpinan institusi pemerintah, mengimbau kepada pimpinan universitas, maupun di level fakultas, dapat mengontrol ASN, PPPK, dan honorer, agar terus menjaga perilaku dan bersikap di media sosial (medsos), baik *facebook*, *TikTok*, dan *whatsapp*.

Menurutnya, ASN, PPK, dan honorer Unkhair, dituntut netralitas, bijak dalam bermedsos, apalagi menunjukkan sikap keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon.

“Berbeda pilihan, tak mesti diungkapkan, baik melalui medsos, maupun ketika berkomunikasi dengan publik lainnya, setiap orang memiliki hak untuk memilih, dan sebagai ASN, PPK, dan honorer memiliki aturan, yang berkonskuensi terhadap hukum,” ungkapnya.

Rektor, yang juga Tim Seleksi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di Provinsi Maluku Utara, itu berharap kepada penyelenggara, aparat keamanan, dan masyarakat, agar tak mudah percaya informasi, maupun hal-hal yang bersifat tendensius, hoaks, yang justru memecah belah bangsa, termasuk membuat stabilitas suasana pemilu tak berjalan normal.

“Setiap menerima informasi, agar tidak terburu-buru percaya, informasi yang bersifat berita, perlu di saring lebih dulu, apalagi informasi tersebut langsung di-*share*, padahal belum diketahui kebenarannya,” katanya.

Rektor, juga mengajak, jelang pencoblosan selalu menjaga pemilu, ini berlangsung dengan damai, sukses, agar melahirkan pemimpin, dan legislatif sesuai dengan keinginan rakyat, dan bangsa ini akan menjadi lebih baik.

Sementara itu, Kepala Biro Umum, Kepegawaian dan Keuangan (BUKK), M. Tahir Abd Kadir, SH, menjelaskan larangan ASN, PPPK, dan honorer berpihak ke salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, menyusul Edaran Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum. SK tersebut bernomor: 2 Tahun 2022, 800-5474 Tahun 2022, 30 Tahun 2022, 1447.1/PM.01/K.1/09/2022.

Menurutnya, dalam surat edaran tersebut setiap ASN netral, baik pemilu calon presiden, wakil presiden, kepala daerah, dan calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Larangan memberi dukungan dengan berbagai cara, termasuk ikut kampanye.

“ASN, PPPK, dan honorer di lingkup Unkhair, dilarang menjadi partisan, mendukung menguntungkan, atau merugikan salah seorang calon capres, dan cawapres, calon walikota, dan calon anggota DPR, baik dilakukan sebelum maupun sesudahnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, berdasarkan edaran SK tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, itu mengingat tugas utama dosen, dan tendik memiliki tanggung jawab memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. “ASN, PPPK, dan honorer menjalankan tugasnya masing-masing dilakukan dengan

adil dan tanpa keberpihakan,” ucapnya.

Karo, juga berharap sivitas akademika Unkahir, terus menjaga integritas, bahkan tidak terjebak dalam pelanggaran, terutama pelanggaran dalam bentuk tindak pidana pemilu. Sementara itu, jenis pelanggaran yang mungkin terjadi, baik interaksi selain bentuk langsung, maupun yang kebanyakan terjadi interaksi melalui medsos saat pemilu berlangsung.

Sumber: <https://unkhair.ac.id/rektor-unkhair-imbau-netral-jelang-pemilu-2024/>, diakses 1 April 2024.

**Rilis Sivitas Akademika Universitas Lambung Mangkurat:
“Deklarasi Kebangsaan Kayu Tangi untuk Demokrasi Bermartabat”**

Tanggal rilis: Jumat, 2 Februari 2024

**DEKLARASI KEBANGSAAN KAYU TANGI UNTUK
DEMOKRASI BERMARTABAT**

Penyampaian aspirasi sivitas akademika Universitas Lambung Mangkurat (ULM) terkait proses berdemokrasi menjelang Pemilu 2024 dilakukan para akademisi ULM di Gedung Rektorat ULM, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (2/2/2024).

Guru Besar Fakultas Hukum ULM, Hadin Muhjad mengatakan, seluruh komponen bangsa, termasuk kaum intelektual di universitas, turut menyuarakan dan menyampaikan aspirasi dalam menghadapi situasi politik menjelang Pemilu 2024. Saat ini, banyak perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki keprihatinan sama terhadap situasi kehidupan bangsa.

“Kami memiliki kebebasan ilmuwan menjawab masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam masyarakat. Saat ini, hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia memberikan aspirasi dalam menyikapi perkembangan politik yang terjadi akhir-akhir ini,” katanya.

Menurut Hadin, sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia berdiri di atas negara hukum dan demokrasi. Demokrasi itu mengandalkan kekuatan rakyat, dan rakyat berpegang pada hukum. Maka, seluruh aturan bernegara harus berdasarkan hukum, baik itu terkait masalah keadilan, kejujuran, maupun konstitusi.

“Pada saat ini, konstitusi kita mau dikoyak-koyak. Maka, kami harus bersikap dan tidak boleh membiarkan. Kami harus bersuara sesuai keilmuan kami, tanpa bermaksud mengadu domba dan menyerang orang tertentu,” katanya.

Dengan mencermati situasi dan kondisi menjelang Pemilu 2024, para akademisi ULM mengingatkan dan mengajak semua pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 agar memperhatikan dan memastikan proses demokrasi dilaksanakan sungguh-sungguh. Hal itu dilakukan berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku.

”Aspek etika merupakan bagian tak terpisahkan dalam kepribadian bangsa Indonesia. Etika harus menjadi acuan penting dalam proses berdemokrasi,” ujarnya.

Para akademisi ULM juga mengingatkan dan mengajak semua pihak melaksanakan sungguh-sungguh prinsip dasar Pemilu 2024, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Semua pihak pun diajak memelihara persatuan antarkomponen bangsa agar pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung aman dan kondusif.

Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ULM, Fahrianoor, membacakan puisi karangannya berjudul ”Revolusi Luka” saat penyampaian aspirasi sivitas akademika ULM. ”Pada siapa mengadu duka? Apakah pada revolusioner yang menabur luka? Atau penguasa yang melenakan asa? Dalam sekarung beras dan sekilo gula,” kata Fahrianoor dalam salah satu bait puisinya.

Menurut Fahrianoor, akademisi ULM sebagai representasi dari masyarakat Kalsel juga menaruh keprihatinan terhadap situasi bangsa yang terjadi akhir-akhir ini. Karena itu, akademisi ULM turut menyampaikan aspirasinya.

”Penyampaian aspirasi ini menunjukkan universitas selalu tegak lurus untuk menjaga marwah demokrasi yang saat ini sedang tidak baik-baik saja,” katanya.

Sumber: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/02/akademisi-universitas-lambung-mangkurat-ingatkan-pentingnya-etika-berdemokrasi>, diakses tanggal 1 April 2024.

Rilis Sivitas Akademika Universitas Malikussaleh:
“Penyelamatan Reformasi dan Demokrasi Nasional”

Tanggal rilis: Senin, 5 Februari 2024

**MAKLUMAT SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS
MALIKUSSALEH**

TENTANG

**PENYELAMATAN REFORMASI DAN DEMOKRASI
NASIONAL**

Bismillahirrahmanirrahim

Kondisi nasional menjelang Pemilu 2024 menunjukkan adanya ketegangan yang akut. Hal ini, disebabkan proses menuju Pemilu Serentak Nasional 2024 ini yang akan menjadi sejarah pemilihan serentak terbesar yang dilaksanakan satu hari yang dalam prosesnya ternyata dilalui dengan berbagai masalah di antaranya: pelanggaran etik hukum, dan moral politik. Hal ini terbaca dari keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) bahwa putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 mengandung permasalahan prosedural etik akut dan memutuskan ketua MK yang memuluskan putusan itu dengan sanksi pemberhentian sebagai ketua MK.

Proses ini akhirnya menjadikan jalan menuju Pemilu 2024 menjadi masalah bagi integritas bangsa. Praktik kampanye dan politik menjelang hari H, 14 Februari 2024 dipenuhi perasaan yang tidak melegakan. Ada banyak pelanggaran terjadi selama kampanye pemilu yang tidak kunjung dieksekusi, baik oleh KPU dan juga Bawaslu.

Atas dasar itulah, kami para akademisi Universitas Malikussaleh ikut menyatakan keprihatinan atas keberlangsungan politik bangsa ini. Kami sebagai bagian dari gerakan menengah intelektual menyerukan sebagai berikut:

1. Mengharapkan pemerintah menangkap suara kebatinan bangsa Indonesia yang menginginkan bersikap netral dan menjaga pranata hukum dan pemerintahan hingga jajaran terendah agar tidak terjebak pada sikap partisan pada Pemilu 2024 ini.
2. Mengharapkan TNI/Polri tetap setia pada NKRI dan menjunjung tinggi kehormatan negara dan bangsa dengan menjaga sekuat mungkin keamanan dan pertahanan nasional. Hal ini, sesuai dengan sumpah Jabatan Pegawai Kepolisian dan Sumpah Prajurit Sapta Marga sebagai patriot dan pembela ideologi negara.
3. Mengharapkan kepada penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) beserta jajaran di bawahnya hingga level *ad hoc* untuk bekerja secara profesional dan adil. Sesuai dengan harapan KPU menjadikan “Pemilu 2024 sebagai sarana integrasi bangsa” dan *tagline* Bawaslu “menegakkan keadilan Pemilu”.
4. Mengharapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Aceh, untuk menjaga kondusivitas, dengan terus menyerukan semangat penyelamatan reformasi dan demokrasi yang telah menjadi cita-cita para Reformasi 1998. Cita-cita reformasi terlalu mahal untuk digadaikan demi kepentingan pragmatis Pemilu 2024. Jangan lagi mundur ke belakang dan perkuat sendi kebangsaan dengan nilai-nilai demokrasi yang kita gali dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
5. Mengharapkan para rektor di seluruh Indonesia baik kampus negeri atau swasta untuk memberikan pencerahan kepada mahasiswa agar dapat memilih secara cerdas dan bertanggung jawab demi kelangsungan demokrasi yang kita perjuangkan selama ini. Pilihan cerdas akan menyelamatkan republik ini dari polarisasi dan disintegrasi bangsa.
6. Kepada masyarakat Indonesia yang telah terdaftar sebagai pemilih, gunakan hak pilih Anda pada pilpres dan pileg secara mandiri dan sesuai dengan hati nurani. Tidak ada seorang pun yang berhak mengatur dan menggiring pilihan karena hal itu tidak sesuai dengan

semangat demokrasi yang kita perjuangkan dan nilai-nilai Pancasila yang kita anut. Hanya Tuhan Yang Maha Kuasa saja yang berhak mencabut hak asasi kita, dan kepada-Nyalah kita berserah diri.

Demikian maklumat ini disampaikan, atas nama keadilan dan kebenaran untuk Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.

Lhokseumawe, 5 Februari 2024

Rilis Dewan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: “Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban”

Tanggal rilis: Sabtu, 3 Februari 2024

PESAN KEBANGSAAN DAN HIMBAUAN MORAL
DEWAN GURU BESAR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
KEPADA SELURUH PENYELENGGARAN NEGARA
MENGAWAL DEMOKRASI INDONESIA
YANG BERKEADABAN

Dalam kurun waktu 1 tahun ini, eskalasi pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara seperti tiada henti dan meningkat tanpa malu-malu lagi. Mulai dari KPK yang dikebiri, pejabat yang doyan korupsi, DPR yang tak berfungsi membela anak negeri, dan sebagian hakim MK yang tidak punya etika dan harga diri. Puncak dari semua itu adalah dipasungnya hakim MK oleh ambisi penguasa negeri dan hilangnya etika dalam politik konstetasi menjelang Pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari nanti. Para penguasa negeri ini, alih-alih memikirkan rakyat yang tereliminasi oleh kekuatan oligarki, malah mereka sibuk mengejar dan mempertahankan kekuasaan tak kenal henti oleh ambisi. Kerapuhan fondasi bernegara ini hampir sempurna karena penyelenggara negara (pemerintah, DPR dan peradilan) gagal menunjukkan keteladanan mereka dalam menjaga kepatuhan kepada prinsip-prinsip konstitusi dan etika bernegara yang harusnya ditaati dengan sepenuh hati.

Sebagai negara demokrasi berdasarkan konstitusi, maka seharusnya para penyelenggara negara di Indonesia menjadi teladan utama dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusi dan memberi contoh dalam menegakkan etika bernegara yang baik bagi warga negara. Keteladanan para penyelenggara negara adalah kunci keberhasilan sebuah

negara dalam mencapai tujuan negara dan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, segenap penyelenggara negara seharusnya menunjukkan contoh dalam kepatuhan kepada prinsip-prinsip konstitusi dan bagaimana menjalankan etika dalam bernegara. Tanpa keteladanan para penyelenggara negara, maka Indonesia berada di ambang pintu menjadi negara gagal. Oleh karenanya, rakyat sebagai pemilik kedaulatan sesungguhnya, harus bergerak untuk mengingatkan segenap penyelenggara negara agar mereka mematuhi konstitusi dan merawat demokrasi Indonesia.

Menyikapi hal-hal di atas, maka kami segenap Guru Besar dan *Civitas Academica* UMY dengan ini menyatakan:

Mendesak Presiden RI menjalankan kewajiban konstitusionalnya sebagai penyelenggara negara untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu 2024 yang jujur dan adil. Penggunaan fasilitas negara dengan segenap kewenangan yang dimiliki merupakan pelanggaran konstitusi yang serius.

Menuntut para aparat hukum (polisi dan kejaksaan) dan birokrasi untuk bersikap netral dalam kontestasi Pemilu 2024 demi terlaksananya pemilu yang jujur dan adil.

Menuntut KPU, Bawaslu, DKPP serta organ yang berada di bawahnya agar bersikap independen demi terlaksananya Pemilu 2024 yang jujur dan adil.

Mendesak partai politik untuk menghentikan praktik politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi Pemilu 2024 dan mengedepankan politik gagasan dan edukasi politik yang mencerdaskan rakyat.

Menuntut lembaga peradilan (Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, Mahkamah Konstitusi) agar bersikap independen dan imparisial dalam menangani berbagai sengketa dan pelanggaran selama proses Pemilu 2024.

Mengimbau seluruh rakyat Indonesia untuk sama-sama mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 agar bermartabat,

jujur dan adil sehingga menghasilkan pemimpin yang visioner dan berani menegakkan prinsip-prinsip konstitusi.

3 Februari 2024

Atas nama Seluruh *Civitas Academica* UMY

Dewan Guru Besar UMY

**Rilis Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung:
“Darurat Kenegarawanan di Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia”**

Tanggal rilis: Jumat, 2 Februari 2024

SERUAN KEBANGSAAN

DARURAT KENEGARAWANAN DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Saat ini, beberapa sivitas akademika telah bergerak menyuarakan keprihatinan terhadap situasi dan kondisi demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai. Akhir-akhir ini, kita dipertontonkan sebuah drama kolosal yang melibatkan hampir seluruh pemimpin negeri. Hasrat kekuasaan yang begitu besar untuk berkuasa membuat beberapa golongan tidak lagi objektif dalam menilai langkah-langkah yang ditempuh.

Dimulai dari memaksakan kepemimpinan 3 periode yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi dan mencederai semangat reformasi yang diperjuangkan oleh para mahasiswa, berkorban air mata, darah dan nyawa.

Sampai kemudian mendorong anggota keluarga untuk menjadi salah satu peserta kontestan pemilihan presiden dan wakil presiden dengan cara menganggangi aturan melalui Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin oleh keluarga dekat. Hal ini jelas sangat menyakiti hati rakyat. Perbuatan ini dilakukan dengan sadar, tanpa mempedulikan norma, etika dan nurani.

Hingga pada titik keberpihakan kepala negara dalam proses pesta demokrasi untuk memilih capres dan cawapres, carut marut proses demokrasi ini telah membuat situasi negara masuk dalam tahap Indonesia darurat kenegarawanan.

Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah islam yang didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan tahun 1912 yang lalu, selalu menggemakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung (UNMUH BABEL), sebagai amal usaha Muhammadiyah yang selalu menyampaikan slogan berkemajuan dan mencerahkan memiliki tanggungjawab moral untuk selalu menyampaikan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran.

Sebagai kampus yang berlandaskan 5 nilai dasar utama: keislaman, keindonesiaan, kekinian, kedisinian, dan kemasadepanan, UNMUH BABEL selalu mengupayakan terlaksananya catur dharma perguruan tinggi sebagai pilar memajukan gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* di tengah-tengah masyarakat Babel, pada khususnya dan Indonesia pada umumnya merasa terpanggil untuk memberikan arah sebagai landasan beramal khususnya bagi sivitas akademika UNMUH BABEL untuk terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya.

Dalam konteks keindonesiaan, UNMUH BABEL berkepentingan untuk selalu mengkritisi setiap kebijakan yang berdampak pada tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sivitas akademika UNMUH BABEL, menyerukan kepada seluruh masyarakat Bangka Belitung khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya;

“untuk mengawal proses demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia agar dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Memberikan pandangan, pikiran, kritik, masukan dan evaluasi terhadap proses pemerintahan yang sedang berjalan dengan melakukan konsolidasi terhadap seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Kita harus memberikan kontribusi untuk menjaga keberlangsungan jalannya demokrasi agar sesuai dengan semangat para pendiri bangsa serta memperjuangkan tegaknya konstitusi dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Dengan demikian sivitas akademika UNMUH BABEL dengan ini menyatakan:

1. Meminta Presiden Republik Indonesia dan aparaturnegara secara keseluruhan dapat memberikan teladan dalam berdemokrasi dengan mengedepankan etika dan keadaban berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
2. Mendesak penyelenggara pemilu untuk dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan sumpah jabatan yang diucapkan sehingga terlaksana pemilu yang jujur dan adil.
3. Menghimbau kepada seluruh sivitas UNMUH BABEL khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan penuh rasa kesadaran menggunakan akal sehat dan nurani yang terdalam sehingga mampu memilih pemimpin Republik Indonesia presiden, wakil presiden, serta anggota dewan yang sidik, amanah, *tabligh*, dan *fatonah*.

Billahi fisabililhaq,

Nasrumminallahi wafathul qorib,

Fastabiqul khoirat

Pangkalan Baru, 2 Februari 2024 M/

21 Rajab 1445 H

Sumber: <https://unmuhbabel.ac.id/2024/02/02/sikapi-kondisi-kepemimpinan-nasional-saat-ini-civitas-akademika-unmuh-babel-deklarasi-seruan-kebangsaan/> diakses tanggal 1 April 2024.

Rilis Universitas Muhammadiyah Surakarta: “Maklumat Kebangsaan”

Tanggal rilis: Senin, 5 Februari 2024

MAKLUMAT KEBANGSAAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Aidul Fitriciada Azhari mengatakan dengan mencermati perkembangan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan saat ini, utamanya terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif tahun 2024, Universitas Muhammadiyah Surakarta merespons kondisi Indonesia saat ini dengan mengeluarkan Maklumat Kebangsaan.

“Terlihat dengan jelas telah terjadi penyimpangan, penyelewengan, dan peluruhan fondasi kebangsaan secara terang-terangan dan tanpa malu. Hal itu terutama terlihat dari penyalahgunaan pranata hukum lewat Mahkamah Konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan yang berwatak nepotis dan oligarkis yang semakin diperburuk oleh praktik politik dari presiden yang tidak netral dalam kontestasi pemilihan umum yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan secara masif,” kata Aidul, membacakan Maklumat Kebangsaan di depan Gedung Induk Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin, 5 Februari 2024.

Ketua Komisi Yudisial Tahun 2016-2018 itu, memaparkan situasi itu menunjukkan bahwa kehidupan kebangsaan dan kenegaraan telah kehilangan adab dan etika yang mengancam masa depan demokrasi, supremasi hukum dan terwujudnya keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan dalam konstitusi, Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (RI) Tahun 1945. “Atas dasar itu, sivitas akademika UMS menyerukan Maklumat Kebangsaan sebagai berikut,” ujarnya.

Pertama, agar para elite politik yang tengah berkontestasi dalam Pemilihan Umum 2024 untuk kembali kepada nilai-nilai moral kebangsaan yang bersumber dari ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Kedua, presiden dan para elite politik untuk mengembalikan kehidupan demokrasi yang menjunjung adab dan etika kebangsaan yang bukan hanya bertujuan untuk memperoleh kekuasaan semata, melainkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia.

“Ketiga, agar pemimpin pemerintahan dan aparaturnya untuk menegakkan supremasi hukum dengan tidak menyalahgunakan hukum untuk kepentingan politik dan/atau ekonomi yang bersifat pribadi atau golongan serta menjalankan hukum tanpa pandang bulu dan tidak partisan,” kata Aidul.

Keempat, penyelenggara pemilihan umum (KPU, Bawaslu, dan DKPP) dan lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi diminta menjaga profesionalitas, integritas, dan imparialitas agar terwujud pemilihan umum yang luber, jurdil dan demokratis. Kelima, agar aparaturnya sipil negara dan TNI/Polri untuk tetap menjaga netralitas sebagai aparaturnya negara yang berkewajiban melayani seluruh rakyat tanpa terkecuali.

“Keenam, presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan sesuai dengan sumpah jabatan sebagai presiden serta menghentikan praktik politik dalam pemilihan umum yang tidak netral demi mewujudkan pemilihan umum yang jujur, adil, dan demokratis,” kata Aidul.

Ketujuh, Aidul mengatakan agar seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi pemilih yang merdeka dan berdaulat berdasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran dan keutamaan serta saling menghormati pilihan masing-masing. Terakhir, agar seluruh rakyat untuk menolak praktik politik uang dalam bentuk apapun, termasuk menolak penggunaan

keuangan negara untuk kepentingan elektoral dalam bentuk bantuan sosial.

“Maklumat Kebangsaan ini sebagai bentuk tanggung jawab akademis untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan harapan mewujudkan negara Indonesia yang demokratis, bermartabat, dan berkemajuan,” kata Aidul.

Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sofyan Anif menyampaikan kegiatan itu adalah bentuk tanggung jawab moral kampus untuk kemajuan bangsa dan negara. Menurut dia, UMS merupakan sebuah kampus yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, baik moral maupun berlandaskan nilai Al-Islam Kemuhammadiyah (AIK).

“Sehingga sebagai bentuk implementasi nilai-nilai itu harus dipetanggungjawabkan secara moral kepada khalayak masyarakat luas,” ucap Sofyan.

Lebih lanjut, Sofyan mengatakan Maklumat Kebangsaan adalah ajakan moral, tidak ada kepentingan politik tertentu ataupun politik praktis. “Kami ingin mengajak penyelenggara negara agar kembali sadar bahwa di dalam pemilihan umum (pemilu) ini berlandaskan nilai etik dan moral. Sehingga kami mengharapkan Pemilu tahun 2024 ini menjunjung tinggi langsung, umum, bebas, rahasia (luber) dan jujur adil (jurdil),” kata dia.

Universitas Muhammadiyah Surakarta juga ingin berperan memberikan kontribusi penguatan nilai etik dan moral yang berlandaskan AIK. “Tujuan kami agar lulusan atau alumni Universitas Muhammadiyah Surakarta ini tidak hanya berorientasi menjadi kader Muhammadiyah, tetapi juga kader bangsa yang bermartabat,” ujar Guru Besar Bidang Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta itu.

Sumber: <https://news.ums.ac.id/id/02/2024/kritik-presiden-jokowi-puluhan-guru-besar-ums-serukan-maklumat-kebangsaan-dengan-8-tuntutan/>, diakses 19 Maret 2024.

Rilis Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta: “Maklumat”

Tanggal rilis: Senin, 5 Februari 2024

MAKLUMAT

CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA MENGGUGAT

Merespons indikasi adanya krisis etika hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024, sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dipimpin oleh para Guru Besar mendeklarasikan gugatan. Gugatan itu dilayangkan melalui pembacaan Maklumat Akademika UMJ Menggugat oleh Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, MH., di Plaza Universitas Muhammadiyah Jakarta, Senin (05/02/2024).

Dalam maklumat itu, sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta menyampaikan beberapa poin tuntutan dan seruan.

Pertama, menuntut Presiden untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika demokrasi dan yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

Kedua, menuntut segala pejabat negara, aparatur sipil negara, aparatur penegak hukum (Polri, dan Kejaksaan), dan aparatur militer negara (TNI) untuk dibebaskan dari segala paksaan dan tidak memaksakan penyalahgunaan kuasa, sumber daya, dan pengaruh yang ada padanya untuk mencederai prinsip netralitas.

Ketiga, menuntut kepada penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) dan Peserta Pemilu khususnya partai politik untuk melindungi hak pilih setiap warga negara

dari berbagai tekanan yang mencederai prinsip dasar demokrasi.

Keempat, menyerukan warga Muhammadiyah dan masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu tahun 2024.

Kelima, menyerukan seluruh sivitas akademika di seluruh Indonesia untuk mampu saling mempromosikan nilai-nilai persatuan yang damai dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi.

Ibnu menerangkan bahwa maklumat ini merupakan sikap sivitas akademika yang timbul karena memiliki suasana kebatinan yang sama dengan guru besar dan sivitas akademika di perguruan tinggi lain. Sivitas akademika UMJ memperhatikan bahwa selama proses penyelenggaraan Pemilu 2024 telah terjadi krisis etika hukum, defisit demokrasi substansial dan darurat kenegarawanan dalam penyelenggaraan pemerintah.

Pemilihan umum yang semestinya jadi sarana demokratis untuk mencapai harapan warga negara yang berdaulat, justru memperlihatkan demoralisasi. Hal itu ditunjukkan dengan adanya praktik-praktik ketidaknegarawanan dari berbagai penyelenggara negara yang tidak netral, keberpihakan, dan manipulatif.

“Maklumat ini murni merupakan fungsi cendekiawan yang tidak hanya berdiri di menara gading. Kami menyerukan pemerintah untuk bisa menjalankan tugas, mencegah perbuatan yang memaksa aparat sipil, penegak hukum dan aparat militer negara, TNI khususnya, agar tidak mendorong untuk memenangkan kelompok-kelompok tertentu,” ungkap Ibnu saat dimintai keterangan usai pembacaan maklumat.

Lebih lanjut, Ibnu menjelaskan bahwa sivitas akademika menghendaki Indonesia yang lebih baik dengan dijaminnya kebebasan berpendapat, kebebasan memilih tanpa ada tekanan dan tindakan manipulatif lainnya.

Maklumat ini diharapkan menjadi peringatan penting bagi pemerintah dan masyarakat karena hampir semua perguruan tinggi memiliki sikap yang sama.

“Ini adalah bentuk *amar ma’ruf* dalam mengawal proses pemilu. Kami berharap seluruh penyelenggara negara dan seluruh instrumen tidak dipaksakan, dan diberikan kebebasan hak pilih. Mari semua menjaga proses pemilu agar berjalan dengan baik. Harus dijaga dengan netralitas, tidak ada paksaan sehingga malah berjalan mundur kembali ke era diktator,” pungkasnya.

Pembacaan Maklumat Akademika UMJ Menggugat turut dihadiri oleh Rektor UMJ, Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si., para wakil rektor, guru besar, dekan, wakil dekan, dan segenap sivitas akademika UMJ.

Sumber: <https://umj.ac.id/news/2024/02/respons-krisis-etika-hukum-akademisi-umj-gugat-sikap-pemerintah/>, diakses 1 April 2024.

Rilis Senat Universitas Mulia

Tanggal rilis: Selasa, 6 Februari 2024

PERNYATAAN SIKAP SENAT UNIVERSITAS MULIA

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan rahmat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

Kami atas nama Senat Universitas Mulia, setelah mengamati dan mencermati dinamika yang terjadi dalam pesta demokrasi beberapa waktu belakangan ini, dengan ini menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai sektor yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi dan keadilan sosial.

Dengan segala kerendahan hati, kami melalui imbauan ini:

1. Mengingat kembali sumpah presiden yang telah diucapkan di hadapan MPR atau DPR yaitu berjanji dengan sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.
2. Menyerukan kepada Presiden dan aparat negara agar tetap menjunjung tinggi cita-cita proklamasi dan reformasi, menghentikan tindakan yang mencederai demokrasi, mengedepankan kebersamaan dan tetap menjaga suasana kondusif demi tegaknya demokrasi.
3. Menyerukan semua aparat, baik itu ASN, pemerintah, Polri dan TNI agar tetap menjaga netralitas demi menjaga marwah demokrasi.
4. Mendorong setiap elemen bangsa agar menjadi teladan

yang baik dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan

5. Mengajak seluruh elemen bangsa untuk memberikan edukasi dan informasi yang baik benar dan jujur kepada masyarakat luas agar terhindar dari informasi bohong (*hoax*).
6. Mengajak seluruh warga negara yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani (tidak golput) dan menghargai perbedaan pilihan.

Balikpapan, 6 Februari 2024

Sumber: <https://universitasmulia.ac.id/2024/02/06/pernyataan-sikap-senat-universitas-mulia-terhadap-penyimpangan-prinsip-moral-demokrasi/>, diakses 19 Maret 2024.

**Rilis Sivitas Akademika Universitas Mulawarman:
“Pernyataan Sikap”**

Tanggal rilis: Rabu, 7 Februari 2024

**PERNYATAAN SIKAP
SIVITAS AKADEMIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN (UNMUL)**

Sivitas akademika Unmul menilai demokrasi di Indonesia tengah terancam akibat perilaku otoriter dari elite politik. Berbagai praktik dinilai telah merusak demokrasi seperti pungutan MPR yang menciptakan politik dinasti, keterlibatan aparaturnegara yang mengabaikan netralitas, hingga intervensi kelembagaan negara seperti KPK dan MK.

Pernyataan Sikap Sivitas Akademika Unmul yang dibacakan Guru Besar Unmul sekaligus Anggota Koalisi Dosen Unmul, Prof. Aswin ini mendesak Presiden menghentikan intervensi politik terhadap lembaga negara demi menghormati prinsip *check and balance*. MPR juga didorong merevisi UU MD3 yang dinilai cacat etik dan konstitusional.

Selain itu, KPU dan Bawaslu diminta menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu secara profesional, transparan, dan akuntabel. Aparat keamanan juga harus netral serta menghentikan intimidasi terhadap aktivis dan jurnalis.

Sivitas akademika Unmul mengajak seluruh rakyat Indonesia bersatu dalam gerakan demokrasi dengan mengawal proses politik dan melakukan aksi damai konstitusional.

“Kita ingin pemilu ini betul-betul bersih, jujur, adil supaya pemilu kita ini *legitimate*. Jangan sampai membuat masalah di kemudian hari. Kita di Unmul apalagi (Kaltim) sudah ditunjuk sebagai Ibu Kota Negara harus bisa membuat yang terbaik,” ujar Prof Aswin usai membacakan pernyataan sikap Sivitas Akademika Unmul.

Sivitas Akademika Unmul dengan anggota Koalisi Dosen Unmul, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersikap dan beraksi dalam rangka menyelamatkan demokrasi dan menetapkan lima poin sikap, yaitu:

1. Selamatkan demokrasi serta hentikan segala keputusan yang mencederai demokrasi.
2. Presiden tidak boleh memihak. *Stop* langkah politik yang hanya ditujukan untuk kepentingan dinastinya. Jokowi adalah presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan presiden untuk anak dan keluarganya.
3. Meminta kepada seluruh aparatur negara agar bersikap netral dan tidak memihak dalam momentum elektoral 2024 ini. Mereka dibayar dari pajak-pajak rakyat. Oleh karena itu, harus mengabdikan untuk kepentingan rakyat banyak bukan kepada elite politik golongan dan kelompok tertentu.
4. Kekuasaan tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok tertentu termasuk mempolitisasi bantuan sosial dan atau bantuan pangan untuk memenangkan calon tertentu.
5. Menyerukan kepada seluruh akademisi dan kelompok intelektual lainnya untuk terlibat secara luas dan masif dalam menjaga demokrasi kita dari ancaman tiran kekuasaan.

Pernyataan Sikap Sivitas Akademika Unmul ini mendapat dukungan dan apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil. Mereka menganggap pernyataan sikap ini sebagai bentuk tanggung jawab moral kaum intelektual dalam menjaga demokrasi di Indonesia.

Sumber: <https://sekaltim.co/pernyataan-sikap-sivitas-akademika-unmul-desak-pemulihan-demokrasi-dan-penolakan-tirani-kekuasaan/> dan

<https://kaltimtoday.co/koalisi-dosen-universitas-mulawarman-serukan-jaga-demokrasi-tolak-cawe-cawe-presiden-jokowi-di-pilpres-2024>, diakses 1 April 2024.

Rilis Civitas Akademika Universitas Negeri Jakarta:
“Deklarasi Rawamangun, Selamatkan Demokrasi untuk
Selamatkan Indonesia sebagai Negara Republik”

Tanggal rilis: Selasa, 6 Februari 2024

DEKLARASI RAWAMANGUN

SELAMATKAN DEMOKRASI UNTUK SELAMATKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA REPUBLIK

UNJ sebagai universitas perjuangan yang memiliki jejak sejarah panjang sejak kelahirannya hampir enam dekade silam tidak dapat menutup mata atas berbagai realitas yang memprihatinkan dalam tata kehidupan sosial, ekonomi dan politik negeri kita akhir-akhir ini. Berbagai kasus bermunculan di penghujung era kepemimpinan Presiden Joko Widodo seperti: kasus Ferdi Sambo, kasus narkoba di Kepolisian, kasus transaksi gelap (mencurigakan) Tindak pidana pencucian uang, kasus penggusuran paksa di Pulau Rempang, pelanggaran etik berat Ketua MK, Merajalelanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), terjadinya polarisasi politik menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 yang telah menimbulkan berbagai kekisruhan politik untuk memperebutkan kursi kekuasaan, dan lain-lain.

Kampus UNJ Rawamangun yang sejak 15 September 1953 sebagai *“the city of the intellect”* yang prasastinya ditandatangani oleh Presiden Soekarno di Gedung Daksinapati (saat ini Gedung Fakultas Ilmu Pendidikan UNJ) dan sebagai LPTK Pembina di masa lalu, terus merawat toga keilmuan dan memelihara integritas moral dan etika keilmuannya hingga saat ini dan mendatang. Meskipun telah dibayar dengan harga mahal, misalnya, Dr. Deliar Noer diberhentikan sebagai Rektor IKIP Jakarta pada Juni 1974 karena bersuara kritis terhadap tindakan represif pemerintah dalam penanganan Peristiwa Malari. Bahkan sejumlah pejabat dan aktivis mahasiswa dipenjara karena bersikap kritis demi menjaga toga keilmuan, moral dan

etika keilmuan. Demikian pula apa yang diperjuangkan para pendahulu kampus ini seperti Prof. Winarno Surakhmad, Prof. Conny R Semiawan, Prof. HAR Tilaar, Prof. Napitupulu, Prof. Soedijarto, Prof. Maftuchah Yusuf dan sejumlah putra-putri terbaik UNJ lainnya, yang terus menjaga toga keilmuannya di dalam universitas maupun di arena publik. Meskipun mereka telah tiada, namun semangatnya tidak akan pernah redup hingga kapan pun dan tidak akan pernah berkompromi dengan kekuasaan yang mengkhianati cita-cita proklamasi.

Terkait dengan berbagai fenomena kontestasi politik yang menodai nilai-nilai etika, moral dan hukum dan mencederai nilai-nilai demokrasi dan konsitusi menjelang pemilu pada 14 Februari 2024 yang kemudian menimbulkan kekisruhan sosial dan politik yang dapat mengancam sendi-sendi keutuhan NKRI, maka dengan ini semua sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta, guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni menyatakan sikap, sebagai berikut:

1. Sebagai buah “Reformasi” yang anti KKN, Indonesia telah memilih jalan “Demokrasi” di penghujung abad ke-20 yang dinilai sebagai jalan terbaik untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang berasaskan pada Pancasila. Karenanya, menegakkan demokrasi sesungguhnya menegakkan Negara Republik Indonesia. Salah satu ciri utama negara demokrasi adalah terlaksananya pemilu yang bebas, jujur, adil, dan bersih sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta perundang-undangan lainnya yang berlaku. Oleh karena itu, segala bentuk kecurangan, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan pemilu adalah kejahatan dalam berdemokrasi dan konstitusi.
2. Mendesak semua penyelenggara pemilu untuk bekerja dengan penuh kewaspadaan, profesional dan bertanggung jawab agar terhindar dari kecurangan dan terhindar dari jatuhnya korban petugas KPSP seperti pada Pemilu 2019 lalu. Dilaporkan oleh seluruh media *mainstream* (22/01/2020) bahwa jumlah korban petugas KPSP yang meninggal dunia mencapai 894

orang, dan 5.175 telah menjalani perawatan di berbagai Rumah Sakit di tanah air. Sebagai refleksi komparatif, meski pelaksanaan Pemilu di Nigeria dinilai sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah Afrika ternyata hanya menelan 8 orang korban jiwa petugas pemilunya (the Times, 6/09/1983), dan penilaian serupa pada pelaksanaan Pemilu Kenya 2022, tetapi hanya menelan satu orang korban jiwa petugas pemilu (africonews 23/08/2022). Indonesia dengan jumlah yang ratusan atau ribuan itu, bahkan hingga kini belum terungkap penyebabnya, meski pandangan para Dokter Peduli Kemanusiaan (2019), mereka meninggal bukan karena kelelahan seperti disampaikan oleh pemerintah, tetapi karena keracunan atau diracun.

3. Secara institusi, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tidak berpihak kepada siapa pun dan kelompok politik mana pun, namun tetap menjunjung tinggi pluralitas dan demokrasi yang berkeadaban.
4. Fenomena politik saat ini sangat membahayakan masa depan demokrasi karena perilaku oknum elite politik yang telah mempertontonkan praktik kekuasaan yang mengabaikan nilai-nilai moral dan etika.
5. Mendesak penyelenggara pemilu untuk bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya yang menjunjung tinggi netralitas dan integritas sehingga dapat mengantisipasi segala macam masalah, gejala, dan peristiwa yang memungkinkan terjadinya penyimpangan pelaksanaan pemilu.
6. Mendesak pemerintah untuk menjunjung tinggi netralitas dan tidak mengintervensi jalannya proses pemilu serta menjalankan kekuasaan untuk kepentingan kelompok yang menyimpang dari koridor demokrasi dan konstitusi.
7. Mengajak segenap masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilu untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam Pemilu 2024 dengan memilih para calon pemimpin bangsa dan negara yang didasarkan pada kualitas dan rekam jejak kenegarawanannya,

kepemimpinannya, dan program kerja yang berpihak pada masyarakat, serta memilih karena didasarkan pada hati nurani dan keyakinan yang sungguh-sungguh yang bukan atas dasar politik uang atau intimidasi dari pihak tertentu.

8. Mengajak segenap sivitas akademika UNJ dan masyarakat umum untuk menjaga dan mengawasi penyelenggaraan Pemilu 2024 yang jujur, bersih, damai, dan tanpa intimidasi. Jika terjadi kecurangan masif dan kekacauan dalam pemilu kami sivitas akademika UNJ akan bersikap bersama rakyat banyak untuk turut menyelamatkan Indonesia sebagai negara republik.
9. Mendesak penegakan hukum yang tegas dan tidak berpihak kepada pihak manapun untuk berbagai kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilu 2024.
10. Terakhir, kami mengajak hai anak-anakku, para mahasiswa-mahasiswi Indonesia, putra-putri terbaik bangsa, pada 14 Februari 2024, masa depanmu, masa depan bangsamu dan hari depan kita bersama ditentukan. Pada hari itulah, kedaulatan rakyat dilaksanakan dan disitulah harkat dan martabat setiap warga negara diuji, siapa yang kelak diberi kepercayaan olehmu, oleh kita, untuk memimpin perjalanan bangsa ini lima tahun ke depan. Turunlah ke bawah anak-anakku, dampingilah mereka hingga ke pintu-pintu bilik suara agar mereka terbebas dari rasa takut atau intimidasi untuk melaksanakan hak pilihnya sesuai bisikan hati nuraninya.

Demikian deklarasi ini disampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa meridai langkah-langkah kita untuk menjaga bangsa dan tanah air Indonesia yang kita cintai bersama.

Jakarta, 6 Februari 2024

Atas nama Seluruh Sivitas Akademika Universitas Negeri Jakarta

**Rilis Civitas Academica Universitas Negeri Malang:
“Menjaga Cita-Cita Proklamasi dan Reformasi”**

Tanggal rilis: Senin, 5 Februari 2024

**CIVITAS ACADEMICA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG MENYERUKAN
KEPADA PRESIDEN JOKOWI UNTUK MENJAGA
CITA-CITA PROKLAMASI DAN REFORMASI**

Mengawali seruan ini, izinkan kami mengutip seruan Bung Hatta, bapak proklamator kita, yang mengingatkan kepada kita semua, manusia Indonesia, tentang pengakuan kepada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, yang disampaikan pada saat menerima gelar doktor *honoris causa* dari Universitas Indonesia pada tanggal 30 Agustus 1975.

Pengakuan kepada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa mengajak manusia melaksanakan harmoni dalam alam, dilakukan terutama dengan jalan memupuk persahabatan dan persaudaraan antarmanusia dan bangsa. Pengakuan itu mewajibkan manusia di dalam hidupnya membela kebenaran dengan kelanjutannya: menentang segala yang dusta.

Pengakuan itu mewajibkan manusia di dalam hidupnya membela keadilan, dengan kelanjutannya: menentang atau mencegah kezaliman.

Pengakuan itu mewajibkan manusia di dalam hidupnya berbuat yang baik, dengan kelanjutannya: memperbaiki yang salah.

Pengakuan itu mewajibkan manusia di dalam hidupnya bersifat jujur, dengan kelanjutannya: membasmi kecurangan.

Pengakuan itu mewajibkan manusia di dalam hidupnya berlaku suci, dengan kelanjutannya: menentang segala yang kotor.

Pengakuan itu mewajibkan manusia di dalam hidupnya menikmati keindahan, dengan kelanjutannya: melenyapkan segala yang buruk.

Nilai-nilai yang ditegaskan oleh Bung Hatta tersebut selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang dirawat dan diperjuangkan oleh Universitas Negeri Malang dalam mengemban tugas membangun insan mulia, manusia Indonesia.

Memperhatikan:

1. bahwa kegelisahan masyarakat yang makin meluas yang membuat situasi berbangsa dan bernegara terasa sedang tidak baik-baik saja; dan
2. bahwa suasana kurang kondusif menjelang Pemilu 2024 yang dilandasi perasaan mendapatkan perlakuan tidak adil oleh sebagian besar masyarakat dan menyaksikan perilaku menabrak etika dan kepatutan, praktik penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta oligarki yang berkelindan dalam kekuasaan;

Kami, segenap *civitas academica* Universitas Negeri Malang menyatakan keprihatinan yang mendalam atas:

1. perilaku kurang terpuji yang mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan bermartabat;
2. praktik culas orang-orang yang mabuk kekuasaan yang mengoyak nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial; dan
3. perilaku yang menjauh dari nilai-nilai keberadaban, kejujuran, tanggung jawab, kekonsistenan, dan keteladanan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan pendidikan bangsa.

Oleh karena itu, kami, segenap *civitas academica* Universitas Negeri Malang menyerukan kepada Presiden Joko Widodo sebagai Bapak Bangsa agar:

1. bersikap lugas dan bertindak konsisten untuk

menegakkan sendi kehidupan bernegara yang demokratis, beradab, bermartabat, dan berkeadilan substansial, melampaui sekadar proses demokrasi formal dan prosedural;

2. mengembalikan kepercayaan sebagai pemegang kekuasaan yang selalu berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 demi keutuhan bangsa dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. menunjukkan sikap kenegarawanan dengan berdiri di atas semua golongan dan menjauhkan diri dari sikap partisan dalam Pemilu 2024 serta perilaku nepotisme dan oligarki dalam menyelenggarakan pemerintahan;
4. memelopori netralitas aparatur negara (ASN, TNI, dan Polri) dan menghentikan segala bentuk upaya yang mendukung dan memihak untuk pemenangan salah satu pasangan capres/cawapres; dan
5. menjadi panutan perilaku berakhlak mulia dan menjauhkan diri dari perilaku tidak terpuji dalam mengelola pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Dengan ini, kami menjunjung pentingnya keadilan, integritas, kredibilitas, dan transparansi dalam kepemimpinan nasional yang mampu dan setia memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Untuk itu, kami berharap Presiden Joko Widodo dapat memenuhi seruan ini demi Indonesia yang lebih baik, adil, berdaulat, dan maju.

Sumber: <https://kliping.um.ac.id/index.php/ini-isi-lengkap-seruan-civitas-academica-um-kepada-presiden-jokowi-untuk-menjaga-cita-cita-proklamasi-dan-reformasi/>, diakses 19 Maret 2024.

Rilis Guru Besar dan Civitas Akademika Universitas Negeri Surabaya: “Mengawal Demokrasi, Menjaga NKRI”

Tanggal rilis: Senin, 5 Februari 2024

DEKLARASI DAN PERNYATAAN SIKAP

GURU BESAR DAN CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

“MENGAWAL DEMOKRASI, MENJAGA NKRI”

Guru besar, sivitas akademika, dan alumni Universitas Negeri Surabaya (UNESA) melakukan deklarasi bertajuk ‘Mengawal Demokrasi, Menjaga NKRI’ di Laboratorium Merdeka Belajar, Kampus II Lidah Wetan, Senin, 5 Februari 2024.

Deklarasi itu dibacakan perwakilan guru besar kampus ‘Rumah Para Juara’ yaitu Prof. Dr. Setya Yuwana, M.A., yang sekaligus sebagai Ketua Senat Akademik Universitas (SAU) didampingi perwakilan sivitas akademika, jajaran dekan-wakil dekan, dan koordinator prodi selingkung UNESA.

Dr. Martadi, M.Sn., selaku koordinator menegaskan bahwa sudah menjadi komitmen dan tanggung jawab sivitas akademika yang menjadi *moral force* untuk memastikan dan menjaga agar dinamika politik tidak berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

“Kami turut memberikan kontribusi, memberikan spirit moral dan mengingatkan semua bahwa pemilu bukan segalanya. *Goal* akhir dari pemilu ialah menciptakan NKRI yang sejahtera, adil dan makmur untuk semua masyarakat,” ucap Direktur Lembaga Pendidikan dan Sertifikasi Profesi (LPSP) UNESA itu.

Martadi menegaskan bahwa seruan ini tidak ditujukan

kepada pihak, kelompok atau individu tertentu, tetapi sebagai pesan kepada seluruh masyarakat dan elemen bangsa untuk mengawal agar pesta demokrasi yang tinggal menghitung hari bisa berjalan aman, damai, jujur dan adil.

Semua pihak juga harus tetap pada koridor etik dalam mewujudkan demokrasi yang sehat, sehingga bangsa ini tetap bisa utuh dan pemilu mampu melahirkan pemimpin yang membawa bangsa ini ke cita-cita yang diharapkan bersama.

Pria kelahiran Ngawi itu, sekali lagi menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan dan mengajak seluruh pihak mensukseskan pesta demokrasi dan menjaga persatuan. Justru bisa menjadi persoalan ketika kampus diam saat melihat dinamika yang memicu perpecahan.

“Tugas kami adalah mengingatkan. Itu dijamin dalam undang-undang sebagai kebebasan akademik. Kami hari ini memanfaatkan kebebasan yang dijamin undang-undang itu untuk memberikan pesan moral kepada seluruh pihak, agar tetap dingin dan terjaga kebersamaan dan persaudaraan,” tegasnya. UNESA tidak ingin, lanjutnya, hanya karena pemilu, perbedaan pandangan dan pilihan politik lantas menimbulkan gejolak. Harganya terlalu besar yang harus dibayar ketika pemilu memecah belah bangsa.

Adapun pernyataan sikap guru besar, sivitas akademika, dan alumni kampus ‘Rumah Para Juara’ sebagai berikut:

Mencermati dinamika politik nasional pada proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan untuk mengawal tegaknya demokrasi, serta menjaga keutuhan NKRI menuju Indonesia Emas 2045, kami guru besar, sivitas akademika, dan alumni UNESA menyatakan sikap:

1. mendorong semua pihak untuk menjaga kebersamaan dan suasana kondusif demi terwujudnya demokrasi yang sehat berasaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. mendorong semua elemen bangsa memberikan teladan yang bijak dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan untuk suksesnya Pemilihan Umum 2024;
3. mendorong kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat negara dan pemerintah, TNI, dan Polri untuk menjaga netralitas dan tidak memihak dalam Pemilihan Umum 2024;
4. mendorong semua pihak untuk menghargai kebebasan akademik sebagai bagian dari otonomi kampus yang konstitusional, tanpa ada tendensi kepentingan politik, namun semata-mata untuk menjaga peradaban dan nilai-nilai demokrasi;
5. mengajak seluruh elemen bangsa untuk memberikan edukasi dan literasi politik kepada masyarakat sehingga terhindar dari informasi yang bersifat hoaks dan ujaran kebencian agar terwujud Pemilihan Umum 2024 yang jujur, adil, aman dan damai;
6. mengajak seluruh warga negara yang memiliki hak pilih untuk tidak golput, memilih sesuai hati nurani dan menghargai perbedaan pilihan.

Sumber: <https://www.unesa.ac.id/enam-poin-penting-deklarasi-unesa-mengawal-demokrasi-menjaga-nkri>, diakses 1 April 2024.

Rilis Universitas Sriwijaya: “Himbauan”

Tanggal rilis: Minggu, 4 Februari 2024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Jl. Palembang Prabumulih Km. 32 Indralaya
(OI), Kode Pos 30662 Telp. (0711) 5800645,
580069, 580169, 580275 Fax. (0711) 580644
Laman: www.unsri.ac.id

Nomor: 0001/UN9/SE.BUK.HT/2024

Palembang, 4 Februari 2024

Perihal: Himbauan

Kepada Yth.

Wakil Rektor I, II, III, dan IV

Dekan Fakultas dan Direktur Program Pascasarjana

Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala UPT

Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa

Universitas Sriwijaya

Mencermati situasi yang terjadi akhir-akhir ini terkait dengan situasi politik nasional menjelang Pemilihan Umum 2024, saya mengajak seluruh komponen Universitas Sriwijaya untuk tetap senantiasa menjaga keharmonisan dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas akademik. Sejalan dengan hal tersebut, izinkan saya menyampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Saya mengajak kita semua untuk senantiasa menjaga suasana kondusif dalam lingkungan Universitas Sriwijaya

(Rumah Kita Bersama) dengan mengedepankan keharmonisan dan menjunjung tinggi asas netralitas.

2. Mari kita dengan sungguh-sungguh menolak segala bentuk upaya provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan.
3. Seluruh komponen warga Universitas Sriwijaya agar senantiasa dapat menjunjung tinggi asas dan norma yang berlaku, selalu menunjukkan sikap *positive thinking* dalam menerima berbagai informasi yang beredar, serta selalu dapat menghindari penyebaran informasi yang belum tentu kebenarannya (harus berdasarkan pada data dan informasi yang sah/valid).
4. Mari kita selalu dapat menjaga suasana sejuk dan damai di lingkungan Universitas Sriwijaya, menunjukkan sikap yang saling menghormati, dapat menerima, dan menghargai bila terdapat perbedaan termasuk perbedaan dalam pilihan politik.
5. Dalam kerangka menjaga keutuhan dan keharmonisan Universitas Sriwijaya (Rumah Kita Bersama), saya mengajak seluruh komponen Universitas Sriwijaya untuk selalu dapat memperkuat tali silaturahmi dan menjaga persaudaraan di antara kita untuk mencapai kejayaan dan kecemerlangan kita bersama.

Demikian imbauan ini saya sampaikan, dengan harapan agar kita semua dapat menjadi insan akademis yang menjadi pelopor masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua dalam mengemban tugas dan fungsi di berbagai lini Universitas Sriwijaya yang sama-sama kita cintai.

Rektor

Taufiq Marwa

Rilis Civitas Akademika Universitas Tanjungpura: “Himbauan”

Tanggal rilis: Selasa, 6 Februari 2024

HIMBAUAN CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS TANJUNGPURA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Memperhatikan perkembangan dan dinamika politik menjelang Pemilihan Umum tahun 2024, segenap pimpinan Universitas Tanjungpura menyampaikan imbauan kepada keluarga besar Universitas Tanjungpura untuk:

1. Mengedepankan nilai-nilai akademis dan terus memelihara integritas di lingkungan Universitas Tanjungpura.
2. Menjaga situasi kondusif yang menjamin terselenggaranya kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas.
3. Menghormati perbedaan pilihan dan semangat demokrasi untuk menyukseskan Pemilu 2024 yang damai, serta menghindari penyebaran hoaks yang dapat mengganggu suasana harmonis yang merupakan perekat utama persaudaran dalam kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Barat khususnya dan di Indonesia pada umumnya.
4. Menyampaikan pendapat dan pemikiran kritis secara jernih, santun dan bertanggung jawab, berdasarkan data yang valid dan fakta yang akurat.
5. Memperkuat peran Universitas Tanjungpura sebagai lembaga ilmiah yang dapat memberikan kontribusi terbaik dalam menuju cita-cita memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sumber: <https://www.rri.co.id/pemilu/548124/civitas-akademika-untan-sampaikan-pernyataan-sikap-jelang-pemilu>, diakses 19 Maret 2024.

Rilis Universitas Padjadjaran: “Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat”

Tanggal rilis: Sabtu, 3 Februari 2024



**SERUAN PADJADJARAN
“SELAMATKAN NEGARA HUKUM YANG
DEMOKRATIS, BERETIKA DAN BERMARTABAT”**

“Ngadék sacékna, nilas saplasna”

(Konsistensi ucapan dan perbuatan, menjunjung kejujuran dan kearifan)

Peristiwa-peristiwa sosial, politik, ekonomi dan hukum belakangan ini adalah sebuah rangkaian dari menurunnya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Indeks Persepsi Korupsi yang semakin memburuk, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui penempatan pimpinan- pimpinannya yang tidak amanah, penyusunan *omnibus law* pengaman investasi yang prosesnya jauh dari partisipasi publik, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam syarat capres-cawapres dalam pemilu oleh Mahkamah Konstitusi serta berbagai indikasi dan potesi pelanggaran etika lainnya, adalah puncak gunung es dari diabaikannya kualitas institusi dalam proses pembangunan kontemporer di Indonesia.

Kualitas institusi adalah pilar dari peningkatan kesejahteraan. Pembangunan yang hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, tapi merusak

tatanan bernegara justru akan membuat mandeknya pertumbuhan ekonomi, memperdalam kemiskinan dan meningkatkan ketimpangan sosial dan budaya. Praktik kuasa untuk melegitimasi kepentingan segelintir elite akan berdampak pada kegagalan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang menjadi tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, alinea kedua yaitu:

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”.

Dari sini jelas bahwa kemakmuran hanya satu saja dari empat hal yang dicita-citakan pendiri bangsa. Selain kemakmuran (yang justru disebut terakhir), ada kemerdekaan, kebersatuan, kedaulatan, dan keadilan. Peristiwa politik belakangan ini mengganggu kelima cita-cita para pendiri bangsa tersebut. Terfokusnya kekuasaan secara elitis membuat kemakmuran belum dirasakan kebanyakan rakyat Indonesia.

Sementara itu, hukum sebagai pengatur, pembatas, dan rel yang seharusnya menjadi bintang pemandu, justru digunakan untuk menjustifikasi dan melegitimasi proses-proses kebijakan politik, ekonomi, sosial dan kebijakan lainnya yang bermasalah. Hal tersebut tidak lain karena adanya krisis kepemimpinan yang tidak beretika dan bermartabat. Adalah kenyataan hari ini, hukum hanya ditempatkan sebagai slogan normatif tanpa jiwa dan moralitas.

Berdasarkan kenyataan dan pemikiran di atas, sebagai bentuk tanggung jawab kaum intelektual, Kami Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran yang menjunjung Pola Ilmiah Pokok (PIP) “Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional” menyerukan agar

Presiden, para pejabat publik, kandidat capres-cawapres dan para elite politik serta masyarakat untuk turut bersama dalam “Penyelamatan Negara Hukum Yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat” dengan melaksanakan poin-poin sebagai berikut:

1. Pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945. Hukum tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten.
2. Presiden dan elite politik harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika. Bukan justru menjadi contoh melanggar etika, apa yang diucap tidak sesuai dengan kenyataan.
3. Negara dan pemerintah beserta aparaturnya harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu.
4. Mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam kontestasi Pemilu 2024 dengan memilih para calon berdasarkan kesadaran dan keyakinan yang sungguh, bukan atas dasar politik uang atau intimidasi.
5. Bersama-sama dengan seluruh masyarakat menjaga penyelenggaraan Pemilu 2024 agar kondusif, aman, dan bermartabat serta mengawal hasil penyelenggaraan Pemilu 2024 sampai terbentuknya pemerintahan baru sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.
6. Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya sekadar prosedur memilih pemimpin. Demokrasi harus dikembalikan pada jati dirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakan aturan main yang adil dan transparan, membuka ruang partisipasi yang substantif bagi publik untuk memperoleh informasi yang dapat

diandalkan dalam memberikan suara.

7. Mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah.

Semoga Allah SWT senantiasa meridai langkah-langkah kita untuk menjaga Indonesia bangsa dan tanah air tercinta.

Bandung, 3 Februari 2024

Rilis Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia:
“Petisi Bumi Siliwangi, Kampus Pejuang Pendidikan”

Tanggal rilis: Senin, 5 Februari 2024

PETISI BUMI SILIWANGI
KAMPUS PEJUANG PENDIDIKAN

Kami, Forum Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia, dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran moral menyatakan keprihatinan atas kondisi kebangsaan hari ini. Rentetan tindakan pengabaian etika, moral, dan nilai-nilai Pancasila serta pelanggaran norma konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditampilkan oleh para pejabat publik tanpa rasa malu, menjadi potret rusaknya bingkai kebangsaan dan kenegaraan hari ini.

Tindakan *cawe-cawe* dalam pemilu, pelanggaran politik dinasti, penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), penggunaan fasilitas negara dan politisasi bansos untuk kepentingan politik elektoral, serta pelanggaran netralitas oleh para pejabat publik dalam pemilu, menjadi gejala terdegradasinya nilai, moral, dan etika kebangsaan. Bahkan dengan penuh kesadaran dan kesengajaan, Bapak Ir. Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia secara terbuka menyatakan keberpihakannya dan keterlibatannya dalam kampanye politik pada Pemilu 2024.

Kami sangat menyayangkan sikap Presiden Republik Indonesia yang tidak mencerminkan kedudukannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang semestinya bersikap dan bertindak sebagai negarawan, teladan atau *role model*, serta pengayom bagi seluruh elemen masyarakat, bangsa, dan negara. Di samping itu, ketidaknegarawanan seorang Presiden Republik Indonesia tidak selaras dengan ajaran trilogi kepemimpinan dari Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, yakni “*Ing ngarso sung tulodo, Ing madyo mangun karso, Tut wuri*

handayani”. Artinya, tiga prinsip yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin ialah di depan memberi teladan, di tengah membangun ide atau gagasan, dan di belakang memberikan dorongan.

Sikap dan tindakan ini jelas tidak memberikan pendidikan politik kebangsaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika dibiarkan, kondisi ini tentu berpotensi dapat memberikan ekses buruk terhadap tidak terlegitimasinya penyelenggaraan pemilu, meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, dan yang lebih buruk dapat mengancam disintegrasi bangsa dan negara.

Atas dasar kondisi di atas, kami sivitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia menyatakan:

1. Mendesak Presiden Republik Indonesia agar mencabut pernyataan yang menunjukkan keberpihakannya dan keterlibatannya dalam kampanye politik pada Pemilu 2024.
2. Meminta Presiden Republik Indonesia agar bersikap dan bertindak sebagai negarawan yang menjunjung tinggi nilai, moral, dan etika kebangsaan berdasarkan Pancasila serta mengingat kembali sumpah dan janjinya sebagai Presiden Republik Indonesia sebagaimana amanat konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Meminta seluruh lembaga negara dan para pejabat publik agar komitmen untuk menegakkan etika kehidupan berbangsa sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
4. Mendesak Presiden Republik Indonesia dan para pejabat publik lainnya agar tidak menyalahgunakan kekuasaan dan menggunakan fasilitas serta sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis kampanye pemilu.

5. Mengajak seluruh elemen masyarakat, bangsa, dan negara untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu 2024 secara berkeadilan dan berintegritas sebagai wujud pendidikan politik kebangsaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Demikian pernyataan kami sampaikan sebagai upaya untuk menegakkan kembali nilai-nilai, moral, dan etika kebangsaan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bandung, 5 Februari 2024

Tertanda,

Forum Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia

Rilis Universitas Sebelas Maret Surakarta: “Pernyataan Sikap”

Tanggal rilis: Senin, 5 Februari 2024

PERNYATAAN SIKAP

Menyikapi situasi yang dinamis menjelang Pemilu Tahun 2024, rektor bersama senat akademik dan dewan profesor, menyatakan:

1. Mendukung terselenggaranya Pemilu Tahun 2024 secara demokratis, jujur, dan adil.
2. Berkomitmen menjaga kondusivitas kampus UNS untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi bagi semua warga UNS dan masyarakat.
3. Menghimbau kepada warga kampus UNS dan semua pihak untuk menghormati dan menghargai setiap perbedaan pandangan dan pendapat dengan menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan.

Demikianlah pernyataan sikap ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Surakarta, 5 Februari 2024

Plt. Rektor

**Rilis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Yogyakarta: “Menghadapi Pemilu Tahun 2024”**

Tanggal rilis: Rabu, 7 Februari 2024

PERNYATAAN SIKAP

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
“VETERAN” YOGYAKARTA**

MENGHADAPI PEMILU TAHUN 2024

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagai kampus bela negara yang didirikan oleh para veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dengan sesanti *Widya Mwat Yasa* dan semangat *Dharma Eva Hatto Hanti* senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan bangsa demi terselenggaranya pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan ini kami segenap sivitas UPN Veteran Yogyakarta menyatakan sikap:

1. Mengajak segenap komponen bangsa untuk bersatu demi terselenggaranya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Menghargai hak pilih setiap warga negara tanpa intervensi dan provokasi yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencederai pesta demokrasi.
3. Menyeru kepada seluruh masyarakat untuk tidak menyebarkan berita *hoax* dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu jalannya pemilu.
4. Mengimbau kepada seluruh warga negara yang mempunyai hak pilih, agar menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani.

Yogyakarta, Rabu, 7 Februari 2024

Rilis Universitas Siliwangi: “Deklarasi Pemilu Aman dan Damai”

Tanggal rilis: Rabu, 7 Februari 2024

UNIVERSITAS SILIWANGI

DEKLARASI PEMILU AMAN DAN DAMAI

Deklarasi pemilu damai yang digelar di depan Gedung Rektorat Unsil itu dibacakan langsung Ketua Senat Unsil Tasikmalaya, Prof. Dr. Deden Mulyana, S.E., M.Si, didampingi Rektor Unsil Tasikmalaya, Dr. Ir. Nundang Busaeri, M.T., IPU., ASEAN Eng serta sivitas akademika lainnya.

Dalam sambutannya, Rektor Unsil Tasikmalaya, Dr. Ir. Nundang Busaeri, M.T., IPU., ASEAN Eng mengatakan, apa yang dilakukan Unsil Tasikmalaya sesuai dengan dinamika yang ada pada akhir-akhir ini bisa menjadikan Pemilu 2024 ini aman dan damai.

“Kami dari Universitas Siliwangi yang kebetulan berada di Kota Tasikmalaya, *insyaAllah* akan menyampaikan deklarasi terkait dengan pemilu damai ini. Mudah-mudahan kalau hitungan hari, kalau gak 7 hari lagi tanggal 14 Februari 2024 akan mengadakan kontestasi pemilu terkait dengan pilpres dan pileg,” kata Nundang dihadapan awak media.

“Mudah-mudahan semuanya memberikan kontribusi yang positif, mudah-mudahan pemilu kita di tahun 2024 ini berjalan dengan aman, damai, lancar, dan bermartabat,” ujarnya.

Dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Senat Universitas Siliwangi menyerukan:

1. Mengajak segenap komponen bangsa untuk menyukseskan Pemilu 2024 yang aman, damai, santun

dan bermartabat.

2. Menolak segala bentuk upaya provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan serta tindakan yang menciderai pesta demokrasi.
3. Bersama-sama menangkal berita *hoax* dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu jalannya Pemilu 2024.
4. Warga negara yang mempunyai hak pilih, agar menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani, dan tidak golput. Kita harus menghargai perbedaan pilihan setiap orang.
5. Kampus bukan tempat memecah belah, sebaliknya Kampus menjaga kondusivitas dan turut memberikan edukasi kepada komponen bangsa demi terciptanya pemilu yang jujur, adil, aman dan damai.

Sumber: <https://tasikmalaya.inews.id/read/405077/deklarasi-pemilu-damai-2024-unsil-tasikmalaya-diwarnai-aksi-mahasiswa/2>, diakses 11 April 2024.

Rilis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa: “Rektor Untirta Mendukung Proses Demokrasi dan Mendorong Terciptanya Lingkungan Kampus yang Inklusif dan Demokratis dalam Pemilu 2024”

Tanggal rilis: Selasa, 6 Februari 2024

SIARAN PERS

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

REKTOR UNTIRTA MENDUKUNG PROSES DEMOKRASI DAN MENDORONG TERCIPTANYA LINGKUNGAN KAMPUS YANG INKLUSIF DAN DEMOKRATIS DALAM PEMILU 2024

Serang, 06 Februari 2024 - Setelah mengamati, dan mempertimbangkan dinamika politik menjelang Pemilihan Umum pada 14 Februari 2024, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, ST., MT., memandang perlu untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, Untirta berkomitmen mendukung proses demokrasi dan mendorong terciptanya lingkungan kampus yang inklusif dan demokratis. Rektor Untirta memberikan imbauan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024 secara berintegritas, demokratis, jujur dan adil dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, Rektor Untirta mengajak para kaum cendikia menjadi menara air yang mampu memberikan kesejukan dan pencerahan bagi masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam menyukseskan Pemilihan Umum 2024 yang damai dan berintegritas. Rektor Untirta mengimbau untuk menghormati dinamika politik sebagai bagian dari demokrasi, dimana setiap individu memiliki

hak konstitusional dalam menentukan sikap dan pilihan masing-masing.

Ketiga, Rektor Untirta menekankan bahwa melalui pemilu, sebagai akademisi harus menjadi teladan dalam menjaga prinsip prinsip demokrasi yang mendasari kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, Untirta mendukung penuh proses demokrasi ini sebagai bentuk komitmen memberikan layanan tridharma perguruan tinggi untuk mencetak generasi emas Indonesia yang unggul, utuh, berintegritas dan berdedikasi pada nilai-nilai kebangsaan.

Terakhir, memasuki masa tenang, diimbau kepada seluruh sivitas akademika Untirta dan seluruh elemen masyarakat dan komponen bangsa Indonesia, untuk bergotong royong, menjaga ketertiban, keamanan dan ketenangan dalam sikap, ucapan, pikiran dan tindakan. Sehingga Pemilu 2024, berjalan aman, damai, lancar dan berintegritas.

Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, ST., MT.

Rilis Sivitas Akademika Universitas Trunojoyo Madura: “Maklumat”

Tanggal rilis: Rabu, 7 Februari 2024

MAKLUMAT CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA

Sivitas akademika Universitas Trunojoyo Madura (UTM) mengibarkan bendera hitam sebagai wujud keprihatinan terhadap situasi politik saat ini. Aksi itu dilakukan di kampus mereka, Bangkalan, Jawa Timur, Rabu, 7 Februari 2024. Mereka berkumpul di taman kampus rektorat guna menyampaikan aspirasi keprihatinan yang sedang dialami bangsa ini.

Menurut elemen sivitas akademika UTM, dalam situasi seperti ini, kampus harus hadir untuk mengingatkan lebih intens kepada penguasa agar nalar kekuasaan bisa dijalankan dengan lebih sehat dan bersih.

Sivitas akademika juga menuliskan aspirasi dalam bentangan kain putih guna mengingatkan elite kekuasaan agar tetap bersih menjaga nalar. Acara ini juga di isi dengan penyampaian pendapat langsung dari *civitas academica* untuk perbaikan demokrasi dan pemilu bersih.

Aspirasi tersebut juga dituangkan dalam lima butir maklumat, yakni ikhtiarkan politik bersih; wujudkan pemilu yang aman, damai dan berintegritas; jaga marwah kekuasaan bermartabat prorakyat; menguatkan demokrasi yang menjunjung etika moral; dan memuliakan keadilan sosial.

Dalam aksi tersebut, juga dibacakan enam poin pernyataan sikap Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura (PSPK FH UTM).

Pertama, berdasarkan perspektif Pancasila sila ke-1 kami

berpandangan bangsa Indonesia berkeyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu, para penyelenggara negara sudah sepatutnya menerapkan nilai-nilai religiusitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kedua, berdasarkan perspektif sila ke-2 Pancasila, kami berpandangan bahwa nilai-nilai kemanusiaan sudah sepatutnya dilaksanakan oleh para penyelenggara negara termasuk dalam etika politik kebangsaan.

Ketiga, berdasarkan perspektif Pancasila, mari kedepankan sila ke-3 Persatuan Indonesia, kami menyuarakan bahwa pemilu sejatinya muara akhirnya adalah persatuan Indonesia bukan untuk memecah belah, maka perlu keteladanan kepala negara (Presiden) dan ketua lembaga negara untuk dalam posisi netral atau tidak memihak bahkan menyalahgunakan kewenangannya serta mengedepankan cita hukum (*rechtiidee*) Indonesia.

Keempat, pelaksanaan pemilu merupakan esensi dari Pancasila sila ke-4, maka kami berharap dalam Pemilu tahun 2024 ini, mari kita kembalikan dalam nuansa penuh hikmah dan kebijaksanaan bukan mementingkan kepentingan politik para penguasa.

Kelima, Pancasila Sila ke-5 mengamankan bangsa ini utamanya pemerintah mewujudkan keadilan sosial, maka kami berharap sudah sepatutnya pemimpin negara dapat bertindak adil bagi semua pihak dalam kontestasi Pemilu tahun 2024.

Keenam, berdasarkan perspektif konstitusi (UUD NRI tahun 1945), kekuasaan Presiden sangatlah besar, dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945, kemudian tidak terlampau jelas pembatasan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan tidak ada pula undang-undang lembaga kepresidenan, maka perlu di kedepankan TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Di akhir acara dilakukan pembacaan aspirasi dan deklarasi politik bersih yang dilakukan oleh perwakilan dosen dengan

tema Panggilan Hati (Pangesto Ateh Kanggui Indonesia) dari Madura untuk Indonesia.

Sumber: <https://nasional.tempo.co/read/1830962/universitas-trunojoyo-madura-kibarkan-bendera-hitam-wujud-keprihatinan-terhadap-situasi-politik>, diakses 7 April 2024

Rilis Guru Besar, Dosen dan Alumni Universitas Sumatera Utara

Tanggal rilis: Senin, 5 Februari 2024

PERNYATAAN SIKAP GURU BESAR, DOSEN, DAN ALUMNI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Pernyataan sikap diawali dengan menyatukan lagu Pada-Mu Negeri. Kemudian, dibuka oleh Guru Besar Fakultas Hukum USU, Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait.

“Hal ini sebagai upaya menjaga keutuhan hidup berbangsa dan bernegara serta menjaga suasana tertib, aman, dan damai selama dan setelah pelaksanaan pemilu,” kata Prof. Ningrum. Dalam pernyataan sikap tersebut, dibaca oleh Prof Dr Nurlisa Ginting, menyatakan bahwa akhir-akhir ini kami melihat keresahan di tengah-tengah masyarakat, sehubungan berbagai hal tentang berbagai gejala yang berkaitan dengan rusaknya nilai-nilai etika dan perilaku dalam sistem kehidupan perpolitikan dalam berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, dalam upaya untuk menjaga keutuhan hidup berbangsa dan bernegara serta terpeliharanya suasana tertib, aman dan damai dalam pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemilu 2024. Kami, beberapa Guru Besar, Dosen dan Alumni Universitas Sumatera Utara menyampaikan keprihatinan dan sekaligus pernyataan sikap sebagai berikut:

1. Presiden Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya mulai dari pemerintah pusat hingga daerah untuk bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
2. Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya untuk tetap netral, jujur dan adil, serta mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

3. TNI dan Polri untuk tetap netral, dan bekerja secara profesional dan maksimal untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk keprihatinan kami semua untuk dapat dilaksanakan demi keutuhan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta.

Sumber: <https://medan.viva.co.id/medan/4744-desak-presiden-netral-di-pemilu-2024-eks-rektor-usu-secara-moral-untuk-mengingatkan?page=all>, dikases 1 April 2024.

Rilis Intelektual Salatiga Peduli Bangsa: “Seruan”

Tanggal rilis: Rabu, 7 Februari 2024

SERUAN

INTELEKTUAL SALATIGA PEDULI BANGSA

Memperhatikan kondisi sosial politik bangsa dan negara Indonesia berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, kami Intelektual Salatiga Peduli Bangsa, yang terdiri dari para dosen, mahasiswa, peneliti, dan pemerhati bangsa, menyampaikan Seruan kepada seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Seruan ini dilandasi tanggung jawab moral intelektual untuk menjadi radar dalam menyikapi persoalan sosial politik yang berpotensi mereduksi penyelenggaraan Pemilu 2024 yang demokratis, berintegritas, dan menjamin keadilan.

Adapun Seruan kami sebagai berikut:

1. Penyelenggara negara (pusat dan daerah) seharusnya melindungi segenap bangsa Indonesia, melayani warga negara secara menyeluruh, mengutamakan keadaban dalam berpolitik, serta menghindari pelayanan yang diskriminatif.
2. Aparatur sipil negara, Polri, dan TNI harus menghindarkan diri dari upaya menggiring dan mengintimidasi warga negara untuk kepentingan kelompok tertentu yang berpotensi mereduksi peran sebagai pelayan masyarakat.
3. Partai politik peserta pemilu, calon anggota legislatif, pasangan calon presiden dan wakil presiden serta elite politik harus mengutamakan kesantunan dan moralitas dalam berpolitik, demi kohesivitas dan keutuhan bangsa dan negara.

4. Penyelenggara pemilu (utamanya KPU dan Bawaslu) mengedepankan pemenuhan akan asas penyelenggaraan pemilu, yaitu jujur dan adil, imparisial (mandiri), serta melakukan penegakan hukum pemilu yang konsisten.
5. Warga negara (utamanya pemilih) harus menggunakan hak pilih secara bebas dan bertanggungjawab, tidak terjebak pada kepentingan politik identitas, serta berperan aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu yang bersih, jujur, dan adil.

Salatiga, 7 Februari 2024

Kami, Intelektual Salatiga Peduli Bangsa

**ASOSIASI
PERGURUAN
TINGGI**

Rilis Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI)

Tanggal rilis: Sabtu, 10 Februari 2024

PERNYATAAN SIKAP APTISI JELANG PEMILU 2024

Pertama, mari bersama saling menjaga stabilitas kehidupan berdemokrasi berbangsa dan bernegara dengan tidak saling menyalahkan satu sama lainnya cenderung tendensius.

Kedua, mari bersama saling mengoreksi diri dan memprioritaskan mana yang lebih utama, untuk menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara, demi masa depan kehidupan demokrasi bangsa.

Ketiga, mari bersama mendorong *stakeholder* (pemangku kepentingan, red) terkait untuk mewujudkan reformasi partai politik, demi terwujudnya demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keempat, kepada seluruh pejabat kampus dan akademisi yang mempunyai kerabat, keluarga maupun saudara menjadi calon legislatif atau tim sukses salah satu calon, agar tidak membawa institusi pendidikan yang menyeret ke dalam politik praktis. Sehingga, marwah dan keutuhan kampus sebagai forum intelektual tetap terjaga.

Kelima, bagi seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang berjumlah 4.356, mari bersama berupaya untuk menurunkan suhu politik yang berpotensi memecah belah persatuan serta kesatuan bangsa. Menyosialisasikan kepada masyarakat demi terciptanya pemilu yang damai, penuh kegembiraan dan persaudaraan dengan mengedepankan kepentingan bangsa.

Keenam, mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih, untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilu dengan datang ke Tempat

Pemungutan Suara pada tanggal 14 Februari 2024. Menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani masing-masing tanpa intervensi dari pihak manapun, demi terwujudnya pemilu yang berkualitas, jujur, adil dan bermartabat.

Ketujuh, mengimbau kepada masing-masing pasangan calon dan para pendukungnya untuk menghentikan ujaran-ujaran kebencian, hoaks serta isu-isu lainnya yang dapat memecah bela persatuan dan kesatuan bangsa.

Kedelapan, siapa pun presiden dan wakil presiden yang terpilih nanti, APTISI menyerukan agar dapat menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan ide, cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada segenap komponen bangsa untuk bersatu mendukung presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu tahun 2024, sebagai hasil akhir dari pesta demokrasi saat ini.

Sumber:

<https://www.antaranews.com/berita/3957987/delapan-poin-pernyataan-sikap-aptisi-jelang-pemilu-2024>, diakses tanggal 19 Maret 2024.

**Rilis Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia:
“Dinamika Politik Menjelang Pemilu 2024”**

Tanggal rilis: Sabtu, 3 Februari 2024



PERNYATAAN SIKAP

REKTOR/KETUA PERGURUAN TINGGI

**ASOSIASI PERGURUAN TINGGI KATOLIK
INDONESIA TENTANG DINAMIKA POLITIK
MENJELANG PEMILU 2024**

Kami para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Katolik Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTIK) sangat resah dengan kondisi di tanah air tercinta atas rusaknya tatanan hukum dan demokrasi Indonesia menjelang Pemilu Serentak 2024.

Praktik penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi dan nepotisme serta penegakan hukum yang semakin menyimpang dari semangat reformasi dan konstitusi negara, telah mengoyak hati nurani dan rasa keadilan bangsa Indonesia.

Untuk itu, kami menyerukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan terhadap terselenggaranya Pemilu 2024 yang berkualitas, bermartabat, jujur dan adil:

1. Presiden dan segenap jajarannya harus menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik serta memegang teguh sumpah jabatannya sesuai tugas pokok dan

fungsinya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan memerangi kolusi, korupsi dan nepotisme serta melakukan penegakan hukum dengan tidak menggunakan sistem tebang pilih dan selalu menjunjung tinggi etika dalam bekerjanya.

2. Penyelenggara pemilu menjunjung tinggi asas pemilu yang luber jurdil untuk menjamin hak setiap orang yang memiliki hak pilih agar dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas sesuai dengan hati nuraninya tanpa mendapat tekanan dalam bentuk apapun.
3. Aparat negara baik aparat sipil negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Kepolisian Republik Indonesia (Polri) selalu bersikap netral dan tidak memihak pada pihak-pihak tertentu.
4. Negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak kebebasan berekspresi setiap warga negaranya sebagai bagian dari hak asasi manusia.
5. Mengutamakan pendekatan damai tanpa kekerasan dalam masa kampanye sampai dengan saat pelaksanaan pemilihan umum dan sesudahnya.
6. Semua perguruan tinggi di Indonesia terlibat aktif melakukan pemantauan dan pengawasan di saat pemilihan umum.

Surabaya, 3 Februari 2024

Rilis Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam Swasta se-Indonesia (BKSPITIS) – I: “Merespon Masalah Pendidikan dan Kebangsaan”

Tanggal rilis: 9 Maret 2023



BADAN KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI ISLAM SWASTA
(Inter-Islamic Universities Cooperation)
Se-Indonesia

PERNYATAAN SIKAP

BADAN KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI ISLAM SWASTA SE-INDONESIA (BKSPITIS)

MERESPONS MASALAH PENDIDIKAN DAN KEBANGSAAN

Tergerak dari kesadaran sebagai anak bangsa yang mendambakan Indonesia semakin maju, setelah memperhatikan perkembangan mutakhir kita dalam berbangsa dan bernegara, Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam Swasta se-Indonesia (BKSPITIS) perlu menyampaikan sikap sebagai berikut.

1. Mengajak perguruan tinggi Islam swasta untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, pendidikan, penelitian, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah serta meningkatkan kontribusi untuk penyelesaian masalah bangsa dan kemanusiaan dalam rangka menjadi perguruan tinggi yang bermartabat, baik di kancah nasional maupun global.

2. Mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih baik kepada penciptaan ekosistem pendidikan nasional yang mendorong kemajuan perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia melalui beragam kebijakan ungkitan dan afirmasi, terutama untuk PTS yang sedang berkembang.
3. Mengajak seluruh anak bangsa untuk melawan disinformasi dan misinformasi dengan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima dan tidak mudah terhasut serta menyebarkan informasi yang tidak benar (hoaks), yang dapat memfitnah dan menebar kebencian kepada *liyan*, mengadu domba sesama anak bangsa yang memicu keterbelahan sosial, dan bahkan membahayakan keselamatan jiwa.
4. Mendorong pemerintah dan kreator konten untuk hadir menguatkan kepedulian terhadap ekosistem media yang mencerdaskan publik agar kemajuan teknologi digital dapat memberikan manfaat terbaik.
5. Mendesak pemilik *platform* digital untuk tidak abai terhadap tanggung jawab sosial dan hanya berpihak pada kepentingan komersial dalam penyusunan algoritma media sosial yang menyebabkan menjamurnya konten sensasional yang miskin nilai.
6. Mengajak penyelenggara negara untuk menjamin Pemilihan Umum pada 2024 berjalan secara bermartabat dalam rangka menjaring para pemimpin yang berkualitas dan mengedepankan kepentingan bangsa.
7. Menyeru seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak tergoda dengan politik uang dan menggadaikan masa depan bangsa kepada mereka yang menghalalkan semua cara demi memenangkan kontestasi pemilihan umum.
8. Mendesak pemerintah untuk lebih serius melaksanakan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dengan menutup jurang ketimpangan ekonomi dan

menguatkan pemerataan kesejahteraan anak bangsa.

9. Mendesak seluruh penyelenggara negara di semua tingkatan untuk tidak mengkhianati kepercayaan rakyat dengan terlibat pada praktik korupsi yang merugikan keuangan negara, menurunkan kualitas layanan dan fasilitas publik, mengikis kepercayaan publik terhadap negara, serta menghambat pencapaian keadilan sosial.
10. Meminta pemerintah untuk menjamin bahwa supremasi hukum selalu berada dalam posisi tertinggi dengan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum untuk menjamin kesetaraan dan merawat rasa keadilan.

Demikian pernyataan sikap ini dibuat untuk menjadi perhatian pihak-pihak terkait, disusun dengan mempertimbangkan beragam aspirasi yang berkembang dalam Musyawarah Nasional XIII BKSPTIS yang berlangsung di Universitas Islam Indonesia pada 8-9 Maret 2023.

Yogyakarta, 9 Maret 2023

Rilis Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam Swasta se-Indonesia (BKSPTIS) – II: “Demokrasi dan Pemilu yang Bermartabat”

Tanggal rilis: Sabtu, 18 November 2023



BADAN KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI ISLAM SWASTA
(Inter-Islamic Universities Cooperation)
Se-Indonesia

SERUAN MORAL

BADAN KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI ISLAM SWASTA SE-INDONESIA (BKSPTIS)

DEMOKRASI DAN PEMILU YANG BERMARTABAT

Demokrasi bermartabat adalah prasyarat terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat. Hal ini dapat dicapai dengan menjaga iklim kebebasan berpendapat, menegakkan keadilan, menghargai keragaman, dan menjunjung kesetaraan.

Peran serta seluruh elemen bangsa mutlak diperlukan agar proses demokrasi tetap berjalan dengan inklusif dan menutup pintu terbentuknya oligarki kekuasaan. Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada 2024 menjadi momentum untuk dirayakan oleh segenap anak bangsa dan sekaligus menjadi ujian kedewasaan berdemokrasi di Indonesia.

Karena itu, kami Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam Swasta se-Indonesia (BKSPTIS):

1. Mendorong kontestan dan penyelenggara pemilu untuk senantiasa menjaga kejujuran dan mengedepankan

integritas.

2. Meminta penyelenggara negara agar menjaga netralitas dan tidak melibatkan mesin birokrasi dan sumber daya publik untuk mendukung kontestan tertentu.
3. Mendesak semua elemen bangsa untuk menghindari kecurangan dan menjunjung tinggi sportivitas.
4. Mengajak seluruh masyarakat untuk mengedepankan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan kelompok/golongan yang mengabaikan kepentingan bangsa Indonesia.
5. Menyeru masyarakat sipil untuk secara kolektif berpartisipasi aktif dalam pengawasan praktik berbangsa dan bernegara yang konstitusional dan menuju pada kesejahteraan sosial yang berkeadilan.
6. Mengajak seluruh pemilih untuk menggunakan hak pilihnya sebagai upaya mendapatkan wakil rakyat dan pemimpin bangsa yang terbaik.
7. Mengimbau anggota BKSPTIS untuk terlibat aktif dalam inisiatif pengawasan penyelenggaraan pemilu dan melakukan edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran berbangsa.

Demikian seruan moral ini disampaikan sebagai ajakan kepada pihak-pihak terkait dan wujud rindu BKSPTIS akan kedewasaan bangsa dalam berdemokrasi.

Pekanbaru, 4 Jumadilakhir 1445/18 November 2023

Rilis Forum Rektor Indonesia: “Deklarasi Pemilu Aman dan Damai Forum Rektor Indonesia”

Tanggal rilis: 3 Februari 2024

**DEKLARASI PEMILU AMAN DAN DAMAI
FORUM REKTOR INDONESIA**

Dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Forum Rektor Indonesia menyerukan:

1. Mengajak segenap komponen bangsa untuk sukseskan Pemilu 2024 yg aman dan damai.
2. Menolak segala bentuk upaya provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan serta tindakan yang mencederai pesta demokrasi.
3. Bersama sama menangkal berita hoaks dan ujaran kebencian yang dapat ganggu jalannya Pemilu 2024.
4. Warga negara yang mempunyai hak pilih agar gunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani dan tidak golput kita harus menghargai perbedaan pilihan setiap orang.
5. Kampus bukan tempat memecah belah sebaliknya kampus menjaga kondusivitas dan turut memberikan edukasi kepada komponen bangsa demi terciptanya pemilu yang jujur adil, aman dan damai.

Makassar, 3 Februari 2024

Tertanda Forum Rektor Indonesia

Sumber: <https://www.rri.co.id/pemilu/543263/deklarasikan-pemilu-damai-forum-rektor-suarakan-lima-poin> dan <https://tribrataneews-resbandaaceh.aceh.polri.go.id/forum-rektor-indonesia-mendeklarasikan-pemilihan-umum-pemilu-2024/>, diakses 11 April 2024

Rilis Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisiyiah: “Pernyataan Sikap”

Tanggal rilis: Jumat, 2 Februari 2024

PERNYATAAN SIKAP FORUM REKTOR PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH DAN AISIYIAH

Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisiyiah (PTMA) menyebut, dinamika politik menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, rakyat Indonesia disajikan berbagai perilaku elite politik yang tuna etika dan jauh dari nilai-nilai keadaban luhur.

“Proses demokrasi yang sudah dibangun sejak 25 tahun lalu, kini berjalan dengan penyimpangan yang tidak lagi sesuai dengan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia penegakan hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” terang Ketua Umum Forum Rektor PTMA, Prof Gunawan Budiyanto di kampus UMY, Jumat, 2 Februari 2024.

Kelompok kritis dan oposisi pun disingkirkan satu per satu dengan menggunakan produk hukum bernama UU ITE dan KUHP. Praktik kebebasan sipil dikebiri atas dalih stabilitas. KPK pun diperlemah melalui revisi UU KPK. Proses pembuatan sejumlah kebijakan dilaksanakan tanpa melibatkan publik secara luas, seperti yang terjadi pada UU Omnibus Law Cipta Kerja, UU Omnibus Law Kesehatan, dan UU Ibu Kota Negara (IKN).

“Karena itu, momentum 14 Februari 2024 harus menjadi momentum untuk melakukan kontrak politik baru antara rakyat dengan calon pemimpin atau elite politik baru dengan memilih calon pemimpin yang diyakini akan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang bermartabat,” kata dia.

Forum Rektor PTMA pun mengeluarkan enam pernyataan

sikap atas situasi pemilu yang berkembang saat ini.

1. Forum Rektor PTMA dengan melibatkan sivitas akademika seluruh kampus PTMA akan melakukan pengawalan sekaligus pengawasan terhadap jalannya proses masa kampanye pemilu hingga penghitungan dan penetapan suara di KPU sehingga memastikan pemilu terbebas dari berbagai tindakan pelanggaran maupun kecurangan.
2. Menyerukan kepada penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu hingga jajarannya di tingkat TPS untuk dapat menjaga integritas dan netralitas para petugasnya agar pemilu benar-benar berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Menyerukan kepada warga Muhammadiyah, terutama mahasiswa, dosen, dan karyawan di lingkungan PTMA untuk menjadi pengawas independen dan masing-masing TPS dan melaporkan kepada pengawas TPS dan Bawaslu jika terjadi pelanggaran dan kecurangan.
4. Meminta kepada semua aparat keamanan, kepolisian, militer, ASN, untuk bersikap netral selama proses Pemilu dan Pilpres 2024.
5. Meminta kepada presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati/walikota serta wakil bupati/wakil walikota untuk bersikap proporsional dengan mengedepankan etika selama proses Pemilu dan Pilpres 2024.
6. Memilih pemimpin yang memiliki komitmen kuat dalam pembuatan kebijakan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, mempunyai kepedulian terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia, berkomitmen dalam melakukan pemberantasan korupsi, dan menjamin kebebasan berpendapat.

“Kita berharap Indonesia dapat memiliki pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyat banyak untuk Indonesia

yang berkeadaban serta menjunjung tinggi etika di atas hukum dan kekuasaan,” tutup dia.

Sumber: <https://www.medcom.id/pemilu/news-pemilu/ObzP0m0K-forum-perguruan-tinggi-muhammadiyah-nyatakan-demokrasi-berjalan-menyimpang>, diakses 11 April 2024.

Rilis Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Tasikmalaya

Tanggal rilis: Rabu, 7 Februari 2024

FORUM PIMPINAN PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN SWASTA TASIKMALAYA

Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Tasikmalaya yang terdiri dari Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (STHG), Universitas Cipasung (Uncip), Universitas Perjuangan (Unper), Universitas Bakti Tunas Husada, Institut Nahdlatul Ulama (INU), Universitas Muhammadiyah (Umtas), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT, STIE Suryalaya dan lain sebagainya melakukan deklarasi Pemilu 2024.

Deklarasi Pemilu (Pemilihan Umum) aman dan damai ini dihelat di Hotel Santika, Rabu 7 Februari 2024 sore dan dihadiri para rektor perguruan tinggi tersebut.

Dalam deklarasi ini, Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Tasikmalaya menyerukan 5 poin agar Pemilu ini berjalan aman dan damai, yaitu:

1. Mengajak segenap komponen bangsa untuk menyukseskan Pemilu 2024 yang aman dan damai.
2. Menolak segala bentuk upaya provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan serta tindakan yang mencederai pesta demokrasi.
3. Bersama-sama menangkal berita *hoax* dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu jalannya Pemilu 2024.
4. Warga negara yang mempunyai hak pilih, agar menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani, dan tidak golput. Kita harus menghargai perbedaan

pilihan setiap orang.

5. Kampus bukan tempat memecah belah, sebaliknya kampus menjaga kondusivitas dan turut memberikan edukasi kepada komponen bangsa demi terciptanya pemilu yang jujur, adil, aman dan damai.

Sumber: https://radartasik.disway.id/read/666330/forum-pimpinan-perguruan-tinggi-tasikmalaya-deklarasi-pemilu-aman-dan-damai-ini-5-seruannya#google_vignette, diakses 11 April 2024.

Rilis Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia:
“Pentingnya Menjaga dan Memelihara Kondusivitas
Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Menghadapi
Pemilihan Umum Presiden R.I dan Pemilihan Legislatif
Tahun 2024”

Tanggal rilis: Rabu, 7 Februari 2024



**PERNYATAAN MAJELIS REKTOR PERGURUAN
TINGGI NEGERI INDONESIA (MRPTNI)
NO. 142/MRPTNI/II/2024**

TENTANG

**PENTINGNYA MENJAGA DAN MEMELIHARA
KONDUSIVITAS KEHIDUPAN BERBANGSA DAN
BERNEGARA MENGHADAPI PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN R.I DAN PEMILIHAN LEGISLATIF
TAHUN 2024**

Menjelang pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Umum Presiden R.I. dan Pemilihan Legislatif tanggal 14 Februari 2024, maka kampus dan sivitas akademika perguruan tinggi, turut serta menjaga terselenggaranya pemilu yang aman, damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia mengimbau;

1. Agar perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi, memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga netralitas dan imparialitas terhadap kontestasi Pemilihan Umum R.I. 2024, serta memelihara kondusivitas dan semangat demokrasi berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Senantiasa menempatkan kampus perguruan tinggi sebagai lembaga kontrol sosial melalui mimbar akademik yang bermartabat, menjunjung tinggi kebebasan berpendapat melalui mimbar aspirasi yang etik, santun, dan bertanggung jawab.
3. Menjunjung tinggi integritas dan etika akademik dengan bersikap terbuka, menggunakan data dan informasi yg benar dan obyektif, serta menghindari opini yang tidak berdasar, memaksakan kehendak, apalagi menghasut.
4. Agar segala bentuk perbedaan pendapat maupun sikap politik, tetap berada dalam koridor negara hukum berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yang dilandasi semangat persaudaraan di antara seluruh elemen bangsa.
5. Agar seluruh elemen bangsa Indonesia berpartisipasi aktif mendukung kelancaran seluruh tahapan proses Pemilu R.I. 2024, sehingga tercipta pemilu yang berintegritas melahirkan pemimpin yang mampu mewujudkan masa depan bangsa yang adil, makmur, berdaulat dan bermartabat sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa.
6. Agar seluruh elemen bangsa Indonesia senantiasa menempatkan kampus perguruan tinggi sebagai mimbar akademik yang menjunjung tinggi etika dan moralitas dalam penyampaian aspirasi dan menghindarkan dari segala bentuk kegiatan politik praktis.

Demikian sikap dan himbauan ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, dalam melaksanakan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang lancar, tertib, dengan semangat kerukunan dan persaudaraan. Amin YRA.

Jakarta, 7 Februari 2024

Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia
(MRPTNI)

Rilis Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi Yogyakarta - I:
“Pemilu Berkualitas dan Demokratis Bermartabat”

Tanggal rilis: Sabtu, 17 September 2022

**PEMILU BERKUALITAS DAN DEMOKRASI
BERMARTABAT**

Sebagai bangsa, kita harus bersyukur atas banyak perkembangan baik yang diraih oleh Indonesia di usia ke-77, meski tidak menutup mata bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang menunggu diselesaikan. Semuanya merupakan hasil kerja kolektif dan kumulatif para pendiri bangsa, pemimpin, dan rakyatnya. Rasa syukur itu diekspresikan untuk mewujudkan cita-cita sebagai bangsa yang berdaulat dengan berbagai cara, termasuk peningkatan komitmen pada pembangunan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pemastian keadilan sosial, penegakan hukum, dan pengawalan demokrasi yang bermartabat.

Demokrasi yang bermartabat, salah satunya, ditandai dengan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang berkualitas. Pemilu sebagai mandat reformasi menjadi pintu masuk pergantian dan keberlanjutan kepemimpinan dengan legitimasi moral dan sosial yang tinggi untuk kemaslahatan bangsa.

Pada 2024, Indonesia memasuki babak baru demokrasi dengan penyelenggaraan pemilu serentak secara nasional. Pemilu merupakan aktualisasi nilai, perjuangan kebangsaan, dan pembentukan konsensus demokrasi yang mulia. Jika berlangsung dengan baik, Indonesia akan menjadi contoh negara besar yang mampu berdemokrasi secara dewasa.

Berangkat dari kesadaran tersebut, kami para Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi Yogyakarta:

1. mengajak semua komponen bangsa untuk menjadikan pemilu sebagai media pendidikan politik guna pembangunan moral bangsa yang lebih mengedepankan

nilai kejujuran, keteladanan, dan keadaban kontestasi dalam sistem demokrasi, dan menghindari persaingan politik kotor demi kekuasaan semata;

2. menyeru seluruh komponen bangsa untuk menjamin pemilu berjalan secara partisipatif bagi seluruh bangsa Indonesia dan tidak dimonopoli oleh segelintir elite kelompok oligarki yang mengabaikan kepentingan publik;
3. mengajak seluruh komponen bangsa untuk menghindari politik biaya tinggi, mencegah politik uang, dan menolak nepotisme yang kian mendangkalkan makna pemilu;
4. mengajak seluruh komponen bangsa untuk menghindari jebakan penyalahgunaan identitas dengan politisasi agama, etnis, dan ras, yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan tidak berkesudahan yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa;
5. mendesak para elite politik, penguasa ekonomi, partai politik, dan penyelenggara pemilu untuk memberikan keteladanan, berintegritas, dan bermartabat dalam berdemokrasi sesuai konstitusi;
6. mendorong seluruh komponen bangsa menjadi warga merdeka yang tidak mudah terpengaruh hasutan, hoaks, dan ujaran kebencian, atau berbagai upaya lain yang menciptakan perpecahan dan pembelahan sosial yang sering terjadi dan berdampak buruk pada masyarakat;
7. menuntut partai politik untuk menjamin akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta memastikan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat;
8. mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan kritis dalam penyelenggaraan bernegara dan bermasyarakat sebagai bentuk kualitas kewarganegaraan.

9. mengajak semua komponen bangsa untuk tidak menggunakan kebebasan demokrasi secara manipulatif yang justru mencederai hak-hak orang lain atau melanggar konstitusi; dan
10. mengajak seluruh *civitas academica*, masyarakat sipil, dan media massa berperan aktif untuk melakukan edukasi publik guna meningkatkan literasi demokrasi dan kebangsaan, serta mengawasi jalannya kekuasaan.

Demikian seruan ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral demi menjaga persatuan, keadaban, dan kemartabatan bangsa Indonesia yang kita cintai.

Yogyakarta, 17 September 2022

Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi Yogyakarta

Rilis Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi Yogyakarta - II: “Mewujudkan Pemilu Damai, Jujur, dan Adil sebagai Penanda Demokrasi Berkualitas dan Bermartabat”

Tanggal rilis: Jumat, 24 November 2023

SERUAN MORAL

**MEWUJUDKAN PEMILU DAMAI, JUJUR, DAN ADIL
SEBAGAI PENANDA DEMOKRASI BERKUALITAS
DAN BERMARTABAT**

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Salam Sejahtera, Om Swasti Astu, Namo Budaya, Salam Kebajikan

Bangsa Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta anggota legislatif, pada 14 Februari 2024 mendatang. Sebagai agenda nasional, kita harus mengawalinya secara bersama-sama untuk memastikan berlangsung secara konstitusional dan memiliki legitimasi sesuai prinsip demokrasi.

Sebagai tradisi reguler dalam sistem demokrasi, pemilu memiliki makna penting untuk menjaga penyelenggaraan bernegara dan merawat tata pemerintahan demokratis demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dimandatkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu 2024 yang demokratis memiliki makna yang semakin penting, mengingat Indonesia masih menjadi salah satu referensi penting berjalannya sistem demokrasi, di tengah kemunduran ekstrem demokrasi di berbagai negara.

Di antara tahapan krusial yang akan segera kita sambut sebagai rangkaian penyelenggaraan Pemilu 2024 adalah kampanye pada 28 November 2023 sampai dengan 10

Februari 2024, sebagai wahana untuk sosialisasi dan pengenalan program politik, pengenalan kandidat dan partai politik dengan rencana kerjanya, sekaligus mengenali rekam jejak mereka.

Dalam rangka mendorong agar kampanye berjalan dengan damai, bermartabat, dan berkualitas, kami *civitas academica* menyerukan untuk:

1. Mewujudkan kampanye yang substantif dan berkualitas, ditandai dengan dialog yang dinamis dan konstruktif, proses interaksi untuk membangun konsensus tentang hal-hal strategis menyangkut masa depan demi kebaikan dan kemajuan Indonesia. (Rektor UII).
2. Mengedepankan kedewasaan sikap, pemikiran, dan kematangan politik para pemimpin dan kandidat dalam menyikapi dan mengelola segala perbedaan dan keragaman cara pandang sebagai realitas yang lumrah dalam peristiwa demokrasi. (Rektor UNY).
3. Menghindari sikap destruktif, tindakan sewenang-wenang, perilaku kekerasan yang merusak dan memecah belah komponen bangsa, menghindari dan mencegah ujaran kebencian, hoaks, fitnah, dan adu domba yang cenderung merugikan rakyat Indonesia dan mengorbankan kepentingan nasional karena itu bentuk kemunduran demokrasi. (Rektor USD).
4. Mendorong segenap kontestan pemilu, penyelenggara pemilu, dan aparatur negara untuk mengedepankan ketaatan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku, menjaga integritas dan kejujuran, bersikap adil, serta berkomitmen bersama demi mewujudkan pemilu bermartabat dan kredibel, sebagai kunci menjaga demokrasi yang berkualitas. (Ketua APMD)
5. Mengajak segenap komponen masyarakat sipil (insan akademik, jurnalis, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai pihak yang peduli dan berkomitmen) untuk berpartisipasi aktif bersama menjadi bagian dari upaya menyukseskan pemilu

sebagai agenda nasional, dengan cara-cara edukatif, mencerahkan dan kritis, sebagai bagian dari tanggung jawab merawat demokrasi Indonesia. (Rektor UIN Sunan Kalijaga)

Demikian seruan moral ini disampaikan sebagai ajakan untuk mengawal penyelenggaraan Pemilu 2024 agar berlangsung dengan damai, bermartabat, berkualitas dan bermakna bagi masa depan kebangsaan, demokrasi, dan kemanusiaan.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Yogyakarta, 24 November 2023

Rilis Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi se-Indonesia: “Seruan Jembatan Serong II”

Tanggal rilis: Senin, 5 Februari 2024

SERUAN JEMBATAN SERONG II

Demi Kehormatan Bangsa dan Negara

Pemilihan umum yang jujur dan adil adalah langkah penting dari setiap proses peralihan pemerintahan dan lembaga perwakilan di Indonesia, sejak Reformasi 1998. Dua asas ini bukan saja untuk menjamin setiap suara dihargai, melainkan lebih dari itu, sebagai ajaran etika politik kita.

Kepada segenap pemangku jabatan negara dan pemerintahan, khususnya kepada Presiden kami mengingatkan bahwa bersikap jujur dan adil adalah cara berpikir dan laku dalam bernegara. Kekuasaan yang dijalankan secara lancung akan merusak etika, kemudian hukum. Kami mengawasi, khususnya sejak Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan putra Anda menjadi calon wakil presiden, Anda makin menjauh dari harapan yang diamanatkan oleh pemilih Anda, terutama menyangkut netralitas sikap negara dan kontinuitas perjuangan Reformasi melawan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelbagai bentuknya.

Melanjutkan seruan yang pertama pada 27 November 2023 yang lalu (bernama “Seruan Jembatan Serong”), kami seluruh *civitas academica* serta Alumni Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi dari seluruh Indonesia, menyatakan sikap:

Negara ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggaran kekuasaan keluarga. Sesuai Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia berdiri agar setiap rakyatnya hidup “merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.” Dan, pemerintah negara dibentuk demi mencapai tujuan itu.

Berdasarkan itu, kepada segenap pemangku jabatan negara dan aparat pemerintahan kami serukan:

Pertama, ingatlah kembali sumpah jabatan Anda untuk berbakti kepada nusa dan bangsa serta memenuhi kewajiban Anda seadil-adilnya. Kami meminta Anda berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat dan fundamen moral kita.

Kedua, kembalikan keluhuran eksistensi Indonesia dengan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan para pendiri bangsa kita, bukan malah merusaknya lewat berbagai pelanggaran konstitusional dan akal-akalan undang-undang yang menabrak etika berbangsa dan bernegara. Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggaran kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, Anda bertanggung jawab kepada Tuhan.

Ketiga, kepada segenap warga Indonesia kami menyerukan agar memanfaatkan hak pilih Anda pada Pemilu 2024 secara bijak, dengan antara lain mencermati rekam jejak para calon presiden dan partai pendukungnya, dalam kesetiaan mereka pada penegakan HAM dan komitmen menghapus praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang telah merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Mari berdoa, berjuang dan bersaksi bagi pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia dan adil.

Akhirnya, kami informasikan bahwa pernyataan ini adalah bagian dari orkestra nasional demi supremasi moral, di atas urusan elektoral.

Jakarta, 5 Februari 2024

Atas nama Sekolah Tinggi Filsafat dan teologi se-Indonesia

Sumber: <https://ikadriyarkara.org/2024/02/05/seruan-dari-jembatan-serong-untuk-pemilu-yang-jurdil/>
diakses 15 Maret 2024

**KOMUNITAS
ALUMNI
LEMBAGA
PENDIDIKAN**

**Rilis Alumni Sapen (Alumni IAIN/UIN Sunan Kalijaga)
Bersuara: “Kondisi Mutakhir Bangsa Indonesia”**

Tanggal rilis: Jumat, 2 Februari 2024

**ALUMNI SAPEN BERSUARA TENTANG KONDISI
MUTAKHIR BANGSA INDONESIA**

Negara Indonesia dibangun oleh pergerakan rakyat dan organisasi-organisasi kebangsaan, keagamaan, dan kedaerahan yang beragam. Bangsa Indonesia lahir dari tetesan darah para mujahid dalam jumlah yang tak terhitung. Keberhasilan memproklamasikan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945, merupakan awal konsolidasi pembangunan bangsa pasca kehancuran yang dibuat oleh kolonialisme. Dalam perjalanan bangsa kita, ada beberapa riak-riak pengeroposoan dan pemberontakan, tetapi semuanya dapat dilewati, dan bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang bersatu, berpijak pada dasar konstitusi UUD 1945 dan Pancasila.

Di tengah keindonesiaan itu, IAIN (Institut Agama Islam Negeri) dan UIN (Universitas Islam Negeri, nama baru bagi IAIN) Sunan Kalijaga, yang berlokasi di Sapen, Yogyakarta, ikut intens terlibat dalam mencetak kader-kader bangsa yang memiliki kemampuan di bidang keagamaan sekaligus kebangsaan-kerakyatan-kemanusiaan-kecakapan, dan tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Banyak alumni IAIN/UIN Sunan Kalijaga Sapen menyadari tanggungjawab keilmuannya untuk ikut menyuarakan keberlangsungan nilai-nilai kebangsaan, kerakyatan, dan kemanusiaan, dengan berpijak pada konstitusi dan Pancasila, beserta UU lainnya; dan sekaligus banyak yang menjadi para profesional dan para pejabat publik di tengah masyarakat Indonesia.

Hanya saja, berita-berita yang beredar belakangan ini, tentang kegamanan netralitas ASN (aparatur sipil negara), adanya isu-isu *screenshot* karena berbeda pilihan

politik, dan absennya sivitas akademika dalam persoalan-persoalan penting penjagaan konstitusi, kebangsaan dan kerakyatan, juga karena ada indikasi-indikasi adanya kerawanan-kerawanan tertentu dalam pelaksanaan pemilu; dan perlunya diselenggarakannya pemilu jurdil tanpa kecurangan, dan persoalan-persoalan lainnya, menjadikan kami Alumni IAIN/UIN Sopen, mengajak:

1. para penyelenggara negara, dari yang paling bawah sampai yang paling atas (presiden) hendaknya memegang nilai-nilai kebangsaan dalam konstitusi dan Pancasila, memiliki *fatsoen* politik, dan memberi keteladanan, untuk bersikap netral agar kerawanan-kerawanan dalam pemilu dan setelah pemilu dapat diminimalisir, dan negara kita tidak terjerumus dalam kemerosotan yang membahayakan;
2. para penyelenggara pemilu (KPU sampai KPPS) dan pengawas pemilu (Bawaslu sampai pada tingkat bawah), hendaknya bersikap netral, adil, jujur, dan dapat dipercaya agar penyelenggaraan pemilu memiliki kualitas dan memiliki legitimasi yang kuat; dan agar Pemilu tahun 2024 tidak menjadi awal malapetaka bagi kehidupan bangsa kita yang majemuk;
3. kepada para alumni IAIN-UIN Sunan Kalijaga Sopen, Yogyakarta agar menggunakan ilmunya, dengan menjunjung etika keilmuan, dan menjadi pengemban kebenaran ilmu di mana pun mereka berada, tidak mudah tergerus oleh turbulensi politik-sosial untuk mengkhianati konstitusi dan nilai-nilai kebangsaan bersama yang dijunjung tinggi, berpegang pada *fatsoen* sebagai sarjana; dan bila mereka pejabat publik ASN, hendaknya bersikap professional, netral dalam pemilu (sebagaimana amanat UU), adil, jujur, dan dapat dipercaya agar tidak menjadi beban bagi bangsa dan ibu pertiwi;
4. kepada para pejabat, guru besar, dan sivitas akademika IAIN/UIN, agar membawa nama harum IAIN/UIN Sunan Kalijaga Sopen, Yogyakarta di mata masyarakat,

dengan kekuatannya untuk menyangga etika keilmuan, menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, konstitusi dan Pancasila, menjaga *fatsoen* sebagai pendidik dan penyelenggara pendidikan, dan ikut menegakkan-menyuarakan nilai-nilai kebenaran-keadilan di tengah masyarakat, meninggikan mutu dan kualitas demokrasi, penyelenggaraan birokrasi yang bersih, dan ikut menyuarakan pemilu yang jujur agar kehidupan bangsa kita di masa depan tidak mengalami kerawanan yang membahayakan, baik dalam masa pencoblosan ataupun pasca pencoblosan pemilu;

5. kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan umumnya, kami berharap menjadi bagian dari kekuatan sipil yang kuat, bebas dari teror dan ancaman, dan tidak saling memusuhi satu sama lain, dan bisa menyalurkan aspirasinya dengan bijaksana, dengan tetap menjalin persaudaraan dengan sesama tetangga, sahabat, dan komunitas yang berbeda aspirasi di dalam pemilu;
6. kepada semua peserta kontestan pemilu, hendaknya pemilu dijadikan sebagai sarana menjadi wakil rakyat dan pejabatan publik yang berintegritas, tidak menggunakan cara-cara kotor dan curang, agar kemenangan dalam pemilu adalah kemenangan bangsa dan tidak menyisakan problem-problem dan keruwetan yang membahayakan pasca Pemilu.

Apa yang kami harapkan ini adalah bagian kecil dari suara kami sebagai alumni IAIN/UIN Sunan Kalijaga Sapean, Yogyakarta, dan bagian dari komitmen keislaman, kebangsaan dan kerakyatan-keumatan yang Kami pelajari-pegang; dan lebih-lebih komitmen keilmuan-kesarjanaan yang kami emban. Semoga Allah memberikan kepada bangsa kita akan pemimpin-pemimpin yang negarawan dan bangsa Indonesia semakin manusiawi, adil, dan makmur.

Yogyakarta, 2 Februari 2024

Rilis Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta: “Menanggapi Situasi Bangsa Menjelang Pemilu 2024”

Tanggal rilis: Rabu, 7 Februari 2024

**PERNYATAAN SIKAP DPP IKAHUM ATMA JOGJA
MENANGGAPI SITUASI BANGSA MENJELANG
PEMILU 2024**

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (selanjutnya disebut “Ikahum Atma Jogja”) adalah organisasi independen yang dibentuk sebagai wadah mempererat, membina, dan memberdayakan kekeluargaan di antara sesama alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikahum Atma Jogja mencermati situasi perkembangan negara hukum dan demokrasi hingga menjelang Pemilu 2024 semakin mengalami kemerosotan dari sisi kualitas. Saat ini, Indonesia sedang mengalami ‘defisit’ demokrasi. Hal ini apabila kita cermat membaca berbagai rangkaian peristiwa dan/atau fenomena di antaranya: rendahnya kualitas penyelenggaraan pemilu yang ditandai dengan berbagai pelanggaran prosedural dan substansial; dugaan ketidaknetralan aparaturnya pemerintah; lemahnya kemampuan institusi negara memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM termasuk HAM perempuan; menyempitnya kebebasan sipil dan pembatasan partisipasi publik utamanya kelompok perempuan, rentan dan marginal dalam berbagai proses legislasi serta kebijakan publik; melemahnya institusi politik yang menopang sistem demokrasi, kooptasi institusi penegak hukum termasuk kehakiman, lemahnya akuntabilitas pejabat publik, termasuk masih para korupsi politik (bahkan dalam 10 tahun terakhir skor indeks persepsi korupsi hanya 34

(2023);

DPP Ikahum Atma Jogja berpandangan bahwa demokrasi kita akan rusak dan mengalami kemunduran (*setback of democracy*) apabila negara utamanya pemerintah tidak sungguh-sungguh berkomitmen pada penyelenggaraan pemilu berintegritas dan bermartabat berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Pemilu merupakan peristiwa penguatan demokratisasi dan kedaulatan rakyat. Peran pemerintah memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemilu berpedoman pada konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku, setiap orang memiliki hak untuk memilih secara bebas berdasarkan hati nurani dan tanpa tekanan dalam bentuk apapun, serta hak untuk dipilih dalam kompetisi yang sehat dan adil.

Atas dasar itu, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikahum Atma Jogja menyampaikan sikap, sebagai berikut:

1. mendukung Pemilu 2024 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil);
2. penyelenggara negara dan pemerintahan agar sungguh-sungguh menjaga integritas dan martabat pemilu dengan bersikap netral, tidak memihak pada pihak-pihak tertentu, dan tidak menyalahgunakan wewenang;
3. penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum memastikan semua warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dapat menjalankan hak pilihnya secara aman dan bebas dari tekanan siapapun;
4. partai politik dan para kontestan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD menjunjung prinsip-prinsip demokrasi dan penghormatan HAM dalam pelaksanaan pemilu;
5. negara mengutamakan pendekatan damai tanpa kekerasan dalam menangani dan mengatasi

permasalahan yang muncul pada saat kampanye sampai dengan saat pelaksanaan pemilu dan sesudahnya sesuai ketentuan yang berlaku;

6. mendorong partisipasi aktif warga negara termasuk anggota Ikahum Atma Jogja untuk menggunakan hak pilihnya secara bertanggungjawab dan memastikan pelaksanaan pemilu yang luber jurdil;
7. Dewan Pengurus Pusat Ikahum Jogja menghormati setiap sikap kritis anggota terhadap penyelenggaraan pemilu maupun dukungan anggota kepada kandidat atau partai politik tertentu sebagai bagian dari hak warga negara atas kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat dan berekspresi.

Jakarta, 7 Februari 2024

Rilis Ikatan Keluarga Alumni Unisma: “Matinya Demokrasi: Presiden Harus Sadar Diri”

Tanggal rilis: Sabtu, 3 Februari 2024

PERNYATAAN SIKAP

IKATAN KELUARGA ALUMNI UNISMA

“MATINYA DEMOKRASI: PRESIDEN HARUS SADAR DIRI”

Situasi demokrasi di Indonesia kian hari kian memprihatinkan. Perhelatan demokrasi dalam wujud pemilihan umum presiden, tidak ubahnya panggung sandiwara yang mempertontonkan arogansi Presiden. Pemilihan umum yang harusnya dijalankan dengan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan direayasa sedemikian rupa untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Segala sumber daya dan infrastruktur kekuasaan yang seharusnya diarahkan untuk menyejahterakan rakyat nyatanya digunakan untuk membangun dinasti dan mematikan demokrasi. Rakyat hanya dijadikan sebagai sarana untuk melegitimasi kekuasaan dan dibodohi dengan narasi-narasi yang tidak mendewasakan dalam berdemokrasi.

Kondisi darurat ini tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja. IKA-UNISMA sebagai bagian dari masyarakat sipil sangat prihatin dan menyayangkan adanya upaya mematikan demokrasi dan upaya mencederai pemilu. Atas dasar itulah IKA-UNISMA menyatakan sikap sebagai berikut:

1. mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia untuk bersatu memastikan agar demokrasi di Indonesia tidak dibajak oleh kepentingan oligarki dan dinasti;
2. mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan jujur, adil dan

- rahasia serta bebas dari praktik dan perilaku koruptif;
3. mendesak dan meminta Presiden sebagai penyelenggara tata kelola pemerintah bersikap netral atau tidak memihak salah satu pasangan calon dalam perhelatan Pemilihan Umum 2024;
 4. mendesak dan meminta Presiden sebagai kepala negara kembali fokus kepada tugas utamanya, yakni mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. mendesak agar lembaga-lembaga negara bersikap dan bertindak hanya untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Malang, 03 Februari 2024

Atas nama Ikatan Alumni Universitas Islam Malang (IKA-UNISMA)

Rilis Komunitas Pecinta Negeri Alumni SMA Kolese De Britto Yogyakarta: “Seruan Moral”

Tanggal rilis: Minggu, 4 Februari 2024

SERUAN MORAL

KOMUNITAS PECINTA NEGERI ALUMNI SMA KOLESE DE BRITTO YOGYAKARTA

Kami Komunitas Pecinta Negeri Alumni SMA Kolese de Britto Yogyakarta menyerukan:

1. Mendukung upaya semua pihak untuk memperkuat fondasi keindonesiaan kita yang berlandaskan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mendorong semua pihak untuk menuntaskan dan menyempurnakan cita-cita Reformasi Tahun 1998 dalam koridor demokrasi demi menjunjung tinggi penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dengan dilandasi prinsip *‘man for others’* dan penghormatan terhadap Hak-hak Asasi Manusia.
3. Mengajak semua pihak untuk menghormati hukum, etika, dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Mengimbau segenap penyelenggara negara untuk memajukan kehidupan demokrasi di Indonesia dengan senantiasa memulihkannya ketika terjadi gerusan kepentingan kekuasaan, yang di antaranya adalah dengan menghilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
5. Mengajak segenap elemen bangsa untuk bergandengan tangan bahu-membahu mewujudkan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang segenap warganya hidup sejahtera, adil dan makmur, serta senantiasa

berada dalam lindungan dan berkat rahmat Allah Yang
Maha Kuasa.

Seruan Moral disampaikan dalam rangka pesta nama de
Britto 4 Februari 2024.

**KOALISI
MASYARAKAT
SIPIL**

Rilis Aliansi GEMARAK (Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat): “Seruan Rawamangun, Selamatkan Republik”

Tanggal rilis: Rabu, 28 Februari 2024

ALIANSI GEMARAK
Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat
(*Aliansi Mahasiswa, Guru Besar, Dosen, dan rakyat Jabodetabek*)

SERUAN RAWAMANGUN
SELAMATKAN REPUBLIK

Bismillahirrohmaanirrohiim

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami meneriakkan salam perjuangan, hidup mahasiswa! Hidup Perempuan! Hidup rakyat Indonesia!!!

Bahwa sesungguhnya telah tercantum secara tegas dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Maknanya sejak Indonesia merdeka para pendiri bangsa ini secara sadar telah memilih jalan negara ini berbentuk negara republik, bukan negara kekuasaan (*machstaat*) apalagi negara kerajaan (*monarchy*). Sebagai negara republik atau dalam bahasa latin disebut *res publica* memiliki makna negara dibentuk untuk melayani publik, mendengarkan rakyat, mengutamakan kepentingan rakyat, melayani rakyat banyak, bukan melayani penguasa apalagi melayani elite predator.

Realitasnya semangat republik saat ini dirusak oleh para penguasa dan kelompok elite yang memanipulasi hukum dan merusak moral berbangsa dan bernegara. Etika tidak lagi dijunjung tinggi di hampir seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, elite nasional tidak lagi menjadi teladan. Faktanya memang berbagai pelanggaran

dan persoalan terus ditampilkan dalam episode kekuasaan saat ini, misalnya merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan indeks yang skornya hanya 34, kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) juga skornya merah hanya 3,2, celaknya para pelanggar HAM sampai saat ini tidak pernah diadili. Di sisi lain, sekitar 61 % masyarakat juga sangat khawatir dengan fenomena perubahan iklim akibat kerusakan lingkungan. Kondisi pendidikan juga berdasarkan data *Program for International Student Assessment* (PISA) kualitasnya saat ini terendah dalam 17 tahun terakhir, padahal anggaran pendidikan kini mencapai lebih dari Rp660 triliun.

Pada ranah demokrasi, indeks demokrasi kita juga masih masuk kategori cacat (*flawed democracy*), apalagi kini semakin cacat dengan tiadanya moralitas dalam proses elektoral 2024 sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/2023, yang kemudian diputuskan Ketua MK-nya melanggar etika berat. Indeks kebebasan sipil juga masih sangat memprihatinkan karena rapotnya masih merah skornya hanya 5,5, apalagi saat ini ketika pembungkaman dan represi masih terus dilakukan oleh aparat.

Di saat yang sama kondisi rakyat semakin menderita, di tengah situasi itu, konflik agraria masih terus terjadi, di antaranya banyak terjadi karena atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN), misalnya dari kasus Wadas hingga Rempang. Rakyat pada akhirnya makin menderita, kini harga kebutuhan pokok terus naik, harga beras dalam dua bulan naik hampir 10%, harga listrik dan BBM juga terus naik, biaya pendidikan dan kesehatan terus naik, angka pertumbuhan ekonomi stagnan dikisaran 5 % dan utang membengkak hingga mencapai Rp.8.004 triliun yang akan terus menjadi beban APBN dan rakyat banyak dari generasi ke generasi. Bahkan demi untuk kepentingan elektoral penguasa nekat memberikan atau memanfaatkan bantuan sosial dan menggelontorkannya menjelang hari pemilihan umum. Padahal, tidak ada rencana anggarannya dalam APBN 2024 yang digelontorkan untuk bulan Februari 2024 itu. Artinya, bantuan sosial menjelang hari pemilihan 2024 itu, sesungguhnya melanggar UU APBN dan UU

Kuangan Negara Nomor 17 tahun 2003.

Karena itu, Pemilu Februari 2024 adalah pemilu terburuk sepanjang 26 tahun terakhir yang hasilnya tidak memiliki legitimasi kuat. Secara terbuka sesungguhnya rezim saat ini terlihat menjalankan kekuasaan dengan model *autocratic legalism*, suatu kekuasaan yang mengemas dan memanipulasi undang-undang dan sejumlah aturan demi untuk kepentingan kekuasaan dan kepentingan segelintir orang, bukan untuk kepentingan demokrasi politik maupun demokrasi ekonomi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Kekuasaan yang seperti ini sesungguhnya adalah praktek nyata penyalahgunaan kekuasaan karena memuat unsur korupsi politik, kolusi dan nepotisme. Suatu praktik kekuasaan yang sesungguhnya melanggar Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Situasi salah urus negara yang kami kemukakan di atas, itu semua bermuara pada terjadinya pengabaian penguasa terhadap hal yang bersifat etik dan moral, meluasnya manipulasi hukum, pengabaian konstitusi dan pengkhianatan pada negara yang dilakukan oleh elite predator istana dan kroni-kroninya yang dampaknya sangat luas merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan merusak moral generasi muda, sebab penguasa terlihat mempertontonkan bahwa mengabaikan moralitas itu tidak apa-apa, melanggar etika berat itu tidak apa-apa. Ini berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara. Karena negara berjalan tanpa panduan moral. Saudara-saudara negara yang berjalan tanpa panduan moral dalam mengelola negara pada akhirnya akan terjerumus pada jurang kehancuran. Rezim yang tidak bermoral berarti ia telah menghancurkan negara ini. Tentu ini menimbulkan kegelisahan kolektif. Kami keluarga besar sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang terdiri dari mahasiswa, dosen dan guru besar merasakan kegelisahan rakyat banyak itu. Sebagai Kampus Rawamangun yang sejak

15 September 1953 sebagai “*the city of the intellect*” yang terus merawat toga keilmuan dan memelihara integritas moral dan etika keilmuannya, maka kami tidak akan tinggal diam melihat keadaan ini.

Kami kemudian berkonsolidasi dengan berbagai kampus dan rakyat di wilayah Jabodetabek dan kami sepakat untuk menyampaikan Lima Seruan Rawamangun sebagai berikut:

1. Tata kelola kebutuhan pokok rakyat memasuki episode sangat buruk, kami menuntut kepada pemerintah untuk segera turunkan dan stabilkan harga kebutuhan pokok dan menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama kami semua untuk menyuarakan hal yang sama, turunkan harga!
2. Masyarakat semakin menderita, penguasa sibuk mempertahankan kekuasaanya, di saat yang sama kebutuhan penting untuk masa depan rakyat diabaikan yaitu pendidikan dan kesehatan, sebab biaya pendidikan dan kesehatan kini semakin mahal. Karena itu, turunkan biaya pendidikan dan kesehatan sekarang juga!
3. Penguasa yang tidak mengindahkan moral dan etika dalam bernegara sangat penting untuk diberikan hukuman berat agar memberi efek jera kepada siapapun penguasa berikutnya.
4. Kami menilai Presiden Joko Widodo adalah presiden yang tidak mengindahkan moral dan etika dalam mengelola negara, telah nyata-nyata menumbuhsuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), memanipulasi hukum, dan bahkan melanggar undang-undang maka Joko Widodo harus diberikan hukuman berat yaitu mundur dari jabatnya!
5. Menyerukan kepada seluruh sivitas akademika (mahasiswa, dosen dan guru besar) yang ada di berbagai kampus di Indonesia serta kepada seluruh rakyat Indonesia apapun profesinya, kita bersama-sama untuk bersatu menyelamatkan Republik Indonesia. Salah satu

cara untuk menyelamatkan Republik Indonesia adalah dengan bersuara dengan suara yang sama dan lantang bahwa Joko Widodo harus mundur. Jika tidak mau mundur, maka kita bersuara dengan suara yang sama Makzulkan Jokowi!

Demikian Seruan Rawamangun ini kami sampaikan, tidak ada niat lain kecuali kami semua menginginkan agar Indonesia betul-betul menjadi negara republik, negara yang melayani rakyatnya!

Jakarta, 28 Februari 2024

(ALIANSI GEMARAK)

Rilis Forum Cik Di Tiro - I: “Sistem Anti Korupsi Dilumpuhkan, Hak Asasi Manusia Diberangus, Demokrasi Dimatikan”

Tanggal rilis: Minggu, 10 Desember 2023

SISTEM ANTI KORUPSI DILUMPUHKAN, HAK ASASI MANUSIA DIBERANGUS, DEMOKRASI DIMATIKAN

Refleksi Forum Cik Di Tiro, 10 Desember 2023

Terjadi kelumpuhan sistem dan gerakan anti korupsi. Indikatornya antara lain, tidak terbatas pada, amendemen undang-undang yang menempatkan KPK di bawah kekuasaan eksekutif; keterangan mantan ketua KPK, Agus Raharjo, yang diminta Presiden untuk menghentikan penyidikan perkara korupsi oleh Ketua DPR, Setya Novanto; ketua KPK, Firli Bahuri, telah ditetapkan sebagai tersangka pemerasan terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi; dan pemakaman seorang terpidana korupsi di taman makam pahlawan di Batu, Malang.

Terjadi pemberangusan hak asasi manusia. Indikatornya antara lain, tidak terbatas pada, pemberangusan kebebasan sipil, seperti yang menimpa Haris Azhar dan Fatia; pembangunan infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional dengan mengambil properti rakyat dan penggunaan kekerasan; *land grabbing* secara melawan hukum; lingkungan yang dirusak untuk kepentingan bisnis perkebunan dan pertambangan; hak kelompok minoritas terganggu, misalnya komunitas penghayat kepercayaan; dan kriminalisasi aktivis lingkungan yang memperjuangkan tanah dan ruang publiknya.

Terjadi kematian demokrasi. Indikatornya antara lain, tidak terbatas pada, “cawe-cawe” presiden bukan untuk kepentingan bangsa, tetapi untuk anaknya; narasi publik dibajak untuk kepentingan oligarki politik ekonomi

dan kekuasaan; hukum digunakan untuk membajak demokrasi; hukum digunakan untuk menundukkan suara kritis publik; hukum digunakan untuk kepentingan kekuasaan; gagasan publik diganti dengan gimik; mobilisasi tokoh publik termasuk tokoh gerakan sosial dan kaum intelektual untuk kepentingan kekuasaan dan pelemahan gerakan rakyat; penggunaan aparatur keamanan untuk menundukkan masyarakat; *over masculinity* dan peminggiran suara perempuan dalam penyelesaian kasus-kasus publik; menurunnya indeks kebebasan pers ditandai, salah satunya, dengan kekerasan terhadap jurnalis; desentralisasi pemerintahan direbut dan diubah menjadi sentralisasi; TNI/Polri menyatu kembali dan berpotensi digunakan untuk kepentingan rezim; lembaga negara independen tidak lagi independen; prinsip *rule of law* hancur; penegakan hukum tidak bisa dibedakan dengan penegakan kepentingan politik; dewan perwakilan rakyat diisi oleh pengusaha dan artis, minus aktifis sosial publik; kesetaraan hak politik dirampas; sistem ekonomi yang sepenuhnya pro oligarki; terjadi kapitalisme kroni yang kronis; tertutupnya akses masyarakat miskin pada sumber ekonomi; dan arus modal mengalir ke sektor ekstraktif dan mematikan sektor industri publik.

Mari bergerak untuk membersihkan Indonesia dari korupsi, menghormati hak asasi manusia, dan menghidupkan demokrasi.

Rilis Forum Cik Di Tiro - II: “Selamatkan Indonesia, Menolak Lupa, Melawan Ketamakan Berkuasa”

Tanggal rilis: Jumat, 29 Desember 2023

REFLEKSI AKHIR TAHUN 2023

FORUM CIK DI TIRO, 29 DESEMBER 2023

SELAMATKAN INDONESIA, MENOLAK LUPA, MELAWAN KETAMAKAN BERKUASA

Refleksi Umum

Kami menyatakan keprihatinan mendalam atas berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi sepanjang tahun 2023. Kasus-kasus itu meliputi berbagai isu sektoral: kebebasan berekspresi, hak warga atas tanah, keadilan agraria, kedaulatan pangan, pekerja rumah tangga, kebebasan pers dan jurnalistik, korupsi ekonomi dan politik, pelanggaran hukum, dll. Terakhir, kami menyatakan terjadinya musim gugur demokrasi (amanat Reformasi 1998) pasca kebijakan Presiden Jokowi yang merawat nepotisme, menerabas Mahkamah Konstitusi, melanjutkan represi digital. Jokowi telah membunuh demokrasi melalui ketamakan dan kehausan berkuasa (*greedy and hungry power*) untuk kepentingan keluarga, bukan bangsa.

Berdasarkan beragam kasus pelanggaran HAM dan anti-demokrasi yang akan diuraikan dalam dokumen ini, kami menilai telah terjadi senjakala demokrasi, kembalinya otoritarianisme dalam bentuk/formula baru melalui aksi *manufacturing consent* (Ed Herman & Noam Chomsky, 1988), dan menguatnya oligarki politik ekonomi, melalui berbagai proyek pembangunan infrastruktur, monopoli kepemilikan media, dll. Berbagai indeks global yang merujuk pada nilai-nilai demokrasi, seperti indeks kebebasan pers, indeks keterbukaan informasi, indeks demokrasi Indonesia secara umum terus menurun (misalnya: skor IKP Indonesia diatas 100, lebih buruk dari Timor Leste dan Malaysia).

Kami melihat menguatnya intervensi politik atas lembaga penegak hukum oleh petahana presiden, meningkatnya kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara di tingkat kementerian/lembaga, oligarki ekonomi minus kemandirian politik, ketiadaan etika bernegara. Pembangunan ekonomi menjadi target utama dan satu satunya, minus/mengabaikan pembangunan peradaban, sosial, agama, pendidikan, kebudayaan. Terjadi konflik kepentingan DPR yang lebih memposisikan sebagai pemberi kerja daripada sebagai wakil rakyat. Sikap kenegarawanan yang mengedepankan kepentingan publik dan demokrasi makin tipis.

Kami melihat semakin melemahnya jaminan atas kebebasan bersuara dan menyampaikan pendapat, yang menyebabkan/melemahkan tingkat kritis masyarakat sipil sebagai amunisi demokrasi yang sehat. Kasus Haris dan Fatia adalah salah satu bentuk nyatanya. Menyusul disrupsi digital, terjadi penyempitan ruang kebebasan berekspresi di media digital bagi warga negara, diikuti pandemi *hoax*/disinformasi. Kekerasan digital terhadap aktivis sosial dan jurnalis investigator juga terus meningkat. Di sektor komunikasi, terjadi pemusatan kepemilikan media oleh oligarki politik yang menghambat keragaman kepemilikan dan opini politik. Politisasi dan pelemahan kinerja regulator media (komisi penyiaran, dewan pers, komisi informasi, dll) melumpuhkan posisi mereka sebagai pilar pers.

Selama periode kedua rezim Jokowi, terdapat fenomena penggunaan *buzzer* dan *influencer* serta *cybertroop* oleh elite politik termasuk Jokowi untuk menekan perbedaan pendapat, pembiaran atau impunitas atas pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil oleh rezim Jokowi, dan secara umum pelanggaran berjamaah atas berbagai peraturan perundangan di bidang media, seperti UU Penyiaran No 32/2022. Puncaknya, penerapan UU Cipta Kerja Tahun 2020 telah menerabas hak hidup media lokal, menunjukkan prioritas Rezim Jokowi pada stabilitas ekonomi dan keamanan terpusat, bukan pada hak hak dasar warga lokal.

Sepanjang periode pemerintahan kedua Jokowi, terdapat

pola umum keberpihakan pada rakyat telah tergantikan dengan jaminan kemudahan bagi investor kapitalis. UU Cipta Kerja dan revisi UU Kesehatan adalah dua dari sekian produk hukum yang menguatkan hal di atas, termasuk inkonsistensi dengan produk hukum lain seperti UU Disabilitas yang juga disahkan dalam periode pemerintahan yang sama. Secara khusus, laporan Formasi Disabilitas telah menunjukkan tidak membaiknya implementasi kebijakan inklusi difabel, serta ditemukan masih terjadinya diskriminasi difabel di berbagai sektor mengkonfirmasi hal tersebut.

Kami juga melihat, lemahnya dukungan terhadap pemberantasan korupsi, upaya sistematis pelemahan KPK melalui Revisi UU KPK dan tes wawasan kebangsaan, dll. Terkini, tragedi di Mahkamah Konstitusi yang identik menjadi “Mahkamah Keluarga”, dikonfirmasi oleh putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai penanda begitu lemahnya komitmen terhadap penegakan hukum dan keadaban politik.

Kasus-Kasus Struktural

Berikut ini beberapa isu sektoral selama pemerintahan periode kedua Jokowi:

Kebebasan sipil menyempit. Represi terjadi tanpa henti. Praktik kekerasan oleh aparaturnegara (Polisi salah satunya) kian merajalela. Kondisi ini tampak dalam kasus Kanjuruhan, aksi Reformasi Dikorupsi (2019), aksi tolak *Omnibus Law* (2020), kasus Wadas (2021), Rempang (2023), dst. Pelarangan penyelenggaraan diskusi di kampus juga terjadi. Tambahan lagi, orang-orang yang bersuara kritis terhadap kekuasaan diupayakan untuk dikriminalisasi. Terkini: Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan yang melanggar asas umum penyelenggaraan negara, 19 Desember 2023.

Kekerasan dalam wilayah hukum acara pidana, seperti saat penangkapan, penyelidikan atau penyidikan. Kasus yang menimpa lima orang terdakwa di Pengadilan

Negeri Yogyakarta, bisa jadi salah satu contoh. Pada awal 2022, mereka ditangkap polisi. Tuduhannya, melakukan kekerasan (klitih), di Gedongkuning. Padahal, faktanya mereka tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan. Bahkan, ketika kejadian mereka tidak berada di TKP. Lima anak muda itu disinyalir kuat adalah korban salah tangkap polisi dan peradilan sesat. Saat penangkapan, di kantor polisi mereka diduga mendapat kekerasan dan dipaksa mengaku.

Perampasan tanah, kerusakan lingkungan dan pemberangusan hak-hak ekonomi warga dengan dalih pembangunan untuk kepentingan umum dan investasi. Tiga isu ini tercermin paling tidak pada kasus-kasus yang terjadi di D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah selatan, diantaranya: pembangunan bandara YIA Kulonprogo, rencana penambangan batu andesit di Wadas untuk pembangunan bendungan Bener, pencemaran lingkungan karena PLTU di Cilacap, penggusuran PKL Malioboro, dll.

Legalisme otokratis seperti pengesahan KUHP baru yang menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden, penggunaan UU Pengadaan Tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum untuk menggusur tanah rakyat, legitimasi pembangunan dengan Perpres tentang PSN bahkan Perma, UU Minerba yang mengkriminalisasi pihak-pihak yang menolak tambang, dll.

Sejumlah kasus lain di DIY yang mengancam kebebasan berekspresi: penutupan patung Bunda Maria, kasus pembunuhan Udin yang mangkrak, pelarangan acara Festival Keadilan di UIN Yogyakarta, penghilangan paksa Wiji Thukul, dkk. 1997-1998, disusul PHK jurnalis dan krisis independensi media pada tahun pemilu.

Secara umum, kami melihat sistem politik yang makin monopolistik dan oligarkis, penggunaan paradigma hukum represif dan hukum otoritarian, penyusunan kebijakan negara yang bersifat monolitik: satu subyek (bertolak dari penguasa), satu makna (menurut konsep penguasa), satu tindakan (yang diingini penguasa) dan satu

akibat (sesuai target penguasa), politik hukum (pembuatan dan pelaksanaan hukum) yang tidak berpijak pada asas kedaulatan rakyat, melainkan berpihak pada kepentingan ekonomi, investasi dan yang menguntungkan kroni-kroni di lingkaran kekuasaan. Secara khusus, kami melihat tidak ada perspektif keadilan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hak terhadap *Pekerja Rumah Tangga* (PRT) termasuk masih kuatnya feodalisme dan hirarki di kalangan pemerintah, DPR dan aparat penegak hukum (APH). Tidak adanya perspektif hak asasi manusia dan HAM perempuan serta keberpihakan pada korban dari pemerintah dan APH dalam penanganan kasus-kasus PRT. Pemerintah lebih memperhatikan praktik perdagangan orang di luar negeri dari pada yang terjadi di Indonesia terlebih pada PRT.

Sistem politik ekonomi hari ini adalah manifestasi politik patriarki, yang menciptakan lapisan struktur kuasa yang timpang sehingga memperparah ketidakadilan dan menindas perempuan serta kelompok marjinal lainnya, yang pada akhirnya memiskinkan kaum perempuan di Indonesia. Politik patriarki berkepentingan untuk memberikan keuntungan dan kuasa pada segelintir orang dan atau kelompok, dengan mengorbankan mayoritas orang lainnya, terutama perempuan. Penguasaan dan pengontrolan atas tubuh, hidup dan sumber kehidupan perempuan, telah merampas kedaulatan perempuan atas tubuh, cara pandang, dan ruang gerak perempuan termasuk ruang hidup perempuan.

Kasus pembunuhan jurnalis Udin tidak pernah terungkap. Penyebabnya, Presiden Jokowi telah abai dan tidak fokus kepada penegakan hukum yang berkeadilan. Janji Jokowi tuntaskan kasus Wiji Thukul dkk. hanya berhenti sekadar janji pada saat pemilu. Kasus Menteri Perdagangan yang melanggar asas umum penyelenggaraan negara, skandal partisan ketika membuka acara Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar se-Indonesia di Semarang, 19 Desember 2023 telah menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi abai asas akuntabilitas di UU 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Terkait aksi-aksi

pelemahan KPK, ini menunjukkan Jokowi tidak memiliki komitmen dalam agenda pemberantasan korupsi, tercermin dari hasil revisi UU KPK yang berdampak KPK tidak lagi independen (masuk rumpun eksekutif), operasi jahat tes wawasan kebangsaan yang memiliki agenda menyingkirkan pegawai KPK berintegritas. Dalam tindak kekerasan selama pelaksanaan proyek strategis nasional pembangunan bandara YIA, aparat kepolisian malah menjadi “aktor pelaku kekerasan”/menjadi centeng. Kasus ini sudah pernah dilaporkan ke Polda DIY, namun tidak ada kejelasan proses hukum.

Rincian Beberapa Kasus Struktural di DIY:

1. Gangguan diskusi dugaan salah tangkap klitih Gedong Kuning

Tepatnya pada Senin, 27 Februari 2023, saat Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menggelar diskusi publik tentang dugaan salah tangkap kasus klitih Gedongkuning di Kafe Main-Main Yogyakarta. Acara itu menghadirkan sejumlah pembicara, yaitu aktivis HAM, Haris Azhar, Ketua AJI Yogyakarta, Januardi Husin dan Ketua PBHI Nasional, Julius Ibrani. Diskusi bertajuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dugaan salah tangkap pelaku kasus klitih itu sempat berlangsung beberapa saat, tetapi kemudian pihak Kafe Main-Main meminta penyelenggara mencopot tiga spanduk yang dipasang di area diskusi. Pihak manajemen kafe berdalih bahwa pencopotan tersebut permintaan dari kepolisian setempat melalui sambungan telepon. Acara sempat terhenti sejenak karena peserta dan penyelenggara bersikukuh menolak pencopotan spanduk tersebut. Namun, penyelenggara akhirnya mengalah dengan mencopot tiga spanduk tadi agar diskusi tetap bisa berlangsung. Apa yang terjadi di saat itu adalah ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Negara telah menjami kebebasan warganya dalam berkumpul dan menyampaikan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Tidak boleh ada pihak yang berusaha memberangus kebebasan berekspresi seseorang,

apalagi terkait dengan isu sensitif.

Pengungkapan kasus klitih Gedongkuning yang terjadi pada 3 April 2022 itu bukan tanpa catatan. Muncul dugaan penyidik Polda DIY melakukan penyiksaan dan salah dalam menetapkan para pelaku. Dugaan itu makin kuat dengan adanya temuan mal-administrasi Ombudsman DIY dan temuan Komnas HAM tentang dugaan penyiksaan terhadap terpidana saat mereka masih berstatus sebagai tersangka. Meski telah berkekuatan hukum tetap, tidak boleh ada pihak-pihak yang mengancam kebebasan berekspresi terkait kasus klitih Gedongkuning. Putusan pengadilan bukan akhir dan ujung dari pengungkapan fakta. Publik harus diberi kebebasan untuk mengkritisi dan membongkar cacat dalam penegakan hukum. Jurnalis harus hadir dan ambil bagian dalam pengungkapan fakta.

2. Ancaman kebebasan pers dalam kasus penutupan patung Bunda Maria

Awal 2023 diwarnai dengan munculnya kasus intoleransi beragama di DIY. Pada Rabu, 22 Maret 2023, sehari sebelum umat Muslim menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1444 Hijriah, terjadi penutupan patung Bunda Maria di Rumah Doa Sasana Adhi Rasa Santo Yakobus, Padukuhan Degolan, Bumirejo, Lendah, Kulon Progo. Penutupan Patung Bunda Maria itu diduga kuat karena adanya tekanan dari salah satu kelompok ormas yang datang beberapa hari sebelumnya. Video penutupan patung setinggi enam meter itu sempat viral di media sosial. Ketika kasus tersebut sedang jadi sorotan publik, jurnalis dan media masa justru tidak bisa beban menelusuri fakta. Berdasarkan catatan AJI Yogya, setidaknya ada dua kasus ancaman kebebasan pers saat meliput penutupan patung Bunda Maria, yaitu intervensi Polres Kulon Progo terhadap konten jurnalistik yang memberitakan kasus dan label berita hoaks yang dilakukan oleh warganet terhadap konten jurnalistik.

Pada kasus pertama, seorang jurnalis diketahui mendapat intimidasi dari pihak Polres Kulonprogo saat menghadiri acara jumpa pers terkait penutupan patung Bunda Maria di

Rumah Doa Sasana Adhi Rasa Santo Yakobus di Padukuhan Degolan, Bumirejo, Lendah, Kulonprogo. Humas Polres Kulonprogo meminta jurnalis tersebut untuk membuat berita sesuai narasi yang telah disampaikan Kapolres Kulon Progo. Menurut Humas Polres Kulonprogo, hal ini dilakukan agar jurnalis tidak memperkeruh suasana.

Salah satu anggota AJI Yogyakarta yang juga membuat liputan mendalam dari kasus tersebut juga mendapat pesan provokatif dari orang tak dikenal. Ada tekanan dan protes atas produk jurnalistik tentang kasus intoleransi tersebut. Selanjutnya, dalam kasus kedua, pada Jumat (24/3/2023), ramai sebuah cuitan di Twitter dari akun @Jogja_Menyapa yang melabeli sebuah produk jurnalistik dengan stempel hoaks dan narasi yang memprovokasi. “betapa ngerinya berita @Harian_Jogja semua orang sudah menjustifikasi Islam, tak tahunya inisiatif Sendiri...,” tulis akun @Jogja_Menyapa.

AJI Yogyakarta menilai sejumlah kasus ancaman kebebasan pers itu bertentangan dengan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Ayat (2) menegaskan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Penutupan Patung Bunda Maria sekali lagi menunjukkan bahwa DIY masih dibayang-bayangi intoleransi beragama. Jurnalis harus hadir dan bebas memberitakan berbagai kasus intoleransi sesuai dengan fakta yang ditemukan. Kepolisian harus memastikan tidak mengintervensi pemberitaan dan membuat narasi tunggal. Masyarakat agar mendukung kebebasan pers dengan tidak melabeli karya jurnalistik dengan stempel hoaks.

3. 27 tahun kasus pembunuhan Udin terus mangkrak

AJI Yogyakarta kembali menggelar aksi unjuk rasa untuk memperingati 27 tahun kasus pembunuhan jurnalis Harian Bernas, Fuad Muhammad Syafruddin atau Udin. Dalam

aksi ini, AJI dan jaringan masyarakat sipil Yogyakarta mempertanyakan kabar kelanjutan penanganan kasus ini kepada Kapolda DIY yang baru, Irjen Pol. Suwondo Nainggolan. Pembunuhan jurnalis Harian Bernas, Fuad Muhammad Syafruddin memasuki tahun ke-27, tetapi hingga kini pengusutan kasus ini mandek. Sudah 21 kali Kapolda DIY berganti, tetapi belum ada titik terang terkait dengan pembunuhan jurnalis Udin.

AJI Yogyakarta mendesak agar Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan tidak mengikuti jejak pendahulunya yang membiarkan kasus Udin terus mangkrak. Jika tidak diselesaikan, kasus ini akan menambah catatan “dark number”, kejahatan yang tidak diungkap oleh kepolisian. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan mantan Kapolri Sutarnan pernah mengungkapkan bahwa ada kesalahan prosedur dalam pengungkapan kasus Udin.

Udin meninggal pada 16 Agustus 1996 setelah dianiaya oleh sejumlah orang tak dikenal tiga hari sebelumnya. Diduga kuat, pembunuhan ini berhubungan dengan karya jurnalistik kritis yang ditulis oleh Udin sebelumnya. Ia mengupas kasus korupsi mega proyek Parangtritis dan suap suksesi Bupati Bantul Sri Roso senilai Rp 1 miliar kepada Yayasan Dharmais milik Presiden Soeharto kala itu. Investigasi wartawan Bernas yang tergabung dalam Tim Kijang Putih dan Tim Pencari Fakta dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Yogyakarta menghasilkan petunjuk bahwa ada dugaan pembunuhan Udin karena sejumlah berita korupsi di Bantul yang ditulisnya. Sejumlah upaya hukum dan advokasi publik telah dilakukan, termasuk memberikan data-data hasil investigasi itu kepada pihak kepolisian. Namun, kepolisian tetap berpegang bahwa Iwik adalah pelakunya.

AJI Yogyakarta menegaskan tidak ada alasan bagi polisi untuk menunda pengungkapan kasus jurnalis Udin. Semua barang bukti yang dibutuhkan sudah diserahkan. Saksi-saksi dan orang-orang yang diduga kuat terlibat juga masih tersedia untuk diperiksa.

4. PHK jurnalis dan independensi media pada tahun Pemilu

Menjelang Pemilu 2024, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pemotongan gaji terhadap jurnalis dan pekerja media di Indonesia. Perusahaan media beralasan bahwa kondisi keuangan yang tidak baik. Beberapa jurnalis di DIY menjadi korban PHK dan pemotongan gaji. Pada awal tahun, kasus PHK sepihak menimpa 12 jurnalis Akurat.co biro Yogyakarta. Perusahaan memutuskan menutup kantor biro DIY dan mem-PHK pekerja media secara sepihak tanpa pesangon yang layak. Perkara itu kemudian diadvokasi oleh AJI Yogyakarta dan LBH Pers Yogyakarta. Tujuh pekerja media sepakat untuk melanjutkan perkara tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta. Di tengah proses persidangan, perusahaan akhirnya setuju untuk membayar pesangon pekerja medianya yang di-PHK.

Kasus PHK juga menimpa 16 pekerja media Tirto.id. Tiga di antaranya adalah mereka yang bekerja di Yogyakarta. Perusahaan mengeklaim kondisi keuangan sedang tidak sehat sehingga terpaksa melakukan efisiensi. Pekerja media terpaksa menerima tawaran pesangon dengan format Perppu Cipta Kerja yang nominalnya lebih kecil dibandingkan format UU Ketenagakerjaan. Hal ini sekali lagi menegaskan bahwa UU/Perppu Cipta Kerja tidak memihak terhadap buruh. Selain PHK, pemotongan gaji juga menimpa semua pekerja media di Suara.com, termasuk yang bekerja di Jogja. Lagi-lagi pemotongan hak karyawan dilakukan karena kondisi keuangan perusahaan yang sedang goyang.

AJI Yogyakarta menayangkan adanya PHK dan pemotongan gaji pekerja media. Perusahaan wajib memenuhi hak jurnalis dan pekerja media untuk diupah dengan layak. Upah layak adalah salah satu syarat untuk lahirnya karya jurnalistik yang berkualitas.

Di samping itu, kondisi keuangan perusahaan media yang goyang memunculkan kekhawatiran terhadap independensi media saat tahun pemilu. Iklan politik yang masuk ke perusahaan media berpotensi mengancam

kebebasan pers. AJI Yogyakarta mengingatkan media dan jurnalis agar tetap menjaga independensi saat tahun pemilu. Ruang redaksi harus bebas dari intervensi. Jurnalis harus menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik dengan berpegang teguh pada UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

5. Pelarangan acara Festival Keadilan di UIN Yogyakarta

Akhir 2023 ditutup dengan peristiwa yang memprihatinkan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Social Movement Institute (SMI) semula berencana menggelar Festival Keadilan di GOR tenis UIN Yogyakarta pada Minggu (10/12/2023). Direktur SMI Eko Prasetyo mengatakan Festival Keadilan adalah bagian dari rangkaian peringatan Hari HAM Sedunia. Oleh karena itu, mereka menghadirkan sejumlah tokoh dan aktivis HAM dan Demokrasi, seperti pengamat politik Rocky Gerung, pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, dan Ketua YLBHI, Muhammad Isnur. Beberapa hari menjelang acara, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Al Makin melarang kegiatan tersebut. Pihak kampus beralasan bahwa kegiatan tersebut bernuansa politik praktis dan tidak sesuai dengan izin yang diajukan. Festival Keadilan pun batal terselenggara di UIN Yogyakarta dan pindah ke salah satu kafe.

AJI Yogyakarta menyayangkan pelarangan acara Festival Keadilan di UIN Yogyakarta. Kegiatan tersebut terselenggara sebagai bentuk keprihatinan jaringan masyarakat sipil terhadap situasi penegakan hukum, HAM dan demokrasi di Indonesia. Sayangnya, Rektor UIN Yogyakarta, Al Makin gagal membedakan kegiatan politik praktis dan kebebasan berekspresi. Padahal, ia adalah salah satu panelis dalam debat perdana Calon Presiden 2024 tentang isu hukum, HAM dan demokrasi. Peristiwa itu menjadi sinyal bahwa kebebasan berekspresi di lingkungan akademik pun mulai terancam.

Pernyataan Tuntutan

Pemerintahan ke depan perlu memformulasikan ulang sistem politik dengan membuka ruang yang lebih luas terhadap partisipasi politik publik yang bermakna, dalam semua pembuatan kebijakan negara berbasis pada nilai-nilai demokrasi, kedaulatan rakyat, negara hukum dan hak asasi manusia, membenahi institusi penegak hukum dalam konteks perubahan paradigma, peningkatan kapasitas intelektual, kepatuhan terhadap kaidah etik, dan menjaga independensi dari pengaruh kekuasaan, mendesak aparatur negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) untuk menjalankan pemerintahan yang bebas KKN dan bebas dari konflik kepentingan, sesuai dengan UU No. 28 tahun 1999, dan tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk melayani dan menyelundupkan kepentingan kekuasaan dan menindas rakyat.

Pemerintah ke depan perlu mengembalikan KPK sebagai lembaga independen, menjauhkan kuasa politik dari lembaga penegak hukum, memperbaiki struktur dan regulasi peradilan agar terjadi *fairness*. Pemerintah perlu segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga—sekalipun Presiden sudah setuju, namun di DPR penahanan proses dengan tidak jelas ujung pangkalnya. Reformasi APH penting karena KKN merajalela sehingga sulit bagi PRT dan rakyat miskin mendapatkan keadilan. Perlindungan sosial harus responsif dan inklusif terhadap semua orang terlebih rakyat miskin dan jangan jadikan ini komoditi politik elektoral semata dengan membagi-bagi bansos.

Masyarakat sipil perlu terus memfasilitasi ruang pertemuan gagasan yang sudah dimunculkan oleh beberapa OMS atau individu untuk dikonsolidasikan menjadi gerakan bersama, memperbanyak sekutu/kawan yang selaras dengan nilai/prinsip dan ide gerakan masyarakat sipil tentang demokrasi, negara hukum dan hak asasi manusia, memfasilitasi pengetahuan dan kesadaran kritis warga dengan menyelenggarakan kegiatan seperti rapat umum, diskusi, membuat selebaran-selebaran luring atau konten

secara daring, dll., mendiskusikan ide-ide progresif tentang sistem politik dan ketatanegaraan, menggelorakan aksi publik (demonstrasi massa), dan kajian akademik kemunduran demokrasi di Indonesia.

Secara khusus, dalam upaya memperkuat gerakan politik perempuan akar rumput, maka gerakan politik feminis menjadi strategi yang tepat untuk melawan sistem politik patriarkis. Gerakan politik feminis terbangun dari kesadaran kritis perempuan atas ketidakadilan dan penindasan yang berujung pada pemiskinan. Perempuan akar rumput sebagai kelompok yang mengalami marginalisasi dan penindasan secara berlapis memiliki daya juang dan kekuatan untuk melawan, karenanya penguatan perempuan akar rumput diarahkan untuk membangun gerakan politik feminis, di mana perempuan tidak hanya menyuarakan kepentingan mereka, tetapi juga mempengaruhi keputusan-keputusan hingga mendorong perubahan yang diinginkan. Kami juga mendorong perubahan sistem kebijakan yang melindungi kedaulatan perempuan. Gerakan politik feminis dibangun dan diarahkan untuk memastikan tanggung jawab dan kewajiban negara dalam menghormati, memenuhi dan melindungi hak-hak perempuan maupun warga negara secara keseluruhan. Lebih jauh, perlu perluasan dukungan publik untuk memperkuat posisi politik perempuan.

Terkait mangkraknya kasus pembunuhan Udin, kami meminta agar Kapolri dengan supervisi langsung Presiden membentuk Tim Khusus menguak kasus ini dengan motif pemberitaan. Terhadap kasus penghilangan paksa Wiji Thukul dkk., pemerintah perlu membentuk tim usut kasus penghilangan paksa Wiji Thukul dkk. Terkait kasus Menteri Perdagangan, Presiden segera mencopot Mendag yang terlibat skandal pelanggaran berat asas penyelenggaraan negara. Kami juga meminta agar pemerintah ke depan segera mencabut revisi UU KPK dengan mengembalikan kepada UU yang menjamin independensi KPK, mengembalikan pegawai-pegawai KPK korban TWK. Terkait kasus kekerasan dalam PSN, pemerintah perlu mengubah paradigma kekerasan dalam PSN dengan mengevaluasi total PSN selama ini dan penuntasan proses

hukum kasus- kasus kekerasan di PSN.

Merespons situasi saat ini, masyarakat sipil perlu meningkatkan konsolidasi dan menyatukan suara dalam upaya penguatan demokrasi. Pemerintahan sudah sepatutnya netral dan tidak mengintervensi penyelenggaraan Pemilu 2024, untuk memastikan terpilihnya pemerintahan baru yang terbuka, dan membuka seluas-luasnya partisipasi rakyat. Atas nama demokrasi melalui prinsip regenerasi kepemimpinan yang adil, bebas nepotisme, dan berdasarkan rekam jejak buruk berbagai kasus di atas, maka dalam Pilpres 2024, tidak sepatutnya Jokowi dan keluarga penerusnya turut berkontestasi. Pemilih dalam Pilpres harus memiliki informasi dan kesadaran penuh terkait hal ini sebelum menunaikan haknya.

Rilis Forum Cik Di Tiro - III: “Menandai Dua Pekan Matinya Demokrasi Elektoral”

Tanggal rilis: Rabu, 28 Februari 2024

FORUM CIK DI TIRO “MENANDAI DUA PEKAN MATINYA DEMOKRASI ELEKTORAL”

Yogyakarta, 28 Februari 2024

Puncak Pemilu Presiden-Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif 2024 telah usai, pasca hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024. Kami sepakat dengan pengamatan berbagai ahli dan lembaga demokrasi di dunia dan Indonesia bahwa Pemilu 2024 ini merupakan peristiwa politik terburuk sepanjang sejarah pasca reformasi 1998. Indikasi buruknya pelaksanaan ritual lima tahunan ini sudah muncul sejak pencalonan anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden, didahului aksi intervensi politik terhadap Mahkamah Konstitusi. Disusul aksi mobilisasi aparat penegak hukum, aparat birokrasi dan penggelontoran bantuan sosial untuk kepentingan kemenangan salah satu paslon sebagai puncak buruknya pelaksanaan Pemilu yang menimbulkan luka sangat mendalam.

Kami menilai Demokrasi sebagai kesepakatan publik telah mati di tangan Presiden Jokowi. Ini fakta pahit setelah Indonesia melewati 26 tahun reformasi. Pemilu 2024 menjadi sekedar demokrasi prosedural dan cacat. Pemilu hanya sebagai sarana legitimasi berlanjutnya kekuasaan otoriter, dinasti Jokowi. Sejak awal ia dirancang sedemikian rupa sebagai upaya melanggengkan kepentingan elite oligarkis. Pada awalnya adalah wacana tiga periode melalui pemilu dan kemudian skenario perpanjangan masa jabatan Presiden tanpa Pemilu. Informasi ini muncul setelah konflik antara PDIP partai yang membesarkan Jokowi muncul. Tetapi besarnya penolakan masyarakat sipil dan

tidak terkonsolidasi-nya elite politik memaksa Jokowi mengurungkan niat tersebut. Namun, ternyata aksi politik brutal tak berhenti. Mahkamah Konstitusi mengalami intervensi sangat hebat, dan keputusan kontroversialnya telah meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto. Aksi ini divonis melanggar etik oleh MKMK, hingga akhirnya Anwar Usman, ipar Jokowi diberhentikan sebagai Ketua MK.

Perilaku buruk politik kekuasaan Jokowi tidak berhenti. Pasca pencalonan dengan merekayasa aturan, rezim politik di Jakarta menerapkan politik gentong babi, menerapkan guyruran bansos, mobilisasi kepala desa, penggunaan instrumen aparat kekuasaan negara, dan berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan lainnya yang dilakukan tanpa malu oleh Presiden Jokowi. Sedangkan lembaga penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, dan DKPP sama sekali tidak berdaya di hadapan kekuasaan.

Kesederhanaan hidup Jokowi dan keluarganya selama ini palsu. Istrinya, Iriana dan anak serta mantunya Selvi Ananda dan Eriana Gundono memamerkan kemewahan. Beberapa hari pasca pemungutan suara dan kemenangan sementara Prabowo-Gibran, partai politik yang tadinya berkompetisi mulai konsolidasi, tanpa memerhatikan ideologi kebangsaan. AHY, anak mantan Presiden SBY seorang pengarang buku “Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi”, menjadi pihak yang pertama mendapat kue kekuasaan setelah pemilu 2024 dengan diangkat menjadi Menteri ATR/Kepala BPN.

Sejauh yang dapat ditelusuri dalam riwayat hidup AHY, tidak ada pendidikan maupun pengalamannya terkait dengan pertanahan. Padahal demikian banyak masalah terkait pertanahan, mulai dari mandeknya agenda reforma agraria selama rezim Jokowi, maraknya perampasan tanah dan ruang hidup rakyat, hingga berbagai bentuk konflik agraria yang menyengsarakan rakyat. Selain AHY, muncul nama Prabu Revolusi, seorang yang sempat menjadi bagian dari TKN Prabowo-Gibran diangkat menjadi Komisaris PT Kilang Pertamina. Istri Arief Rosyid, Siti Zahra Aghnia,

Komandan Tim Fanta pemilih muda Prabowo, diangkat menjadi Komisaris PT Pertamina Patra Niaga. Tidak jelas kompetensi dan pengalaman mereka di industri minyak dan gas bumi. *Merit system* dikesampingkan. Politik dagang sapi diutamakan. Tidak ada harapan dalam suatu urusan yang diserahkan bukan pada ahlinya.

Pemungutan suara sudah usai. Saat ini tinggal menunggu penetapan suara oleh KPU. Rakyat kembali sendiri, ditinggalkan. Sesaat setelah pemungutan suara, harga beras tampak melonjak drastis. Rakyat harus mengantri untuk mendapatkan beras murah. Fenomena ini susah untuk tidak mengaitkannya dengan Bansos ‘ugal-ugalan’ yang disalurkan Jokowi menjelang pemungutan suara. Permasalahan yang dihadapi rakyat riil, tetapi tidak lagi menjadi perhatian para elit. Maka dibutuhkan oposisi di dalam dan di luar parlemen yang kuat dan konsisten. Secara ideal, peran oposisi seharusnya menjadi tugas bagi partai-partai yang kalah dalam Pemilu. Mereka perlu sebagai pengimbang kekuasaan. Namun, tidak ada partai politik yang bisa diharapkan menjadi oposisi bermutu. Sejarah mencata, selama kurun 9 tahun terakhir ada dua partai politik di parlemen yng beroposisi. Sayangnya mereka tidak menjalankan fungsi sebagai oposisi dengan baik. Pada berbagai kesempatan mereka tidak berbeda dengan penguasa, seperti terlihat dalam revisi UU KPK, juga dalam pengesahan UU Cipta Kerja semua menyatakan setuju.

Atas berbagai persoalan di atas, maka Forum Cik Ditiro menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mencatat terjadinya kecurangan sistematis pada pelaksanaan semua tahapan Pemilu yang didesain dan dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Parpol-kroni politiknya.
2. Menuntut lembaga-lembaga negara independen sesuai tugasnya seperti KPU, Bawaslu, Komisi Ombudsman, dll untuk mengusut semua kecurangan Pemilu, khususnya yang dilakukan Presiden Jokowi pada masa sebelum, pada saat, dan sesudah pemungutan suara.

3. Mendesak partai yang kalah dalam Pilpres 2024 ini untuk menjadi oposisi yang berpihak pada rakyat, konstitusi dan hak-hak asasi manusia, berani menggunakan hak angket dan berupaya mencari langkah politik memberikan penghukuman terhadap Jokowi yang terbukti mengkhianati reformasi 1998, melakukan praktek Kolusi dan Nepotisme (KKN).
4. Menyerukan kepada aktivis masyarakat sipil untuk tidak menjadi bagian dari kekuasaan yang dipimpin pelanggar HAM dan kembalinya Suhartoisme.
5. Menyerukan kepada seluruh masyarakat sipil menjadi oposisi, setia kepada nilai-nilai kebenaran, anti korupsi, keadilan-kesetaraan, kerakyatan, perdamaian dan kemanusiaan serta terus berpihak pada kelompok-kelompok marjinal, terdiskriminasi dan tertindas.

Hormat Kami

Forum Cik Di Tiro

Rilis Forum Cik Di Tiro – Gejayan - IV: “30 Hari Matinya Demokrasi di Rezim Jokowi”

Tanggal rilis: Kamis, 14 Maret 2024

30 HARI MATINYA DEMOKRASI DI REZIM JOKOWI

Hari ini (14/3) tepat satu bulan pasca-perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hasil penghitungan cepat sudah mengeluarkan nama pasangan pemenang dari pertarungan politik ini. Masalahnya, hasil kemenangan suara dominan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 dijalankan rezim Jokowi dengan membunuh demokrasi melalui praktik-praktik culas.

Sejak masa pencalonan Pemilu 2024, rezim Jokowi dengan telanjang berupaya keras mengubah konstitusi. Upaya keras rezim Jokowi akhirnya membuahkan hasil keculasan lewat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90 Tahun 2023. Putusan MK ini memberi karpet merah bagi Gibran Rakabumi Raka, anak dari Presiden Jokowi, sebagai calon wakil presiden (cawapres) sehingga dapat berpasangan dengan Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto. Konflik kepentingan atas putusan MK ini tidak terhindarkan, karena sebagaimana kita tahu, status Anwar Usman bukan saja menjadi Ketua MK, tetapi sekaligus paman dari Gibran. Putusan MK ini semakin bermasalah tatkala sehari setelah putusan keluar, pendaftaran pasangan Prabowo-Gibran langsung diterima KPU tanpa terlebih dahulu menyesuaikan aturan tentang batasan usia sesuai Putusan MK No. 90 Tahun 2023.

Keculasan berikutnya yang dilakukan rezim Jokowi adalah melakukan politisasi bantuan sosial (bansos), secara sengaja menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye, terang-terangan menyatakan berpihak pada salah satu paslon capres dan cawapres yang dengan jelas mengarah pada Prabowo-Gibran, hingga memobilisasi aparat negara dari sekelas menteri hingga kepala desa untuk pemenangan

Prabowo-Gibran. Semua ini rezim Jokowi lakukan demi membentuk politik dinasti.

Selain itu, Capres Prabowo Subianto adalah pelanggar HAM. Ia merupakan mantan jenderal TNI-AD yang dipecat karena memiliki indikasi kuat sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas penculikan dan pembunuhan aktivis 1998. Prabowo Subianto hingga kini belum menjalani proses pengadilan karena selalu dilindungi oleh kekuasaan. Ini artinya, rezim Jokowi bukan saja membunuh demokrasi, tetapi memberi tempat bagi pembunuh keji untuk menduduki kursi kekuasaan.

Putusan MK No. 90 Tahun 2023, politisasi bansos, ketidaknetralan presiden dalam pemilu, hingga naiknya pelanggar HAM ke tampuk kekuasaan merupakan pengkhianatan sejati dari amanat Reformasi 1998.

Daftar merah kejahatan demokrasi yang utamanya dilakukan oleh pasangan Prabowo-Gibran tidak lain mengindikasikan upaya pelanggaran politik dinasti Jokowi. Dengan implikasi turunannya, pada praktik-praktik penguasaan kekayaan negara untuk kemakmuran segelintir elite oligarki. Kejahatan berat para elite pemerintah nyata dipertontonkan tanpa rasa malu. Namun, di sisi lain, justru akan menjadi bentuk kejahatan juga, jika masyarakat sipil sebagai bagian dari pemerintahan (*governance*) tidak mengkritisi dan berusaha mengubah bentuk-bentuk politik kotor ini.

Maka dari itu, Jaringan Gugat Demokrasi (Jagad) sebagai bagian dari kelompok masyarakat sipil berupaya mengambil bagian dari perbaikan ini. Momentum 14 Februari 2024, kami maknai sebagai penanda tegaknya setan politik dinasti. Pada sisi lain, momentum ini juga menjadi penanda waktu bagi kami untuk menyuarakan genderang perlawanan. Penanda tegas bahwa demokrasi rakyat masih hidup dan kemarahan rakyat nyata berkobar untuk memusnahkan demokrasi elite.

Tepat satu bulan, pada 14 Maret 2024 ini Jagad menggelar

Aksi Sejangad “30 Hari Matinya Demokrasi di Rezim Jokowi”. Kami membawa enam poin tuntutan:

1. Revisi UU Pemilu dan Partai Politik oleh Badan Independen

UU Pemilu dan UU Partai Politik harus direvisi oleh badan independen, sebuah badan yang terlepas dari konflik kepentingan penguasa hari ini dan jaringan oligarki dalam cakupan lebih luas. Kedua undang-undang ini bermasalah di antaranya karena masih memberikan pembatasan ideologi dalam menjalani sebuah partai, menyediakan celah bagi oligarki untuk membajak demokrasi, serta masih mengecilkan peran-peran masyarakat sipil.

2. Adili Jokowi dan Kroni-kroninya

Sederet dosa kejahatan demokrasi yang dilakukan Jokowi dan kroni-kroninya, sebagaimana sudah dijabarkan di atas, merupakan pengkhianatan nyata pada amanat Reformasi 1998. Maka dari itu, pilihan tegas untuk mengadili mereka mesti segera dijalankan. Akan tetapi, perangkat dan struktur kenegaraan yang sudah dimasukkan ke dalam lingkaran setan oligarki tidak bisa lagi diharapkan. Jalan alternatifnya adalah menegakkan “pengadilan rakyat” atas segala kejahatan yang sudah dilakukan.

3. Cabut UU Cipta Kerja dan Minerba

Tidak ada alasan untuk tidak mencabut UU Cipta Kerja dan Minerba. Kedua UU ini sudah ditolak oleh rakyat sejak penggodokan RUU-nya. Melalui kedua UU ini, pemilik modal terutama yang memiliki ikatan dengan jejaring oligarki dengan mudah menghisap sumber daya manusia dan alam Indonesia secara brutal hanya demi akumulasi kapital. UU Cipta Kerja dengan jelas melakukan perbudakan modern melalui *outsourcing* dengan hanya memperbolehkan buruh mengambil cuti tahunan, antar jam kerja, dan libur mingguan. Sedangkan UU Minerba membuat

kebijakan terkait minerba hanya diambil dari pemerintah pusat sehingga berdampak lemahnya pengawasan terhadap pengusaha tambang, baik dari segi regulasi maupun penerapannya di lapangan. Hal ini juga berdampak tidak dilihatnya penolakan warga terdampak di wilayah tambang dan sekitarnya, sehingga menampakkan penguasa memang sengaja ingin merampas ruang hidup buruh, petani, dan masyarakat adat.

4. Lawan Politik Dinasti

Pestapora demokrasi yang dijalankan lima tahunan kenyataannya hanya menjadi milik para elite. Partisipasi rakyat terbatas pada peran penyumbang suara untuk menambah agregasi skor para calon yang berkontestasi. Di antara yang menjadi faktor penyebabnya adalah sistem pemilu melalui peraturan UU Partai Politik dan UU Pemilu yang menguntungkan elite. Akhirnya, dampak mengerikan seperti terjadi sampai hari ini adalah gelaran karpet merah bagi pemain-pemain politik kelas kakap, nepotisme merajalela, dan menjelma menjadi politik dinasti berbaju sistem pemilu demokratis.

5. Bangun Oposisi Permanen atau “Oposisi Rakyat”

Ketegasan sikap politik kritis menjadi barang mahal hari ini. Pada sisi masyarakat, langkah kritik dan sikap berlawanan dengan penguasa masih belum menjadi pembiasaan di masyarakat. Nahasnya, dari sisi penguasa, pembatasan dan represi pada kebebasan bersuara terus diperketat, sehingga cita-cita tercapainya budaya kritis semakin jauh dari angan. Bukti-bukti ini bisa kita lihat dari penerbitan dan revisi UU ITE, aktivasi kepolisian dan tentara yang menekan kebebasan berekspresi masyarakat, hingga kriminalisasi pembela HAM.

Padahal, kebebasan berpendapat yang menjadi satu indikator kesehatan demokrasi merupakan

jalur bagi terciptanya “oposisi rakyat”. Ketegasan rakyat menjadi oposan adalah mutlak dibutuhkan untuk meruntuhkan penjahat-penjahat demokrasi. Fungsinya adalah mengawasi kekuasaan dan berperan aktif menyuarakan kebutuhan dirinya sebagai rakyat.

6. Seruan Aksi Setiap tanggal 14

Aksi rakyat untuk mengingat catatan kelam sejarah kematian demokrasi harus terus diingat. Sekaligus juga, momentum ini mesti menjadi ruang perhimpunan kekuatan rakyat untuk menjaga jalannya praktik demokrasi. Maka dari itu, Jagad sendiri dan juga mendorong kepada jaringan kelompok-kelompok masyarakat sipil lain untuk rutin menegakkan semangat perjuangan demokrasi setiap tanggal 14.

Yogyakarta, 14 Maret 2024

Rilis Forum Cik Di Tiro – Sejagad - V: “Pernyataan”

Tanggal rilis: Rabu, 24 April 2024

PERNYATAAN AKSI FORUM CIK DI TIRO – SEJAGAD

Aksi Publik di KPU DIY, Rabu 24 April 2024

MK menolak permohonan paslon 01 dan 03 atas hasil Pemilu 2024 yang penuh keculasan. Setelah putusan MK, rangkaian Pemilu 2024 sebagai ritual demokrasi elektoral dan prosedural segera berakhir. Namun, putusan MK ini menyisakan banyak masalah bagi kehidupan kebangsaan yang berlandaskan etika, prinsip negara hukum, dan demokrasi. Ke depan, praktik kekuasaan bisa semakin brutal, jauh dari nilai-nilai etika, selama sah dan legal menurut hukum. Padahal hukum itu sendiri merupakan produk politik yang ditujukan untuk kepentingan kekuasaan.

Putusan MK ini tidak mengagetkan. Mengingat MK sejak awal adalah lembaga yang turut menjadi bagian dari masalah keculasan dalam gelaran Pemilu 2024. MK mengubah syarat umur capres/cawapres demi meloloskan keponakan Ketua MK kala itu. Sehingga pada perselisihan hasil pemilu, susah berharap MK dapat menghadirkan putusan yang menegakkan keadilan substansial, jika awal masalahnya justru dibuat lewat MK sendiri.

MK dalam putusan oleh mayoritas hakimnya tidak mempertimbangkan fakta terjadinya politisasi bansos, penggunaan alat negara, intervensi hukum, dan pelanggaran etik. Para hakim MK, kecuali tiga orang yang mengambil pendapat berbeda/*dissenting opinion*, tidak menunjukkan diri sebagai negarawan, pengawal demokrasi substansial sebagai mandat yang harus di rawat MK. Akhirnya MK kembali menjadi Mahkamah Keluarga (Jokowi).

Sejagad dan Forum Cik Ditiro telah secara aktif mencatat, memberikan peringatan dan protes terbuka atas politik

dinasti Jokowi yang merusak demokrasi. Dan, ketamakan kekuasaan Jokowi dan kroninya adalah puncak persoalan yang harus segera diakhiri. Jokowi dan juga presiden terpilih Prabowo Subianto harus dikontrol, dan diajukan ke pengadilan politik, baik lewat hak angket, sidang rakyat, dan sebagainya.

Melalui aksi terbuka hari ini, Sejad dan Forum Cik Ditiro menyatakan keprihatinan mendalam atas putusan MK yang terus menerus gagal mewujudkan keadilan substansial. Keadilan telah mati di rumah konstitusi. Kini rakyat harus terus bergerak secara strategis dalam lima tahun ke depan:

1. Menuntut DPR menjalankan tugasnya mengawasi pemerintah, dimulai dari mengajukan hak angket untuk mengadili Jokowi yang melanggar konstitusi dan Pancasila.
2. Meminta partai politik dan paslon capres/cawapres yang kalah menjadi oposisi besar melawan kekuasaan absolut dalam genggaman politik dinasti.
3. Menyerukan kepada segenap aktivis pro demokrasi, para akademisi, mahasiswa, seniman, budayawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, buruh, petani, nelayan, para perempuan, disabilitas, dan seluruh rakyat Indonesia untuk terus berjuang bersama-sama dalam gerakan mempertahankan demokrasi dan melawan kekuasaan yang sewenang-wenang.

Rilis Forum Cik Di Tiro – Jagad - VI: “Pernyataan Terbuka”

Tanggal rilis: Rabu, 19 Juni 2024

PERNYATAAN TERBUKA

“FORUM CIK DI TIRO & JAGAD MENOLAK ORMAS BISNIS TAMBANG”

Pemberian izin bisnis tambang oleh pemerintah, menjerumuskan ormas keagamaan ke dalam lumpur dosa ekologis. Praktik bisnis tambang, saat ini dilakukan dengan ugal-ugalan dan tidak berkelanjutan. Kelompok yang paling menikmati keuntungan bisnis tambang bukan rakyat atau negara, tetapi para bos tambang. Mereka inilah para pebisnis ekonomi hitam, kroni elite politik Indonesia yang mendapat kue kekuasaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Kesejahteraan rakyat di sekitar tambang tidak meningkat.

Keuntungan bisnis tambang yang dinikmati bos tambang, harus dibayar mahal dengan kerusakan lingkungan. Masyarakat korban tambang, banyak yang merupakan anggota atau simpatisan ormas keagamaan. Mereka inilah yang seharusnya dipikirkan oleh ormas keagamaan. Memang, jikapun ditolak ormas keagamaan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan ada kemungkinan tetap akan dioperasikan oleh pebisnis tambang yang bisa jadi lebih merusak. Atas dilema ini, seharusnya ormas sangat mudah mengambil sikap, yakni bersama masyarakat menolak dan mengharamkan segala bentuk perusakan.

Dalih batu bara menyediakan sumber energi murah untuk menggerakkan perekonomian, tidak benar. Produksi batu bara ugal-ugalan, jauh melebihi kebutuhan dalam negeri. Hasil tambang batu bara mayoritas (sekitar $\frac{3}{4}$), diekspor ke luar negeri. Sedangkan penggunaan batu bara untuk pembangkit di dalam negeri, menghasilkan udara kotor. Dampaknya sangat buruk bagi kesehatan warga. Selain itu, ketergantungan kepada batu bara, menghambat

pengembangan energi bersih.

Dari sisi ekonomi, batu bara punya dampak buruk jangka panjang. Modal berbondong-bondong mengalir ke bisnis batu bara. Bisnis ini menarik, karena tidak mensyaratkan inovasi dan teknologi tinggi. Model dasar industri ekstraktif adalah keruk-jual. Sedangkan tingkat keuntungannya, sangat menjanjikan. Dampaknya, Indonesia menghadapi gejala deindustrialisasi. Investasi pada industri manufaktur, kalah menarik dibandingkan industri ekstraktif seperti tambang batu bara.

Bisnis batu bara juga sangat erat dengan korupsi dan mafia. Berbagai lembaga internasional, menempatkan bisnis tambang batu bara sebagai bisnis paling berisiko penyuapan. Bisnis ini bertumpu pada izin yang diberikan oleh elite penguasa. Izin diperoleh dengan membayar suap, baik secara langsung maupun tidak langsung. Praktik di lapangan, bisnis batu bara selalu mengandalkan *beking* aparat dan elite penguasa. Demi mengamankan bisnis mereka, para bos tambang menjadi pemodal politisi lokal maupun nasional, legislatif maupun eksekutif. Sebagai timbal balik, penguasa akan memberikan izin tambang.

Setiap tahun, tambang menjadi sumber konflik agraria pada ratusan ribu hektar lahan antara perusahaan tambang dengan masyarakat. Tentu masyarakat menjadi pihak yang kalah, berhadapan dengan pemodal besar yang didukung oleh *beking* aparat. Instrumen kekerasan dan perangkat hukum digunakan untuk memadamkan perlawanan. Rakyat di daerah tambang, banyak terusir dari ruang hidup mereka. Inilah wujud nyata kerusakan di muka bumi akibat ulah tangan manusia-manusia serakah. Sekali lagi, masyarakat korban tambang ini banyak yang merupakan anggota atau simpatisan ormas keagamaan.

Penguasa demi memperoleh dukungan, memberi tawaran bisnis tambang batu bara kepada ormas keagamaan. Jika ini dibiarkan, fungsi kontrol ormas terhadap jalannya pemerintahan kehilangan legitimasi moral. Demikian juga kontrol ormas terhadap praktik bisnis hitam, menjadi tidak

punya landasan etis. ormas menjadi sumber legitimasi model bisnis yang merusak. Karena justru ormas sendiri akan menjalankan bisnis serupa. Dengan situasi penegakan hukum yang sangat lemah seperti saat ini, tidak mungkin praktik bisnis tambang di Indonesia dijalankan tanpa merusak. Bahkan, sebaik apapun bisnis tambang dilakukan, hasil tambang batu bara merupakan energi kotor yang merusak lingkungan.

Kontribusi ormas keagamaan sangat besar bagi Indonesia. Khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, sosial, dan lain-lain. Untuk menjalankan aktivitasnya, ormas membutuhkan pendanaan. Namun, pendanaan ormas selama ini diperoleh secara mandiri dan berkelanjutan dari masyarakat. Ormas juga mengembangkan model bisnis berbasis masyarakat. Berbagai amal usaha ormas, menjadi contoh praktik kemandirian pendanaan ormas. Ormas tidak boleh bergantung kepada negara. Tanpa kemandirian, ormas akan tunduk dan dikendalikan oleh negara. Keberlangsungan ormas akan tergantung kepentingan kekuasaan. Hal ini sangat mengancam eksistensi ormas dalam jangka panjang.

Secara bisnis dan teknis, ormas tidak memiliki kapasitas dalam mengelola tambang. Meskipun tambang bisa saja diserahkan kepada perusahaan profesional sebagai pihak ketiga, namun justru ini menunjukkan ormas hanya dijadikan alat legitimasi bisnis hitam ini. Ormas hanya dipinjam namanya untuk stempel, mencuci dosa bisnis tambang yang sedemikian besar. Imbal hasil keuntungan yang diterima ormas tidak akan sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Dosa ekologis yang dibuat para elite ormas ini, harus ditanggung oleh masyarakat dan anggota ormas itu sendiri sepanjang masa.

Atas uraian di atas, kami gerakan masyarakat sipil lintas NGO, akademisi, dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Cik Ditiro dan Jagad menyampaikan:

1. menolak penjarahan bumi pertiwi melalui bisnis tambang oleh elite-elite ekonomi politik secara ugat-

ugalan, tidak berkelanjutan, koruptif, dan penuh pelanggaran hak asasi manusia;

2. menolak pemberian izin pertambangan kepada ormas;
3. menuntut Presiden untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. meminta semua ormas menolak tawaran mengelola bisnis tambang yang akan menjerumuskan ormas serta masyarakat ke dalam kerusakan;
5. mengajak anggota ormas menolak keputusan elite ormas yang menerima tambang;
6. mengajak masyarakat memberi dukungan nyata, secara moril dan materiil, kepada ormas yang bersedia menolak bisnis tambang;
7. mengajak masyarakat sipil membuat daftar hitam dan boikot terhadap elite ormas dan intelektual pendukung bisnis tambang.

Rabu, 19 Juni 2024

Yogyakarta

Rilis Ikatan Sarjana Katolik Indonesia - Dewan Pimpinan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta: “Menyikapi Perkembangan Negara dan Bangsa Indonesia yang Mengalami Regresi Demokrasi”

Tanggal rilis: Selasa, 6 Februari 2024

**IKATAN SARJANA KATOLIK INDONESIA - DEWAN
PIMPINAN DAERAH, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

**MENYIKAPI PERKEMBANGAN NEGARA DAN
BANGSA INDONESIA YANG MENGALAMI REGRESI
DEMOKRASI**

Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) DPD DIY merupakan organisasi kemasyarakatan yang turut memperjuangkan arena kepublikan yang bermartabat, bersolidaritas, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. ISKA DPD DIY berbekal ilmu pengetahuan yang merupakan anugerah Tuhan berniat berkontribusi dalam bentuk menyampaikan ide, gagasan, saran dan imbauan untuk kebaikan bangsa dan negara Indonesia.

Gejala kemerosotan demokrasi tengah terjadi dan dipercepat dengan adanya sinyalemen perilaku lembaga negara yang berpihak pada Pemilihan Umum tahun 2024. Regresi demokrasi tersebut bersumber dari beberapa keprihatinan yang akhir-akhir ini terjadi sehingga membentuk “demokrasi yang bengkok”. Untuk itu, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA DPD DIY menyampaikan seruan moral sebagai berikut:

1. Presiden, jajarannya, dan semua lembaga negara harus menjunjung tinggi etika politik kebangsaan dan prinsip prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, memiliki tanggung jawab politik yang tegak lurus dengan konstitusi, sumpah jabatan, mengupayakan demokrasi substantif yang sejalan dengan undang-undang yang

berlaku.

2. Presiden, jajarannya, dan semua lembaga negara harus menguatkan pelaksanaan demokrasi elektoral secara objektif, netral dan tidak berpihak, sehingga pemilihan umum dapat berjalan langsung, umum, bebas dari intimidasi dan kekerasan, jujur dan adil. Hal tersebut sekaligus untuk menghargai dan mengartikulasikan suara dan aspirasi rakyat dalam proses demokrasi elektoral maupun kebijakan publik.
3. Seluruh komponen bangsa hendaknya terlibat secara aktif mewujudkan suasana yang damai dan rukun dalam pemilu serta mengawal terwujudnya pemilu yang luber jurdil serta bermartabat.
4. Mendukung lahirnya warga negara kompeten sebagai kunci terwujudnya sistem *demokrasi yang berkualitas*. Kebebasan kepada setiap anggota dan warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politik dan hak memilih kepada calon dewan/legislatif pada berbagai tingkatan, dewan perwakilan daerah (DPD) dan capres/cawapres merupakan syarat penting.
5. Nilai-nilai panduan atau "*among asthbrata*" digunakan sebagai sarana untuk memilih pemimpin yang memiliki keutamaan moral (*jalma kang utama*). Delapan nilai-nilai panduan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. konsisten dan teguh dalam mempertahankan serta mengimplementasikan Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika;
 - b. mengutamakan keberpihakan dan pemberdayaan bagi masyarakat yang kecil, lemah, miskin, tersingkir dan *diffable*;
 - c. menjunjung nilai martabat kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM);
 - d. memperjuangkan kesejahteraan umum (*bonum commune*), di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok dan golongan;
 - e. membela dan memperjuangkan keberagaman dan

- toleransi yang konsisten;
- f. memiliki komitmen kuat penegakan hukum yang selaras dengan cita-cita reformasi untuk terbebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - g. memiliki kompetensi yang unggul dalam menyusun regulasi, kebijakan publik dan modalitas efektif untuk kesejahteraan rakyat secara demokratis;
 - h. mempunyai kepedulian atas kelestarian lingkungan hidup dan keutuhan ciptaan.

Demikian seruan moral ini disampaikan dengan niat baik untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang lebih berkualitas.

Yogyakarta, 6 Februari 2024

Rilis Jaringan Antariman Indonesia (JAI): “Alarm Keutuhan dan Keberagaman Bangsa”

Tanggal rilis: Selasa, 13 Februari 2024

PETISI JARINGAN ANTARIMAN INDONESIA (JAI)
TENTANG ALARM KEUTUHAN DAN
KEBERAGAMAN BANGSA

Assalamulaaikum warahmatullahiwabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

Menjelang 26 tahun reformasi dan enam kali pemilu pasca Orde Baru, telah banyak kebaikan yang memengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu yang patut disyukuri adalah kemampuan kita bergerak dewasa mengekspresikan nilai-nilai pluralisme dan kemajemukan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan dan perdamaian.

Demikian pula pranata hukum dan politik telah berkembang di alam demokrasi ini dengan naungan semangat republikanisme. Republikanisme berarti kita memiliki akses setara untuk mengisi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada yang menjadi tuan, kecuali sekalian rakyat, apapun kelas sosial-budaya-ekonominya.

Namun, fenomena politik nasional yang terjadi tiga tahun terakhir memberikan nuansa lain. Kita seolah dipaksa mundur jauh ke alam sebelum reformasi. Nilai demokrasi tergeser ke arah oligarki, ekonomi Pancasila *oleng* ke arah neoliberalisme, dan kebudayaan nasional menjadi model *priyayisme* yang banal dan oportunistik.

Demikian pula politik. Nilai asasinya adalah musyawarah untuk mufakat menjadi konspirasi elitis yang bersaing gelanggang sempit dan cenderung membangun dinasti. Nilai-nilai kekeluargaan yang sebenarnya adalah gotong

royong dan egalitarianisme malah mengkhianati asas *res publica*, berubah menjadi *monarchia*.

Para guru bangsa yang menjadi inspirasi Jaringan Antariman Indonesia tidak lelah dalam laku hidupnya menawarkan nilai, etika, dan pengetahuan politik yang berkeadaban pasti gusar dengan praktik dan budaya politik saat ini, yang semakin serakah, *homo homini lupus*, *machiavellianisme*, dan berwajah bebal. Seolah-olah hanya ada pemujaan pada kekuasaan semesta. Hilang semua narasi kebajikan yang pernah diajarkan para guru bangsa seperti Gedong Bagoes Oka, Abdurrahman Wahid, Th. Sumartana, Romo Mangunwijaya, Daniel Dhakidae, Djohan Effendi, Eka Darmaputera, Buya Syafii Maarif, dan Pater Neles Tebay.

Histeria politik menghanyutkan nalar dan nurani. Atas dasar itu, JAI bersikap:

1. Kepada semua pimpinan politik, hentikan model pendangkalan makna pemilu yang menjauhkan pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, kesetaraan, dan pro-martabat rakyat. Jadikan pemilu sebagai pesta rakyat sesungguhnya, ekspresi dari suara Tuhan yang menuntut pada kebenaran dan kebaikan.
2. Kepada para peserta pemilu yang sedang bersaing, penuhilah jiwa dan pikiran Anda sekalian dengan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Bahwa di atas semua persaingan politik, ada eksistensi bangsa dan negara yang perlu dijaga. Hargailah persatuan bangsa! Di balik semua usaha dan keringat untuk merebut kekuasaan, tetap harus berhenti pada satu titik. Insallah ketika konstitusi sudah memutuskan siapa yang menjadi pelayan dalam melanjutkan estafet pembangunan bangsa ini.
3. Kepada penyelenggara pemilu, perbaikilah nilai dan profesionalisme Anda sekalian dalam menjalankan tugas. Tugas terbesar para penyelenggara adalah menjamin pemilu berjalan jujur dan adil dengan mekanisme langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Ingat sumpah jabatan ketika mendapatkan tanggung-jawab ini. Jadilah wasit yang bekerja seolah-olah Tuhan menyaksikan apa yang kalian usahakan dan pendam di dalam hati.

4. Kepada aparat TNI dan Polri, di pundak Anda sekalian seluruh keamanan dan kedamaian bangsa ini dipertaruhkan. Tetaplah menjadi abdi bagi bangsa dan negara, dan bukan pelayan penguasa yang bisa saja berubah. Abadilah dalam hati dan pikiran rakyat yang tidak menginginkan bangsa ini pecah dan koyak-moyak oleh urusan politik dan kekuasaan.
5. Kepada seluruh warga negara, mari jaga bangsa ini dari model perampasan politik tuna adab. Mari jaga hati seluruh anak bangsa yang beragam untuk tidak hanyut pada hasutan yang memecah belah, baik atas nama suku, bangsa, budaya, agama, dan identitas etnografis lainnya. Puluhan tahun kita sudah berhasil menjaga kebersamaan dalam perbedaan. Kita perlu ratusan tahun lagi untuk merawat Indonesia dan berjaya di antara bangsa-bangsa dunia.

Yogyakarta, 13 Februari 2024

Rilis Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi HAM Internasional: “Sisi Gelap Pembangunan Era Jokowi dalam Dua Modus Represi: Populisme Sektarian dan Dalih Pembangunan”

Tanggal rilis: Minggu, 11 Februari 2024

“SISI GELAP PEMBANGUNAN ERA JOKOWI DALAM DUA MODUS REPRESI: POPULISME SEKTARIAN DAN DALIH PEMBANGUNAN”

Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi HAM Internasional menyatakan Pemerintahan Joko Widodo telah gagal dalam menjalankan kewajiban penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak sipil dan politik (sipol) juga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob). Pemerintah Joko Widodo—khususnya dalam masa pandemi Covid-19 dan setelahnya—membuat sejumlah kebijakan yang berorientasi pasar yang justru merusak demokrasi, menyuburkan korupsi, eksploitatif dan ekstraktif terhadap sumber daya alam yang menguntungkan sebagian kecil elite dan keluarganya serta semakin menjauhkan kelompok rentan untuk mendapatkan hak-haknya.

Dari kerja-kerja pemantauan dan advokasi yang dilakukan oleh anggota dan jaringannya, koalisi menyatakan, rezim Jokowi telah melakukan banyak pelanggaran HAM dan secara sistematis dengan melakukan korupsi politik, termasuk kejahatan elektoral, khususnya memanfaatkan situasi pandemi dan pemilu untuk mendorong agenda otoritarian eksploitatif yang oportunistik, di antaranya; (1) pembuatan UU Cipta Kerja yang mempermudah pemberian izin investasi dengan mengabaikan daya dukung lingkungan dan perlindungan hak-hak masyarakat; (2) revisi UU Minerba yang memberikan banyak insentif bagi perusahaan tambang dengan mengabaikan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya; (3) Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mendorong percepatan perusakan lingkungan oleh masifnya proyek pembangunan fisik

oleh pemerintah dan swasta; (4) pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini berperan penting dalam mencegah dan memberantas korupsi di sektor pengelolaan sumber daya alam; (5) revisi atas KUHP dan UU ITE yang masih mempertahankan pasal-pasal represif, bahkan *over*-kriminalisasi dan mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan akademik; (6) mengancam kebebasan pers mulai dari regulasi yang tidak pro kemerdekaan pers, pembiaran kekerasan terhadap jurnalis, dan negara lepas tanggung jawab atas kebebasan pers, dll.

Terlebih, akhir 2023 dan awal 2024 diwarnai dengan laku politik Presiden Jokowi yang merusak demokrasi dengan melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kelompok dan keluarganya. Mulai dari kasus pelanggaran serius kode etik Ketua Mahkamah Konstitusi yang memberikan putusan banal yang meloloskan putranya, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden hingga kasus etik berat Ketua Komisi Pemilihan Umum dalam pencalonan Prabowo-Gibran, yang keseluruhannya ini dapat merusak integritas pemilu. Agenda-agenda otoritarian yang eksploitatif diwujudkan melalui proses yang nampaknya demokratis, melalui jalur-jalur formal seperti pembuatan UU, mekanisme hukum, dan pemilu.

Watak otoritarian ini muncul dalam dua modus represi yakni represi sektarian populis dan represi dalih pembangunan. Pertama, represi berbasis populisme sektarian (*repressive sectarian populism*) adalah siasat politik yang mendasarkan diri pada isu-isu sektarian; agama, ras dan etnis, serta golongan. Represi jenis ini telah banyak meminggirkan sejumlah kelompok rentan, minoritas agama, ras, gender, yang tidak diterima keberadaannya oleh sebagian besar (mayoritas) masyarakat atas alasan agama, perbedaan ras dan etnis, dll. Pemerintah, alih-alih melindungi setiap orang terlepas apapun latar belakangnya, justru untuk kepentingan kekuasaannya, meneruskan stigma, diskriminasi dan menjadi pelaku pelanggaran HAM terhadap sejumlah kelompok rentan yang digelorakan oleh kelompok mayoritas (*majoritarianism*). Kasus-kasus

seperti pelarangan pendirian rumah ibadah, persekusi dan kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah, kelompok agama/kepercayaan lokal, LGBTIQ, masih berlakunya hukuman mati, dll, adalah sedikit contohnya.

Kedua, represi ala Orde Baru zaman Soeharto, yaitu cara untuk membungkam siapa saja yang melawan kepentingan nasional untuk dalih pembangunan (*repressive developmentalism*), khususnya pembangunan infrastruktur. Hak-hak demokrasi dipinggirkan atas nama kepentingan strategis nasional, misalnya represi dan kekerasan yang terjadi di Rempang, Wadas, IKN, Papua, dan berbagai daerah lain di Indonesia. Situasi ini berjalan bersamaan dengan impunitas yang terus berlangsung bagi pelaku pelanggaran HAM berat. Hingga saat ini, tak ada satupun kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang diselesaikan.

Dengan agenda revolusi mental saat awal menjabat, Jokowi kini kian menunjukkan dirinya sebagai pejabat negara yang tidak memiliki etika dalam politik, rakus, dan otoriter yang menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme, menuruni sifat Orde Baru yang masyarakat sipil selama ini lawan.

Untuk itu, koalisi masyarakat sipil Indonesia dengan ini menyatakan posisi politik;

1. menggugat dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya karena lalim, tidak melaksanakan mandatnya yakni menjalankan pemerintahan secara adil untuk semua;
2. menghukum Joko Widodo dan koalisinya secara sosial dengan tidak memilih pasangan capres-cawapres yang hanya akan melahirkan politik dinasti, tuna etika, dan yang akan menjadikan negara ini kembali menjadi negara otoriter dan dengan agenda-agenda eksploitatif yang merusak lingkungan;
3. mengajak publik, khususnya pelajar-mahasiswa, buruh, tani, nelayan, kaum miskin kota, orang muda, seluruh korban pelanggaran HAM, untuk bersatu, bergandeng tangan, menghentikan dan melawan setiap represi,

mendorong agenda politik yang bermartabat, jujur dan adil, menghargai, melindungi, dan memenuhi HAM, melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Jakarta, 11 Februari 2024

Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi HAM Internasional

Sumber: <https://yappika-actionaid.or.id/posisi-politik-koalisi-masyarakat-sipil-indonesia-untuk-advokasi-ham-internasional>, diakses tanggal 7 April 2024

Rilis Koalisi Pilih Pulih: “Pilih Pulih dari Krisis Iklim dan Hancurnya Demokrasi dan HAM”

Tanggal rilis: Rabu, 7 Februari 2024

PERNYATAAN SIKAP KOALISI PILIH PULIH

SERUAN MASYARAKAT SIPIL DI PEMILU 2024: PILIH PULIH DARI KRISIS IKLIM DAN HANCURNYA DEMOKRASI DAN HAM

Jakarta, 7 Februari 2024. Sebuah boneka kayu raksasa berwajah pinokio berkeliling Jakarta pagi ini. Ia tak sendirian, rombongan *marching band* dan ratusan massa aksi Koalisi Pilih Pulih ikut menemaninya. Aksi damai kreatif gabungan dari puluhan lembaga masyarakat sipil dan komunitas muda, pelajar, dan mahasiswa ini berlangsung tepat satu minggu sebelum hari pemungutan suara Pemilu 2024.

Pemilu 2024 berlangsung di tengah situasi yang tak mudah; krisis iklim makin genting mengancam hidup warga, ruang demokrasi kian menyempit, serta ketidakpastian masa depan untuk generasi muda—misalnya menyangkut akses pendidikan dan lapangan pekerjaan. Senyampang dengan persoalan-persoalan yang ada tersebut, akhir-akhir ini kita menyaksikan pula pelbagai pelanggaran etika dan dugaan kecurangan menodai proses pemilu.

Persoalan lingkungan dan krisis iklim, demokrasi, dan perlindungan HAM akan bertambah dan makin parah jika tampuk kekuasaan jatuh ke tangan pemimpin yang tersandera kepentingan oligarki ekonomi politik. Sebab, dapat diduga mereka bakal mementingkan kepentingan segelintir kelompoknya saja jika kelak berkuasa. Dalam sepuluh tahun terakhir, kita telah menyaksikan potret buram pengelolaan negara yang sarat konflik kepentingan dan mengesampingkan rakyat. Undang-undang dan proyek yang dirancang secara ugal-ugalan, kritik yang diabaikan hingga dibungkam, pelanggaran HAM yang tak

dituntaskan dan dibiarkan terus terjadi, hingga eksploitasi dan perusakan lingkungan yang dijalankan dengan berkedok pembangunan. Dalam satu dekade ini, yang kita saksikan adalah deretan kabar buruk untuk masyarakat dan untuk bumi kita.

Melalui aksi ini, kami menyerukan kepada para pemilih di seluruh negeri, khususnya generasi muda untuk kembali mencermati visi misi, gagasan dan ide, serta rekam jejak para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, partai politik, hingga calon legislatif, sebelum akhirnya menentukan pilihan.

Dengan aksi ini, kami Koalisi Pilih Pulih menyatakan sikap dan seruan sebagai berikut:

1. Kami akan terus bersuara dan mengajak publik untuk terus bersuara tentang berbagai krisis yang terjadi di Indonesia. Kebijakan ekonomi ekstraktif yang semakin mengukuhkan kuasa oligarki telah melahirkan krisis iklim, pemiskinan, perampasan ruang hidup petani, nelayan, perempuan, masyarakat adat, masyarakat miskin perkotaan, dan kelompok marjinal lainnya. Kondisi ini semakin buruk bagi masa depan anak muda, terlebih diperparah dengan komersialisasi pendidikan yang membatasi akses anak-anak Indonesia terhadap hak atas pendidikan yang murah dan berkualitas.
2. Kami akan terus lantang berteriak atas pengkhianatan terhadap konstitusi dan demokrasi, pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM masa lalu tidak juga dituntaskan, sementara pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi. Kami mengajak publik untuk terus menuntut negara menuntaskan pelanggaran HAM dan menghapus impunitas; negara harus mengakui adanya pelanggaran HAM dan mengadili pelakunya.
3. Menyerukan kepada publik untuk menjadikan Pemilu 2024 sebagai momentum mendesak kepemimpinan Indonesia ke depan untuk lepas dari kepentingan oligarki, serta untuk memastikan pemulihan krisis

multidimensi yang terjadi. Pulih dari kerusakan lingkungan dan krisis iklim, pulih dari ketimpangan agraria, pulih dari berbagai kebijakan yang diskriminatif.

4. Mendesak pemerintahan yang akan datang menjalankan transisi energi yang berkeadilan demi mengatasi krisis iklim. Jalankan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Berhenti kecanduan dengan bahan bakar fosil, stop solusi palsu!
5. Mendesak pemerintahan yang akan datang menghentikan ekspansi pembangunan berbasis lahan skala luas untuk mencapai nol deforestasi, melindungi hutan dan lahan gambut yang tersisa terkhusus di wilayah tanah Papua, memulihkan wilayah-wilayah kritis dan sejalan dengan perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat.
6. Mendesak pemerintahan yang akan datang menghentikan segala bentuk diskriminasi, serta memastikan pembangunan yang inklusif sehingga seluruh elemen masyarakat khususnya kelompok marjinal dari berbagai spektrum gender dan orientasi seksual, kelompok minoritas agama dan ras, masyarakat adat dan kelompok difabel dapat selalu dilibatkan aktif dalam pembangunan.

Melampaui pemilu, kami akan terus memilih bersuara dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat partisipasi politik rakyat, agar tujuan demokrasi yang sesungguhnya untuk memastikan jaminan terpenuhinya hak-hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas kesejahteraan, hak atas keselamatan dan hak atas pendidikan dapat terwujud, demi generasi hari ini dan generasi yang akan datang.

Jakarta, 7 Februari 2024

Koalisi Pilih Pulih

Rilis Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2003-2019: “Seruan Moral untuk Pemerintah agar Kembali Menjunjung Tinggi Etika”

Tanggal rilis: Senin, 5 Februari 2024

SERUAN MORAL UNTUK PEMERINTAH AGAR KEMBALI MENJUNJUNG TINGGI ETIKA

Seruan moral disampaikan menyikapi situasi politik yang seakan-akan telah kehilangan kompas moral dan etika.

Karena itu, Pimpinan KPK periode tahun 2003-2019 mengimbau agar Presiden dan seluruh penyelenggara negara kembali berpegang teguh pada standar moral dan etika dalam menjalankan amanah yang diembannya.

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan *rule of law* diharapkan terinternalisasi dalam setiap langkah dan gerak penyelenggara negara. Namun di masa kampanye pemilu, hal itu seperti ditinggalkan.

Para Pimpinan KPK juga menyatakan sifat kenegarawanan dan keteladanan seharusnya juga dapat ditunjukkan oleh seorang presiden atau kepala negara, terutama dalam masa-masa kontestasi Pemilu 2024. Namun, harapan tersebut seperti tak nampak.

Hal itu diperkuat dengan menurunnya skor indeks persepsi korupsi atau *corruption perception index* (CPI) Indonesia dalam empat tahun terakhir. Untuk diketahui, tahun 2019 skor CPI Indonesia mencapai 40 dan menurun drastis menjadi 34 di tahun 2022 dan 2023 serta menempati ranking 115 dari 180 negara yang disurvei.

Selain itu, indeks negara hukum (*Rule of Law Index*) yang dikeluarkan oleh World Justice Project yang hanya mencapai nilai 0,53 (dari skala 0 sampai dengan 1) di tahun 2023 semakin menunjukkan buruknya tata kelola penegakan hukum. Skor tersebut masih sangat jauh dari

nilai ideal indeks negara hukum.

Kemudian, The Economist Intelligence Unit bahkan menempatkan Indonesia sebagai negara “demokrasi cacat” (*flawed democracy*).

Lalu, menurut Varieties of Democracy Project, pada tahun 2023 Indonesia hanya mencapai skor 25. Indonesia juga digambarkan sebagai negara dengan praktik “kartel partai politik” karena maraknya bagi-bagi kekuasaan di antara partai politik dengan akuntabilitas yang sangat kurang pada pemilih (*extensive power-sharing among parties and limited accountability to voters*).

Karena itu, Pimpinan KPK Periode 2003-2019, menyerukan pesan moral kepada Presiden dan seluruh penyelenggara negara untuk melaksanakan “Panca Laku” berikut:

1. Memperkuat agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan sekaligus menjadi teladan (*role model*) dalam menjalankan sikap dan perilaku anti korupsi.
2. Menghindari segala benturan kepentingan (*conflict of interest*), karena benturan kepentingan adalah akar dan langkah awal untuk menuju praktik korupsi.
3. Memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya tata kelola penyaluran bantuan sosial berdasarkan daftar penerima bantuan sosial yang sah, sesuai nama dan alamat (*by name-by address*). Tata kelola bantuan sosial akhir-akhir ini menjadi sorotan karena dilakukan dalam rentang waktu menjelang dilaksanakannya Pemilihan Umum 2024 dan tidak memperhatikan prinsip-prinsip *good governance*.
4. Kepada para penyelenggara negara, khususnya aparat penegak hukum (Polri-Kejaksaan) dan TNI diharapkan selalu bersikap imparisial, adil, dan tidak berpihak untuk memenangkan calon presiden/calon wakil presiden/calon legislatif tertentu.
5. Menjamin tegaknya hukum (*rule of law*) dan bukan *rule*

by law.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kita semua untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, 5 Februari 2024

Pimpinan KPK 2003-2019

Sumber: <https://kemitraan.or.id/press-release/seruan-moral-untuk-pemerintah-agar-kembali-menjunjung-tinggi-etika/>, diakses 9 April 2024

Rilis Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia: “Sikap MPH PGI terhadap Pelaksanaan Pemilu 2024 dan Seruan Pastoral kepada Segenap Umat Kristiani untuk Berpartisipasi dalam Pemilu 2024”

Tanggal rilis: Senin, 12 Januari 2024

**SIKAP MPH PGI TERHADAP PELAKSANAAN
PEMILU 2024 DAN SERUAN PASTORAL KEPADA
SEGENAP UMAT KRISTIANI UNTUK
BERPARTISIPASI DALAM PEMILU 2024**

Saudara-saudara Umat Kristiani di Indonesia,

Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 sebagai hajatan demokrasi terbesar bangsa Indonesia akan segera berlangsung melalui pemungutan suara pada, Rabu, 14 Februari 2024. Pemilu Serentak 2024 akan diikuti dengan Pilkada 2024 pada November mendatang.

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) bersyukur bahwa menjelang Pemilu 2024, tak nampak pembelahan tajam dalam masyarakat akibat perbedaan pilihan politik. Demikian juga, ruang media sosial kita tidak dibanjiri oleh caci maki, hoaks, dan pelintiran kebencian, sebagaimana terjadi dalam pemilu sebelumnya.

Sekalipun demikian, PGI mencermati bahwa pemilu belum sungguh-sungguh ditempatkan dalam kerangka pembangunan substansi demokrasi. Hal mana terlihat dari masih berkembangnya politik uang, serta praktik-praktik curang dan kotor yang mengabaikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, serta mencederai tatanan moral dan etika demokrasi. Di lain pihak, netralitas penyelenggara negara terus dipersoalkan. Keterbelahan di kalangan elite semakin berkembang, dan dikhawatirkan akan merembes ke akar rumput. Jika situasi ini dibiarkan, kepercayaan publik terhadap hasil pemilu akan rendah, generasi muda

akan menjadi apatis dan enggan berpartisipasi, selain berkembang potensi delegitimasi hasil pemilu yang bisa menyulut konflik.

Menyikapi pentingnya Pemilu 2024 bagi perjalanan hidup berbangsa dan bernegara, PGI mendorong semua warga gereja untuk mendoakan kesuksesan pemilu. Peliharalah sikap optimis dan pupuklah pengharapan! Berpartisipasilah secara kritis dan bermartabat dalam penyelenggaraan pemilu untuk menghadirkan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan bagi bangsa ini!

Untuk maksud itu, PGI memandang perlu untuk menyampaikan beberapa pokok pikiran dalam kerangka pastoral sebagaimana berikut:

1. Pemilu adalah sarana bagi warga gereja, yang adalah warga negara, bersama pemerintah melaksanakan panggilan kudusnya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Di dalam pemilu, warga negara memilih pemimpin dan wakil rakyat, serta berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional. Karena itu, berdoalah untuk keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Mintalah hikmat dan tuntunan Allah untuk menggunakan hak pilih saudara-saudara secara bebas dan bertanggung jawab demi kemajuan demokrasi dan kesejahteraan bangsa kita.
2. Patut diingat bahwa penegakan moral dan etika selama pemilu sangat penting untuk menjamin kualitas demokrasi. Pemilu yang bermartabat harus menjauh dari praktik korupsi, politik uang, politisasi identitas pemilih, manipulasi kekuasaan dan hukum, pelintiran kebencian dan penyebaran hoaks. Ketika moral dan etika ditegakkan, warga negara akan meyakini integritas sistem pemilihan dan percaya bahwa suara mereka akan dihitung dengan akurat.
3. Kepada lembaga penyelenggara pemilu, PGI mendorong untuk sungguh-sungguh mengedepankan

penegakan aturan dengan berani, murni, konsekwen dan konsisten. Tugas saudara-saudara memang berat namun sangat mulia. Karena itu, kami harapkan agar bekerjalah secara jujur dan mandiri. Berpihaklah pada rakyat, bukan pada tim sukses atau calon tertentu. Peran saudara-saudara akan sangat menentukan apakah pemilu ini jujur dan adil, serta hasilnya bisa dipercaya. Kami mendoakan agar saudara-saudara sehat dan dimampukan menjalankan tugas mulia itu dengan baik dan bertanggung jawab.

4. Bagi warga gereja yang ikut dalam kontestasi politik nasional dan daerah, ingatlah bahwa politik bukan lahan untuk mencari kekuasaan, tetapi sarana mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum (*bonum universale*). Karena itu, kedepankan kejujuran dan kehormatan saudara-saudara dalam menggalang simpati dan dukungan suara rakyat. Jadilah calon yang berintegritas! Raihlah kemenangan dengan cara-cara yang tidak mempermalukan iman Kristen. Dengan demikianlah, saudara-saudara akan menjadi saksi Kristus yang baik bagi bangsa ini. Kami berdoa agar saudara-saudara berhasil dalam pemilu ini.
5. Kepada gereja-gereja, kami mengingatkan bahwa gereja ditempatkan Allah di dalam kota/polis, bukan untuk berdiam diri, atau sebaliknya berkompromi pada kebobrokan. Gereja ditempatkan untuk mendoakan dan mengupayakan kesejahteraan bangsa ini (Bnd Yer 29:7). Dalam pelaksanaan pemilu, kami mengajak gereja-gereja secara institusional untuk tidak memihak kepada calon pemimpin, caleg, atau partai politik tertentu. Ingatlah bahwa pilihan warga gereja sangat majemuk terhadap kandidat pemimpin dan caleg, maupun partai politik. Sekalipun demikian, gereja memiliki kekuatan untuk meningkatkan kesadaran umat tentang pentingnya karakter, integritas, dan komitmen kandidat terhadap pelayanan kepentingan publik.
6. Kepada warga gereja yang menggunakan hak pilihnya,

kami mengimbau agar:

- a. Sebelum memberikan suara, luangkan waktu untuk mempelajari calon-calon yang berkontestasi dalam pemilihan, serta ideologi partai-partai politik pendukung mereka. Jangan berpihak pada calon dan partai politik yang mengejar kekuasaan sebagai tujuan, tetapi dukunglah mereka yang menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk melayani pencapaian kesejahteraan bersama. Fokuslah memilih mereka yang berintegritas, setia kepada konstitusi, Pancasila dan UUD 1945, serta punya komitmen kuat untuk tetap tegaknya NKRI.
- g. Hindarilah keterjebakan pada visi dan misi serta janji-janji kampanye para calon yang nampak manis dan menjanjikan. Jangan tergoda pada pencitraan media, karena kampanye media cenderung memoles sisi baik dari calon yang berkontestasi. Sebaliknya, pelajarilah rekam jejak, sikap, dan kebijakan mereka terkait isu-isu penting kebangsaan, kemasyarakatan, dan lingkungan, yang menentukan kemajuan bangsa dalam lima tahun ke depan.
- h. Tolaklah politik uang dan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Politik uang dan politisasi identitas biasanya dilakukan oleh para calon yang tidak yakin akan kapasitas dirinya. Jika terpilih, akan mudah bagi mereka untuk menjadi orang-orang oportunis dengan mental korup dan tamak.
- i. Jauhilah hoaks, ujaran dan pelintiran kebencian, provokasi, intimidasi, dan polarisasi atas dasar pilihan politik yang berbeda. Hindari konflik dan perpecahan di tengah masyarakat maupun persekutuan gereja. Warga gereja terpanggil untuk menghadirkan *shalom*, damai sejahtera Allah bagi bangsa ini, bukan perpecahan.

- j. Berpartisipasilah sebagai relawan untuk mengawasi dan menjamin berlangsungnya pemilu secara jujur dan adil. Saudara-saudara bisa melakukannya melalui kerjasama dengan berbagai lembaga independen pengawas pemilu, atau melakukannya secara mandiri melalui berbagai situs pengawasan pemilu. Salah satu di antaranya adalah melalui website <https://jagapemilu.com>
- k. Ingatlah bahwa partisipasi saudara-saudara dalam pemilu tidaklah semata-mata merupakan panggilan kebangsaan, tetapi juga panggilan iman dan pengutusan untuk menjadi garam dan terang dunia (Mat 5:13-16). Hal ini secara eksplisit menempatkan saudara-saudara dalam proses menggarami dan menerangi yang tak berkeputusan.
- l. Di atas semuanya itu, kami mengingatkan saudara-saudara bahwa gereja-gereja di Indonesia dipanggil menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Hal mana dinyatakan melalui partisipasi dalam Pemilu 2024 secara positif, kritis, kreatif, dan realistis, dengan tetap berpengharapan demi transformasi menuju masyarakat berkeadaban.

Demikianlah, kami sampaikan sikap MPH PGI terhadap pelaksanaan Pemilu 2024, dan pesan Pastoral MPH PGI kepada saudara-saudara umat Kristiani di Indonesia. Semoga membawa berkat dan kebaikan bagi bangsa ini! Amin.

“Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat, tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh-kesalah rakyat” (Amsal 29:2)

Jakarta, 12 Januari 2024

Atas nama

Majelis Pekerja Harian

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia

Rilis Pimpinan Pusat Muhammadiyah: “Pelaksanaan Pemilu 2024”

Tanggal rilis: Rabu, 14 Februari 2024

PERNYATAAN PERS
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR: 001/PER/I.0/A/2024
TENTANG PELAKSANAAN PEMILU 2024

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilu 2024, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan sebagai berikut:

1. Mengapresiasi masyarakat yang telah berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya dengan penuh tanggung jawab dan tertib di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).
2. Mengapresiasi komisi pemilihan umum (KPU) dan semua penyelenggara pemilu mulai dari tingkat pusat sampai tingkat TPS, para aparat keamanan, dan semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan pemilu sehingga berlangsung aman, tertib, dan lancar mulai dari proses pemungutan hingga penghitungan suara.
3. Mengimbau semua pihak, khususnya partai politik dan para calon anggota legislatif, serta para calon presiden-wakil presiden dan para pendukungnya, agar bersabar menanti hasil akhir pemilu yang akan disampaikan secara resmi oleh KPU. Semua pihak hendaknya tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hasil pemilu berdasarkan *quick count* yang disampaikan oleh lembaga survei.
4. Semua pihak hendaknya tetap menjaga situasi yang kondusif dengan tetap menjaga sikap saling

menghormati dan tenggang rasa. Kepada pasangan capres-cawapres yang menang dan para pendukungnya hendaknya tidak jumawa dan euforia yang berlebihan. Bagi yang kalah hendaknya berjiwa besar dan *legawa* menerima hasil pemilu.

5. Apabila ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan hasil pemilu hendaknya menyelesaikan melalui jalur Mahkamah Konstitusi dan tidak menempuh cara-cara pengerahan massa yang berpotensi memicu kekerasan dan konflik horizontal.

Semoga Allah *subhanahu wataala*, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan rahmat dan pertolongan kepada bangsa Indonesia sehingga tetap bersatu, berdaulat, dan maju.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

EPILOG

BELAJAR DARI MASA KELAM UNTUK MASA DEPAN

Fathul Wahid

“Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.”

–George Santayana, *The Life of Reason*, 1905.

Kita tidak ingin menjadi bangsa yang terkutuk. Kita, manusia, cenderung belajar dari pengalaman. Tetapi, tanpa pengingat, risiko mengulangi kesalahan tetap ada. Apalagi, memori kita saat ini cenderung volatil, mudah menguap, alias gampang lupa.

Pengingat tidak hanya membantu kita untuk menjauhi kesalahan yang sama, tetapi juga memperkuat hikmah dari pengalaman sebelumnya. Karenanya, ungkapan “orang bijak belajar dari kesalahan orang lain, tetapi orang bodoh mengulanginya sendiri” menjadi sangat masuk akal. Bangsa ini tidaklah bodoh.

Buku ini merupakan salah satu bentuk pengingat itu. Dokumentasi pernyataan sikap yang disampaikan oleh beragam elemen masyarakat di akhir pemerintahan Joko Widodo dan menjelang Pemilihan Presiden 2024 akan menjadi tazkirah bangsa ini. Tanpa kehilangan optimisme, bangsa ini pernah berada pada momen kelam, yang dampaknya sampai saat ini belum sepenuhnya sirna.

Momen Kelam

Indonesia berada pada titik kritis menjelang Pemilihan Presiden 2024, ketika banyak elemen masyarakat mulai merasakan bahwa cita-cita reformasi seolah kian menjauh. Ini merupakan momen kelam bagi bangsa ini. Demokrasi yang dulu dibangun dengan semangat perubahan menghadapi ancaman baru dalam bentuk korupsi, oligarki,

dan konsolidasi kekuasaan yang mengabaikan masa depan bangsa.

Setiap elemen bangsa perlu mengingat bahwa demokrasi Indonesia bukanlah hadiah, tetapi hasil perjuangan panjang melawan otoritarianisme dan ketidakadilan. Dengan menolak lupa, kita mengikat diri untuk terus memperjuangkan nilai-nilai reformasi: keterbukaan, keadilan, dan pemerintahan yang bersih.

Kemunduran demokrasi sering kali dimulai dengan diam-diam. Penyalahgunaan kekuasaan, pelemahan institusi penegak hukum, kecurangan pemilihan umum, pelanggaran hak asasi manusia, dan pembatasan kebebasan berpendapat, merupakan tanda-tandanya.

Melalui buku ini, kita melihat bagaimana berbagai organisasi yang masih terpelihara akal sehat kolektifnya, menyuarakan keprihatinan mereka terhadap demokrasi yang semakin terkikis. Mereka menyerukan kepada seluruh rakyat untuk tidak menjadi penonton pasif, melainkan aktif mengawasi jalannya demokrasi dan menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan, beragam organisasi juga menyoroti penggunaan aparat dan institusi negara yang diduga tidak lagi netral. Situasi ini sangat mengkhawatirkan, sebab demokrasi yang sehat hanya dapat berjalan jika setiap komponen negara menjalankan fungsinya secara independen. Dengan netralitas ini, seluruh elemen bangsa bisa merasakan perlindungan yang setara dan tidak merasa diintimidasi.

Selain itu, beragam pernyataan sikap yang terangkum di dalam buku ini juga memperingatkan bahwa politik dinasti dan oligarki tengah berkembang pesat di Indonesia, membawa risiko besar bagi demokrasi. Sistem yang seharusnya memberikan ruang bagi publik untuk memilih pemimpin secara adil justru dimanfaatkan oleh kekuatan oligarki untuk mempertahankan kekuasaan mereka.

Di sisi lain, ancaman krisis lingkungan dan ketidakadilan sosial juga menjadi sorotan beberapa pernyataan sikap, menunjukkan bahwa demokrasi sejati haruslah memperhatikan kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan. Pemimpin yang bijak adalah mereka yang berkomitmen pada agenda keberlanjutan, dan bukan hanya mengejar pembangunan fisik tanpa memikirkan dampaknya pada lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Secara khusus, perguruan tinggi juga mengingatkan betapa pentingnya peran intelektual dalam menjaga moral dan etika demokrasi. Perguruan tinggi adalah benteng terakhir dalam mempertahankan rasionalitas, keterbukaan, dan independensi. Saat suara kritis mulai ditekan dan peran akademisi dipinggirkan, kita menghadapi risiko besar akan kemunduran nilai-nilai akademik yang telah lama dijunjung tinggi. Kampus harus tetap menjadi ruang yang netral dan bebas dari tekanan politik, karena di sanalah tempat bagi kebebasan berpikir yang dapat memajukan bangsa.

Melalui buku ini, bangsa Indonesia diingatkan akan tanggung jawab moral yang ada pada setiap generasi untuk menjaga demokrasi. Betul, sebagai sebuah sistem, demokrasi bisa jadi tidak kalis cacat, tetap sistem ini masih menjadi pilihan terbaik untuk hari ini. Hanya dengan sikap menolak lupa, demokrasi Indonesia dapat tumbuh menjadi fondasi kokoh yang akan melindungi keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Menolak Lupa

Momen kelam dalam sejarah bangsa ini harus menjadi pelajaran yang tidak boleh dilupakan. Lupa terhadap masa lalu yang penuh luka hanya akan membuka jalan bagi pengulangan sejarah yang sama.

Ingat akan momen kelam juga membantu kita *mengembangkan kesadaran kritis* sebagai masyarakat. Ketika kita memahami dampak negatif dari politik oligarki, manipulasi kekuasaan, dan ketidakadilan, kita lebih cenderung untuk menjaga kewaspadaan dan menuntut pemilihan umum

yang adil, transparan, dan berintegritas. Masyarakat yang sadar dan ingat akan sejarah cenderung lebih kuat dalam menghadapi godaan politik uang, manipulasi informasi, atau janji-janji kosong yang sering muncul saat masa kampanye.

Selain itu, menolak lupa adalah bagian dari *menghormati perjuangan* mereka yang telah berkorban untuk demokrasi dan hak-hak rakyat, terutama pada pendiri bangsa Indonesia. Setiap langkah maju dalam demokrasi adalah hasil dari pengorbanan. Dengan mengingat momen kelam, kita menghargai warisan reformasi dan menunjukkan tanggung jawab untuk menjaga demokrasi tetap hidup dan berdaya.

Melupakan sejarah berarti membuka pintu bagi munculnya kembali praktik-praktik yang merugikan masyarakat dan melemahkan demokrasi. Menolak lupa adalah tindakan preventif yang *membentengi bangsa dari kemunduran* dan menjamin hak-hak rakyat tetap terlindungi. Indonesia sudah pernah merasakan bagaimana kegelapan otoritarianisme dapat merusak tatanan sosial dan kemanusiaan, meninggalkan trauma yang tak mudah disembuhkan.

Dengan menolak lupa, kita meneguhkan diri untuk terus waspada terhadap kemunduran demokrasi. Di sinilah terletak pentingnya ingatan kolektif kita: agar demokrasi Indonesia terus tumbuh, kuat, dan kokoh bagi generasi masa depan.

Memperjuangkan Masa Depan

Menjemput masa depan bukan sekadar tentang mempertahankan apa yang ada hari ini, tetapi tentang membangun dasar yang kokoh bagi generasi mendatang agar dapat hidup dalam lingkungan yang adil, damai, dan sejahtera. Masa depan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya; ia harus diperjuangkan dengan kesadaran akan nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Setiap usaha mempertahankan demokrasi, menuntut keadilan. Melawan korupsi dan oligarki adalah investasi bagi masa depan yang lebih cerah. Demokrasi yang kuat akan membuka jalan bagi keterlibatan masyarakat secara lebih luas, memungkinkan setiap orang memiliki suara dan kesempatan untuk berkembang. Ini adalah pilar yang memastikan bahwa bangsa ini dapat terus berjalan dalam semangat kejujuran, keadilan, dan kesetaraan.

Namun, perjuangan ini tidak mudah dan sering kali penuh tantangan. Setiapnya, jika tidak ditangani dengan baik, akan berdampak pada generasi yang akan datang. Karena itulah, kita harus menanamkan sikap kritis dan kesadaran kolektif bahwa perjuangan hari ini bukan hanya untuk kita, tetapi demi masa depan yang berkelanjutan dan bermartabat.

Untuk memperjuangkan masa depan yang lebih baik, kita perlu membangun kesadaran kolektif. Kita harus memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan cara yang tidak hanya menguntungkan segelintir elite, tetapi juga menjunjung tinggi etika dan mendatangkan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan yang berpihak pada lingkungan, pendidikan yang inklusif, dan ekonomi yang berkeadilan adalah pilar-pilar yang akan membawa Indonesia pada masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, memperjuangkan masa depan adalah tentang memberikan yang terbaik dari kita untuk mereka yang akan datang setelah kita. Ini adalah tugas yang membutuhkan keberanian, ketulusan, dan komitmen untuk melawan segala bentuk hipokrisi, ketimpangan, dan penindasan. Ini adalah tanggung jawab kolektif bangsa ini.